AL-ZAYTUN MODEL KONSERVASI HUTAN KOTA

BERITA INDONESIA®

EDISI 51 TAHUN III ★ 23 NOVEMBER - 06 DESEMBER 2007

Rp 15.000 (Luar Jabodetabek Rp 16.500)

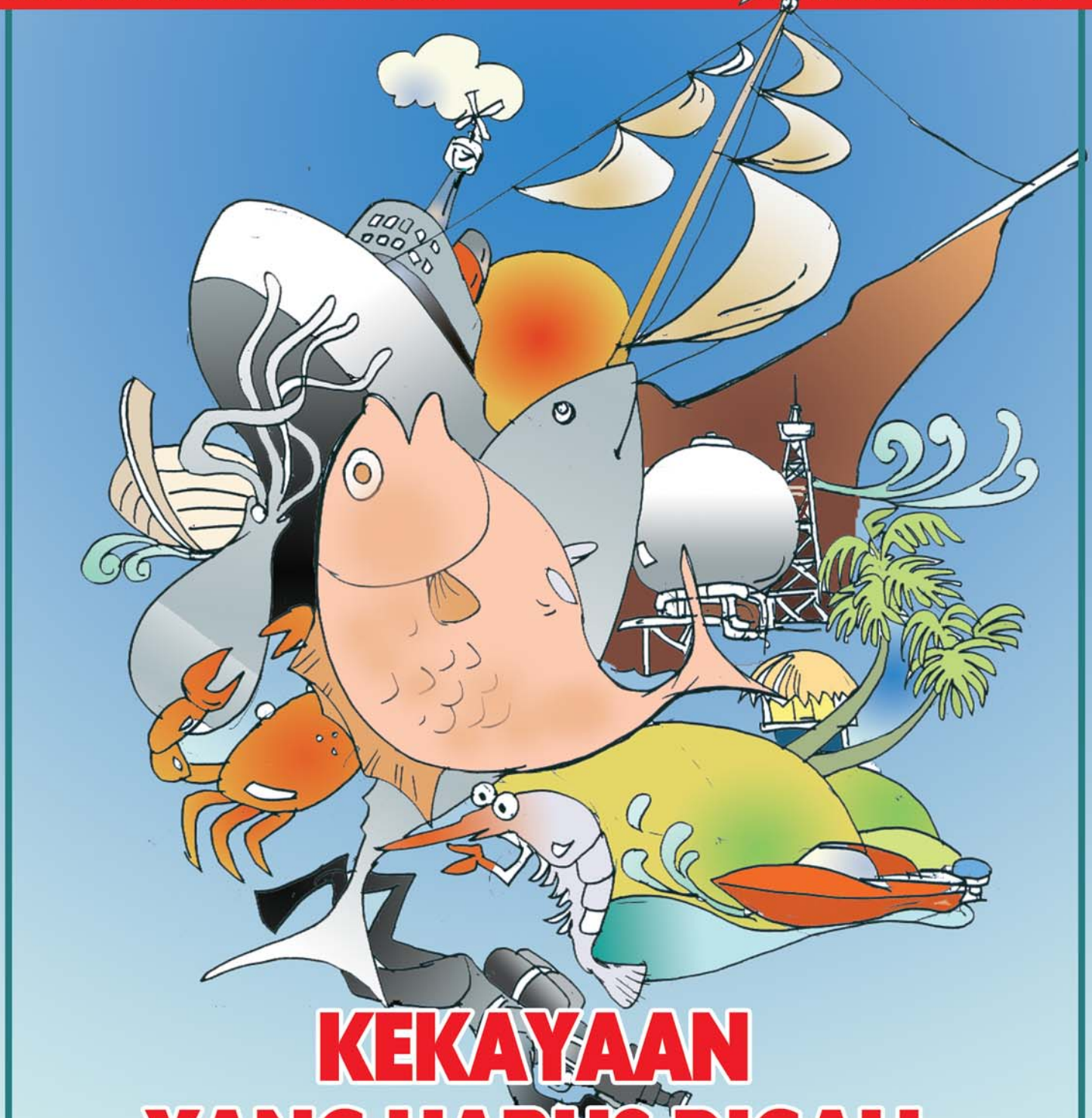

KEKAYAAN YANG HARUS DIGALI

DEMOKRASI, TOLERANSI DAN PERDAMAIAN

ISSN 1907-977X

www.beritaindonesia.co.id

Beras Basmati Al-Zaytun

Introduksi India

Beras Basmati adalah dari bangsa padi asal India dan Pakistan. Basmati dalam bahasa Urdu/Hindi berarti harum dan wangi, bentuk bulirnya panjang .

Beras Basmati yang harum terkenal di seluruh dunia, banyak orang ingin menanamnya. Harganyapun menawan tinggi.

Kini di Indonesia telah dibudidayakan, produksinya sangat baik. Tepatnya di Al-Zaytun, sejak tahun 2005 telah ditanam ratusan hektar, produksinya cukup memuaskan.

Beras Basmati produk Al-Zaytun memiliki panjang tidak kurang dari 7 mm dengan tampilan putih bersinar.

Indonesia mengimport banyak Beras Basmati dari India dan Pakistan untuk memenuhi konsumen penggemarnya.

Beras Basmati produk Al-Zaytun diharapkan dapat mengimbangi import yang telah berjalan.

Bagi penggemar Nasi Briyani, Nasi Kabuli dll, kiranya tidak lagi bergantung Beras Basmati import, Al-Zaytun siap memasok.

Tentunya harga pasti bersaing, termasuk citarasanya.

Bumi Indonesia memberi citarasa Beras Basmati yang spesifik.

Silahkan mencoba Beras Basmati produk Al-Zaytun.

Syukria.

Nutrition Highlights *)

Basmati rice, 1 cup (200g) (cooked)

Calories : 205
Protein : 4.2g
Carbohydrate : 44.5g
Total Fat : 0.44g
Fiber : 0.63g

***Good source of :**

Iron : 1.9mg
Selenium : 11.8mcg
Thiamine : 0.26mg
Niacin : 2.3mg

*) Sumber : The Truestar Health Encyclopedia

Informasi: zaytun99@yahoo.com

DAFTAR ISI

Sampul/Ilustrasi:
Dendy Hendrias

Edisi No. 51/Th.III/ 23 November - 06 Desember 2007

DARI REDAKSI 4
VISI BERITA 5
SURAT PEMBACA 6
BERITA TERDEPAN 8
HIGHLIGHT/KARIKATUR BERITA 9
LINTAS TAJUK 15

BERITA UTAMA
MENUJU KEJAYAAN BANGSA BAHARI
TAHUN EMAS DEKLARASI DJUANDA 1957-2007
Deklarasi Djuanda menekankan peran penting Indonesia sebagai kawasan paling dinamis dalam percaturan dunia, baik secara ekonomis maupun politis. Ekonomi kelautan seharusnya sudah menjadi tumpuan utama dalam pembangunan ekonomi nasional.. 16

Industri Kelautan Dinomorduakan 19
Kekayaan Yang Harus Digali 21
Jangan Biarkan Dikuasai Asing 24
Menjaga Kedaulatan di Laut 26
Hari Nusantara Pererat NKRI 28
Perlu Dukungan Semua Pihak 29
“No Blood No Glory” 30

LINTAS MEDIA
BUMN dan Permasalahannya 33

BERITA EKONOMI
Babak Baru Nasib Temasek 41

BERITA KHAS
Kasus Adelin Lis Bikin Miris 42

BERITA NASIONAL
Benda Bersejarah pun Dipalsukan 44

BERITA POLITIK
SBY - JK Langgeng Hingga 2009 46
Kemelut Pilkada Malut 47

BERITA TOKOH
Susilo Bambang Yudhoyono 48
Erwin Pardede 48
Ir. M. Hatta Radjasa 49
Dahlan Iskan 49

BERITA HUKUM
Setelah Tak Bersepakat 50

Menghapus Citra Mafia Gelap 51

BERITA KESEHATAN
Solusi Melahirkan Tanpa Rasa Sakit 52

Terapi Hipnotis 53

BERITA IPTEK
Android Ponsel Masa Depan 54
Kabar Baik untuk Penggila Buku 55

LENTERA
AL-ZAYTUN MODEL KONSERVASI HUTAN KOTA
Kampus Al-Zaytun adalah taman yang indah! Kampus ini patut dimeteraikan sebagai sebuah model konservasi hutan (taman) kota. Pernyataan ini tak terbantahkan tatkala kita menyelusuri dan menyaksikan kehijauan kawasan Al-Zaytun setelah ditata secara terencana sejak mula berdirinya. Penataan kawasan hijau Al-Zaytun dilandasi prinsip Syaykh Abdussalam Panji Gumilang bahwa menanam dan memelihara pepohonan (lingkungan) adalah salah satu ciri orang beriman.....34

BERITA MANCANEGARA
Piagam ASEAN Bersatu 56

Cinta Ratu Pandangan Pertama 57

BERITA HUMANIORA
Autisme dan TV 58

BERITA PEREMPUAN
Setengah Abad Pengabdian 59

BERITA DAERAH
Ini KPK Asli atau Palsu? 60

Koruptor di Bulungan 60
Binangkit usung Lily - Endang 61
“Demokratisasi Menuntut Kepatuhan” 62

BERITA HANKAM
HUT Ke-62 Pasukan Elit TNI-AL 64
G. Toisutta Pangkostrad Baru 64
Tiga Pejabat Strategis Dilantik 64

BERITA BUDAYA
Sarimin dan Wayang Listrik 65

BERITA BUDAYA
200 Juta untuk Bisa Nomor Empat 66
APBD untuk Klub Sepak Bola 66

BERITAINDONESIA

Demokrasi, Toleransi dan Perdamaian

Pemimpin Umum:
Syaykh Dr AS Panji Gumilang

Pemimpin Redaksi:
Ch Robin Simanullang

Redaktur Senior:
MYR Agung Sidayu
Imam Supriyanto
Dendy Hendrias
Suryo Pranoto

IN HEADNEWS (Liputan, Litbang & Pusdat):
Mangatur Lorielcide Paniroy (Redaktur Eksekutif)

Koordinator Liputan:
Haposan Tampubolon

Sekretaris Redaksi
Retno Handayani

Redaktur:
Suryo Pranoto
Marjuka Situmorang

Staf Redaksi:
Samsuri
Nawawi
Ikhwan Triatmo
Sarjiman
Doan Adikara Pudan
Amron Ritonga

Wartawan Foto:
Wilson Edward

Desainer:
Esero Design, Arief Maulana

Biro Redaksi:
Medan: HM Aulia E Panggabean (Kepala)
Bontor Simanullang, Jawa Barat: Ade Wiharyana, Bernard Sihite, Prana Citra, Tarakan: Sudirman Leonard Pohan

Penerbit:
PT Berita Satria Wiratama
Bekerjasama dengan Yayasan Pesantren Indonesia dan PT. Asasira (Citraprinsip Publisitas Indoadprint)

Komisaris:
Syaykh Dr AS Panji Gumilang

Direktur/Pemimpin Perusahaan:
Ch Robin Simanullang

Wakil Pemimpin Perusahaan:
Samsuri

Iklan dan Promosi:
Imam Supriyanto
Herni Dewi Farida

Keuangan dan Umum:
Mangatur Lorielcide Paniroy

Sirkulasi dan Distribusi:
Abdul Halim
Marjuka Situmorang
Bantu Hotsan

Harga:
Rp 15.000 (Luar Jabodetabek Rp 16.500)

Percetakan:
PT Gramedia
(Isi di luar tanggung jawab percetakan)

Alamat Redaksi/Tata Usaha:
Jalan Cucakrawa No.14A
Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan
Telp. (021) 8293113, 70930474, 83701736
Fax. 83787235

E-mail:
redaksi@berindo.com - iklan@berindo.com

Website:
www.beritaindonesia.co.id

ISSN: 1907-977X

Ditjen HAKI Sertifikat No. 000.108.028

foto: berindo wilson

Syaykh Al-Zaytun AS Panji Gumilang didampingi Abdul Halim saat berbincang-bincang dengan Pemred Berita Indonesia Drs Ch Robin Simanullang.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Salam Sejahtera,

Sidang Pembaca,

Dalam rangka turut memperingati 50 Tahun Deklarasi Djuanda (18 Desember 2007), Berita Indonesia mengangkat Berita Utama yang menekankan pentingnya bangsa ini membangun dengan orientasi kelautan *(ocean oriented)*. Bagi kami, membangun laut berarti membangun masa depan Indonesia yang mandiri, maju dan sejahtera. Membangun laut adalah keniscayaan karena 60 persen penduduk atau sebanyak 140 juta orang Indonesia bermukim di wilayah pesisir. Membangun ekonomi kelautan harus menjadi arus utama di setiap kebijakan pembangunan. Laut jangan lagi diposisikan sebagai sektor pinggiran. Sebab laut memiliki sejuta potensi yang bisa memakmurkan bangsa ini mulai dari potensi di bidang industri pelayaran, industri perikanan, dan pariwisata bahari. Laut juga bisa digunakan sebagai sumber energi alternatif pengganti BBM (bahan bakar minyak) seperti *ocean thermal energy conversion* (OTEC), energi yang berasal dari perbedaan pasang surut, dan energi yang berasal dari gelombang.

Sedangkan *Lentera* kali ini masih mengupas kepedulian kampus Al-Zaytun dalam menyelamatkan bumi. Apabila para pemimpin bangsa berkumpul di Bali Desember ini untuk membahas perubahan iklim global, Al-Zaytun yang disiapkan berdiri kokoh hingga ratusan tahun ke depan sudah ditanami berbagai pohon dan tumbuhan. Penataan kawasan hijau Al-Zaytun dilandasi prinsip Syaykh Abdussalam Panji Gumilang bahwa menanam dan memelihara pepohonan (lingkungan) adalah salah satu ciri orang beriman.

Sidang Pembaca,

Sudah hampir dua tahun Majalah Berita Indonesia dicetak dengan mesin cetak tercanggih milik Percetakan PT Gramedia di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Selama itu pula, kami benar-benar merasakan pelayanan, dedikasi dan profesionalisme yang ditampilkan oleh personil Percetakan PT Gramedia. Sebagai bentuk apreasiasi atas kerjasama yang selama ini sudah terjalin, kami memenuhi undangan perayaan 35 tahun Percetakan PT Gramedia yang diadakan di Balai Kartini, Jakarta, Senin (26/11). Kami berharap Percetakan PT Gramedia yang lahir pada 25 November 1972 bisa terus melebarkan sayap dan disegani di kawasan Asia Tenggara. Selamat!

Tidak terasa kita sudah di penghujung tahun. Kami bersyukur waktu yang berlalu sebagian besar kami gunakan untuk memberikan yang terbaik bagi pembaca. Kiranya berita-berita lain yang kami sajikan di edisi kali ini juga berkenan di hati pembaca. Doakan kami untuk tetap setia memberikan yang terbaik. Selamat membaca.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Visi Kelautan Indonesia

Pada 13 Desember 1957 Perdana Menteri Ir Djuanda mendeklarasikan seluruh perairan antarpulau di Indonesia sebagai wilayah nasional. Deklarasi itu kemudian dikenal sebagai Deklarasi Djuanda, yang merupakan pernyataan jati diri sebagai negara kepulauan, di mana laut menjadi penghubung antarpulau, bukan pemisah. Pemerintah, pada tahun 2001 kemudian menetapkan hari Deklarasi Djuanda sebagai Hari Nusantara (Keppres 126 tahun 2001).

Sebelum Deklarasi Djuanda, Republik Indonesia yang diproklamirkan 17 Agustus 1945, dengan wilayah negara mencakup peninggalan Hindia Belanda, belum menjadi negara kepulauan. Menurut Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie 1939, batas laut teritorial Indonesia adalah 3 mil laut dari pantai. Maka pada waktu itu, perairan antarpulau adalah wilayah internasional. Wilayah laut kita hanya kira-kira 100.000 km^2. Secara fisik pulau-pulau Indonesia dipisahkan oleh laut.

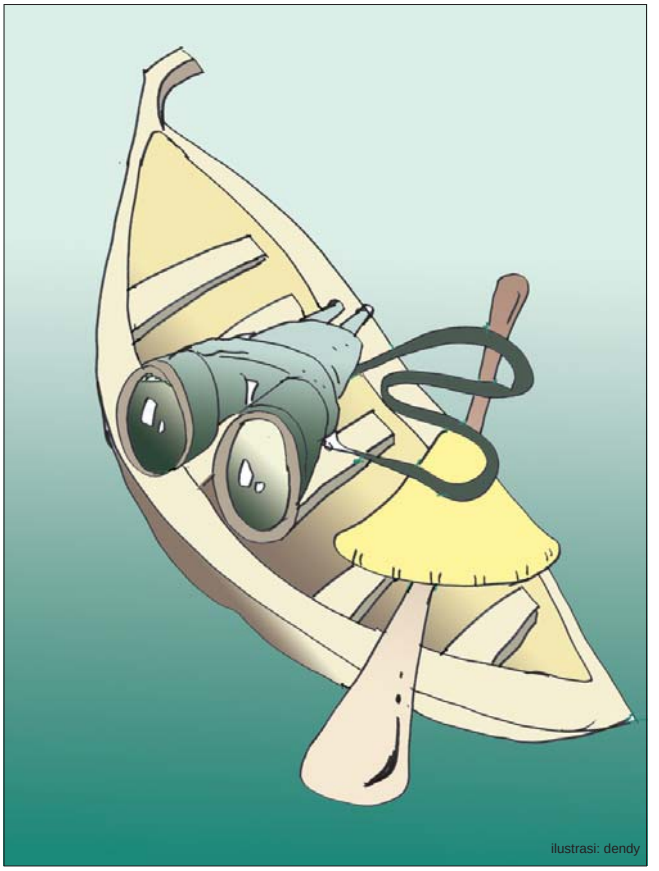
ilustrasi: dendy

Deklarasi Djuanda yang menyatakan Indonesia sebagai negara kepulauan, pada mulanya ditentang negara-negara maju. Namun melalui perjuangan yang panjang dan ulet, melewati dua rezim pemerintah dan tiga rezim politik yang berbeda yaitu Demokrasi Liberal, Demokrasi Terpimpin dan Orde Baru, akhirnya Indonesia mendapat pengakuan internasional di PBB. Pada tahun 1982 lahirlah Konvensi kedua PBB tentang Hukum Laut (2nd United Nations Convention on the Law of the Sea, disingkat UNCLOS) yang mengakui prinsip-prinsip negara kepulauan Nusantara (*archipelagic principles*), sekaligus juga mengakui konsep Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang diperjuangkan oleh Chili dan negara-negara Amerika Latin lainnya.

UNCLOS kemudian resmi berlaku pada tahun 1994 setelah diratifikasi oleh 60 negara. Dengan UNCLOS, Indonesia mendapat pengakuan dunia atas tambahan wilayah nasional seluas 3,1 juta km^2 wilayah perairan dari hanya 100.000 km^2 warisan Hindia Belanda, ditambah dengan 2,7 juta km^2 Zone Ekonomi Eksklusif yaitu bagian perairan internasional dimana Indonesia mempunyai hak berdaulat untuk memanfaatkan sumber daya alam termasuk yang ada di dasar laut dan di bawahnya. Jadilah Indonesia mewujudkan diri sebagai satu-satunya bangsa di dunia yang menamakan wilayahnya sebagai Tanah Air.

Prinsip-prinsip negara kepulauan Nusantara (*archipelagic principles*) dengan lebih 17.500-an pulau adalah anugerah yang luar biasa. Ditambah lagi letak geografis Indonesia yang strategis, di antara dua benua dan dua samudera. Juga memiliki sumber daya alam yang berlimpah. Panjang pantai 81.000 km (kedua terpanjang di dunia setelah Canada) yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi.

Namun, bangsa ini belum mengoptimalkan anugerah sebagai negara kepulauan itu demi kemajuan dan kesejahteraan rakyatnya. Rakyat Indonesia masih saja terbelenggu sebagai petani dan nelayan miskin. Selain karena pembangunannya masih lebih berorientasi kedaratan, belum berorientasi kelautan, juga karena budaya kerja yang berkultur agrarian konservatif, serta tidak mampu membangun industri maritim yang kompetitif. Juga lantaran inefisiensi birokrasi dan korupsi.

Sumber daya dan hasil-hasil kelautan kita masih terpendam dan kalaupun sudah dieksploitasi atau didayagunakan bukan oleh Indonesia dan untuk Indonesia, melainkan dirampok oleh bangsa-bangsa lain. Sudah menjadi rahasia umum, bahwa kapal-kapal asing menangkapi ikan di perairan Indonesia secara leluasa. Polisi perairan ataupun Angkatan laut kita tidak punya kemampuan yang cukup untuk mengatasinya. Padahal pada zaman Bung Karno, Angkatan Laut kita (atas bantuan Uni Soviet) pernah menjadi yang keempat terbesar di dunia setelah Amerika Serikat, Uni Soviet dan Iran.

Syukurlah pada era reformasi ini, pemerintah mulai melirik potensi kelautan kita yang antara lain ditandai dengan membuka kelembagaan Departemen Kelautan dan Perikanan dan Dewan Maritim Indonesia pada tahun 1999.

Namun setelah berjalan sewindu, agaknya peran dan ruang lingkup tugas serta sumber daya manusia kedua lembaga ini masih perlu ditingkatkan. Negara (pemerintah) perlu memiliki kebijakan kelautan yang jelas dan visioner, baik dalam mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam dan sember daya ekonominya maupun dalam perekrutan sumber daya manusia pengelolanya.

Kiranya Departemen Kelautan dan Perikanan dan Dewan Maritim Indonesia (kini Dewan Kelautan Indonesia) dipercayakan kepada orang-orang yang memiliki kompetensi. Pemerintah sebaiknya menempatkan dan/atau memosisikan Dewan Kelautan Indonesia menjadi lembaga yang punya peran strategis dalam pengembangan kebijakan kelautan. ■

Surat atau komentar tentang apa saja baik berkenaan dengan isi majalah Berita Indonesia maupun ide/gagasan/pandangan tentang isu-isu aktual dapat dikirimkan ke Redaksi Berita Indonesia, dengan alamat sebagai berikut:

- http : //www.beritaindonesia.co.id/surat _pembaca/
- email : redaksi@berindo.com
- surat : Jalan Cucakrawa No.14A Bukit Duri, Tebet, Jaksel 12840
  Telp. (021) 70930474, 8293113
  (021) 83701736

Perhatian Kepada Anak IQ Rendah

Dengan hormat. Melalui Berita Indonesia saya ingin berkomentar dan bertanya mengenai masalah pendidikan di sekolah, terutama untuk anak-anak dengan IQ rendah. Mereka kesulitan menerima begitu banyak pelajaran. Ada pelajaran yang saya anggap belum perlu diberikan, apalagi hanya teori saja yang diberikan, contohnya seni musik. Yang mereka butuhkan bukan hanya teori tapi juga praktek. Kalau belum bisa dipraktekkan dengan alat musiknya, jangan dulu mempelajari istilah-istilah seperti permata, not ½, dan lain-lain. Ini hanya salah satu contoh kecil mata pelajaran yang belum perlu diberikan untuk anak SD/MI. Contoh lain dalam pelajaran matematika. Untuk mengetahui macam-macam timbangan dan alat pengukur juga perlu ditunjukkan alat-alatnya dan bagaimana cara kerjanya. Ini akan memudahkan mereka dalam mengingat pelajaran yang sudah mereka dapatkan. Menurut hemat saya, dengan banyaknya mata pelajaran yang berbeda-beda dan hanya mempelajari teorinya, hanya akan membuang waktu mereka untuk bisa menguasai ilmu tersebut karena pencarian ilmu yang tidak efektif, apalagi untuk mereka yang IQ-nya biasa saja. Karena dari semua ilmu yang mereka dapatkan hasilnya akan setengah-setengah. Akhirnya mereka tidak terpakai untuk menjadi tenaga profesional. Pertanyaan saya, bagaimana sikap para pendidik dalam mengatasi masalah tersebut? Saya akan menambahkan lagi, menurut saya sangat baik dan perlu sekali bila di sekolah terutama di pesantren, diberikan mata pelajaran yang dapat membuat mereka berani tampil atau berbicara di depan banyak orang. Ini dimulai dengan berani berbicara di depan kelas dengan bahasa yang baik agar kelak mereka pandai berdiplomasi. Karena komunikasi yang baik sangat diperlukan dan penting sekali untuk kemajuan bangsa. Ini dimulai dari tingkat MI/SD. Terimakasih.

Dewi, di Jakarta

Napi Kok Jadi Ketua Umum?

Sebagai rakyat bangsa Indonesia saya sebenarnya merasa memiliki PSSI. Tapi rupanya PSSI sudah bukan lagi milik bangsa Indonesia, tapi milik Nurdin Halid. Mohon izin bertanya, apakah PSSI ini milik bapaknya Nurdin Halid, sehingga sekalipun sudah menjadi pelaku kriminal masih saja harus dipertahankan? Ataukah di negeri yang bernama Indonesia ini sudah begitu sulit mencari orang benar (tidak cacat hukum), sehingga napi pun dijadikan ketua umum. Kasihan sekali negeriku Indonesia.

Romeo
tsp_21@yahoo.com

Menanggapi Pernyataan Ketua BPK

Ketua BPK Anwar Nasution dalam beberapa surat kabar nasional tanggal 2 November 2007 menyatakan bahwa kasus MI-17 adalah hasil pengembangan dari audit yang dilakukan oleh BPK. Selanjutnya dia menegaskan bahwa dalam sejarah republik, baru kali ini ada jenderal dihukum. Hal ini mencerminkan bahwa Ketua BPK merasa bangga bisa menghukum jenderal. Setelah membaca Majalah Gatra Edisi 51 tahun 2007 (1-7 Nov 2007), saya merasa ragu atas hasil audit BPK tersebut, karena sesuai keputusan Hakim ternyata para para pejabat (Terdakwa I, II dan III) yang dihukum (termasuk jenderal) ternyata tidak menerima uang. Rekanan (Terdakwa IV) telah melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak dan helikopter MI-17 sudah siap dikirim jika Pemerintah RI membayar sisa pembayaran yang 85 persen. Jika demikian apa layak para terdakwa disebut sebagai koruptor. Menurut hemat kami, pernyataan Ketua BPK tersebut perlu dilanjutkan bahwa dalam sejarah republik mungkin baru kali ini ada pejabat pemerintah yang dihukum sebagai koruptor bukan karena terima suap atau terima uang pelicin atau apapun namanya. Mungkin hanya di republik ini pula ada rekanan yang telah melaksanakan tugas sesuai kontrak dihukum karena Pemberi Kerja (Pemerintah) hanya bisa membayar uang muka 15 persen dari nilai kontrak. Kami sarankan agar Ketua BPK lebih fokus kepada kasus BLBI yang telah menyengsarakan rakyat. Mungkin dalam sejarah republik baru kali ini para pejabat yang bertanggung jawab atas korupsi yang merugikan keuangan negara ratusan triliun rupiah tidak tersentuh hukum walaupun kasusnya sudah hampir 10 tahun.

Muhammad Usep Dz
uche_x@yahoo.com

BUNG WARTO

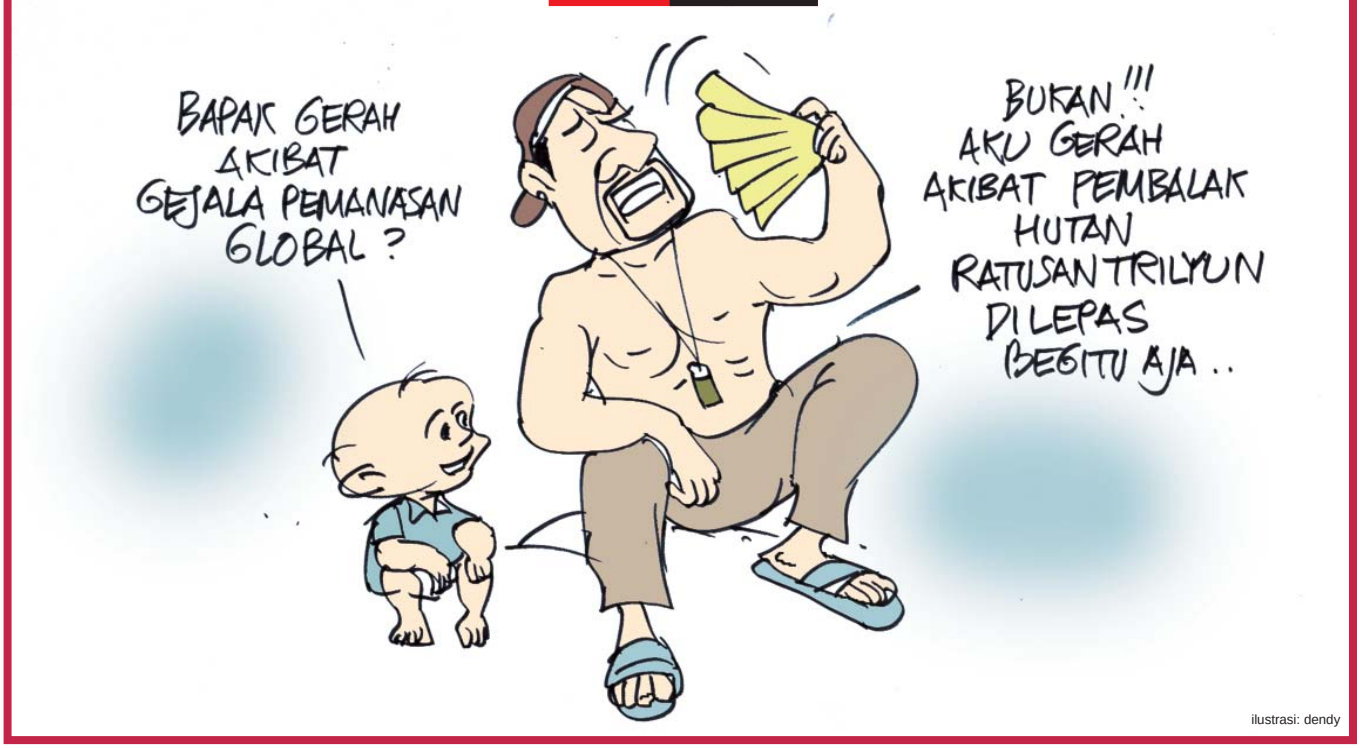

ilustrasi: dendy

Tempat Anda untuk Berlangganan

Majalah BERITAINDONESIA

Anda yang berada di luar Pulau Jawa dapat menghubungi alamat di bawah ini :

BANDA ACEH : BTN Ajuen, Lr Melati No. 118 Kec, Peukan Bada, Banda Aceh 23351. Tlp (0651)41093, MEDAN : Komplek Vila Palm Kencana Blok R No. 10 KM 12, Medan-Binjai 20351. Tlp (061)8460646, SIANTAR : Jl. Rambing No. 18, Pematang Siantar, LABUHAN BATU : Jl. Padang Bulan No. 28, Rantau Prapat. KARO : Jl. Sangab Enlau No. 51 Kaler Jahe. RIAU : Jl. Ababil No. 15B Rt 07 Rw. 07, Kel. Kampung Melayu, Kec. Sukajadi Pekanbaru 28124, Riau. Telp (02761) 26578, RIAU UTARA : Perum Beringin Patra Gg. Poros No. 3 Rt 02/09, Bukit Datuk, Dumai 28825. Telp (0765)36219. RIAU SELATAN : Jl. Pattimura No. 28C Rt. 06/02, Kel. Skip Hilir, Rengat Timur, INHU, Riau. Telp (0769)21932, RIAU KEPULAUAN : Jl. Sri Pulau Gg. Kayu Manis No. 129W Rt. 03/02, Kel. Bengkalis Riau. Telp (0766)22924, PADANG : Jl. Pamancingan I No. 1Rt. 006/02 Kel. Pasar Gadang, Padang Selatan, Sum-Bar 25210. Telp (0751)27289, JAMBI : Jl. Riau Lr Al-Muklisin Rt. 11B Rw. 03 No. 106 Kel. Rawasari, Kec. Kotabaru, Kodya Jambi 36125. Telp (0741)61397, BENGKULU : Jl. Kemang Manis No. 8 Rt. 08/Rw. 2, Kel. Sawah Lebar, Kec. Gading Cempaka, Kodya Bengkulu 38228. Telp (0736)20663, PALEMBANG : Perum Mas Karebet Blok A1 No. 15 Palembang 30154. Telp (0711)416545, MUARA ENIM : Perum Gunung Ibul Blok C2 No. 8 Kab. Prabumulih Sumatera Selatan Telp (0713)322420, LAMPUNG : Jl. Wiraswasta No. 23 Rt. 02 Lk. I Kel. Gedong Meneng, Kec. Kedaton, Bandar Lampung 35145. Telp (0721)701281, KOTABUMI : Jl. Jend. Sudirman No. 49 Kota Gapura Kotabumi Lampung Utara. Telp (0724)328369, PONTIANAK : Jl. Karimata No. 19, Kelurahan Sui Bangkong Pontianak 78116, SINGKAWANG : Jl. Pembangunan Gg. Sukaramah No. 27A Singkawang Kal-Bar, SINTANG : Jl. Imam Bonjol No. 54 Sintang 78611. Telp (0562)21544, KETAPANG : Jl. Kol. Sugiono No. 48 Ketapang, BALIKPAPAN : Jl. Sepinggan XI, Rt 33 No. 6, Kel. Sepinggan, Kec. Balikpapan Selatan, Kodya Balikpapan 76115. Telp (0542) 764365, PASIR : Jl. Ki Hajar Dewantara No. 12 Rt. 05 Rw. 02 Tanah Grobot Kab. Pasir, Kal-Tim. Telp (0543)22335, SAMARINDA : Jl. Latsitarada III, Perum Bukit Indah Blok B No. 6, Kel. Sel Kunjang Samarinda. Telp (0541)273035, BERAU : Jl. SM Aminuddin No. 749 Tanjungredep Kab. Berau Kal-Tim. Tlp (0554)23130, BANJARMASIN : Komplek Kayu Tangi I No. 28 Rt. 45, Kec. Banjar Utara Banjarmasin 70123. Telp (0511)304396, PALANGKARAYA : Jl. Karanggan No. 1 Kelurahan Tanjung Pinang, Kec. Pahandut, Kodya Palangkaraya 73113, Kalimamtan Temgah. Telp (0536)38958, PANGKALAN BUN : Jl. Perwira No. 1 Rt/Rw 05, Kel. Mendawai, Kec. Arsel, Pangkalan Bun Kal-Teng. Telp (0532)24452, KAPUAS : Jl. Seroja No. 2 Selat Dalam, Kuala Kapuas, Kal-Teng. Telp (0513)24082, BUNTOK : Jl. Ampah Buntok, No. 24 Rt. 40. Ampah, Barito Selatan, Kal-Teng. Telp (0622)31334, MANADO : BTN Nusantara Permai Blok C No. 11 Mapanget Barat, Manado 9524, MAKASSAR : Komplek Mangasa Permai Jl. Tallasalapang II Blok J1 No. 12, Makassar, Sul-Sel. Telp (0411)863655, PAREPARE : Jl. Wakke'e No. 5 Parepare Sul-Sel. Telp (0421)22785, GOWA : Jl. Syekh Yususf V/I Gowa. Telp (0411)861661, BONE : Jl. Hussain Jeddawi Baru No. 9A, Bone, Sul-Sel. Telp (0481)2000041, PALOPO : Jl. Imam Bonjol No. 3 Palopo. Telp (0471)24310, PALU : Jl. Purnawirawan III No. 41, Rt. 01, Kel. Tatura, Palu Selatan Sul-Teng. Telp (0451)481361, KENDARI : Jl. RA Kartini No. 12 Kendari, BUTON : Jl. MH. Thamrin No. 32A, AMBON : BTN Kanawa Indah Blok C-3 No. 12 Air Kuning, Ds. Batumerah Kodya Ambon, Maluku 97128. Telp (0911)310427, TIMIKA : Jl. Pendidikan No. 10, Desa Kopra Kopa, Kec. Mimika Baru, Kab. Mimika/Timika, Irian Jaya, KUPANG : Jl. Trikora No. 16 Rt. 01 Rw. 01 Kelurahan Air Mata, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang NTT 85000, BELU : Perum Ray Belu Permai A/9, Belu. Telp (0389)22408, MATARAM : Jl. R. Suprapto No. 37 Ampenan, Kodya Mataram 83000. Telp (0370)632331, LOMBOK : Jl. Pejanggik No. 66 Pancor. Lombok. Telp (0376)21718, SUMBAWA : Jl. Hasanuddin Gg. Teratai, Sumbawa. Telp (0371)21070, BALI : Jl. Buana Raya Gg. Buana Kerti No. 3 Pd.Sambian Denpasar Barat 80117. Telp (0361)485890, MALAYSIA : 32 Jalan Tengku Ampuan Zabedah 9/A, 40100 Shah Alam, Selangor. Telp (03)55137009.

Senyum Berjuta Makna

Belum lama ini kita disuguhkan 'senyuman' para pecandu narkoba yang ditangkap polisi.

ilustrasi: dendy

Berita tentang polisi membongkar jaringan mafia pengedar ekstasi internasional dengan barang bukti 490.802 butir ekstasi atau senilai Rp 49,08 miliar akhir November lalu membuat kita kembali menghela napas. Tidak cukup sampai di situ, kita dibuat geleng-geleng kepala ketika disuguhi tayangan dan foto adegan 'mesra' seorang isteri yang menjewer telinga suaminya yang 'nakal' karena ditangkap polisi setelah pesta sabu-sabu di hotel Novotel Surabaya. Banyak yang mempertanyakan, mengapa sang istri membiarkan suaminya pergi ke mana-mana padahal sang suami harus diawasi terus karena sedang dalam proses pengobatan dari ketergantungan narkoba.

Meski ditangkap lagi, sang suami malah tampak sumringah menebar senyum sementara rekan-rekannya pecandu narkoba seperti sangat malu dengan berusaha menutup mukanya dari jepretan kamera wartawan. Rona wajah sang suami menjadi mirip penyanyi kurus 'Sakura dalam Pelukan' yang juga senyum-senyum saat ditangkap dan dikerubuti wartawan karena kedapatan membawa ganja. Atau bisa pula mirip wajah si penyanyi cadas berambut kribo yang pernah menyanyikan tembang manis nan abadi berjudul "Panggung Sandiwara".

Senyum memang mengandung berjuta makna. Namun makna senyum para pecandu narkoba sudah menjadi bahan obrolan untuk jadi tebak-tebakan. Ada yang bilang senyum itu adalah senyum karena sedang *fly* (menggunakan narkoba). Ada pula yang bilang karena sudah dari sananya orang itu suka tersenyum. Atau yang lebih lucu lagi, orang itu tersenyum karena merasa yakin bahwa pengadilan mengenai narkoba dapat diakal-akali, hukuman bisa dikurangi asal ada uang atau tersenyum karena menganggap masalahnya hanya sebagian episode dari film atau sinetronnya. Kalau mau yang lebih miris, senyum itu berarti senyum kalau istri dan anak-anaknya akan tetap mencintai dan memaafkan "pengkhianatan" yang dia lakukan atas cinta mereka. Istrinya yang cantik masih tetap akan setia hingga akhir hayatnya dan hanya akan menganggapnya "nakal" meski sudah meruntuhkan kepercayaan yang diberikan.

Bisa pula senyum itu berarti senyum percaya diri, kalau dia akan tetap dikagumi, dia akan menjadi bintang dalam posisi apa pun baik sebagai artis atau pun sebagai pecandu narkoba. Sebab meski sudah menjadi residivis masih banyak yang mengerubunginya, ingin dekat dengannya dan ingin pose bersamanya. Termasuk polisi, polwan dan para wartawan. Senyum itu bisa pula sama seperti tebaran senyum para pejabat yang ketahuan korupsi agar tidak terlihat panik.

Bercanda soal makna di balik senyum bisa ditutup dengan kesimpulan. Namun kalau bicara soal Indonesia yang tidak hanya sebagai negara konsumen, namun sudah menjadi produsen, kelihatannya sulit untuk tutup buku. Sebab keuntungan bisnis narkoba makin mengiurkan membuat produsen narkoba berlomba-lomba meracik sendiri di Indonesia.

Menurut catatan Badan Narkotika Nasional (BNN), uang berputar untuk bisnis narkoba mencapai Rp 12 triliun. Sementara pemakainya juga terus bertambah. BNN mengklaim korban narkoba di Indonesia dari tahun ke tahun grafiknya terus naik. Pada 2006, 3,2 juta orang, 900 orang di antaranya adalah anak SD.

Hasil penelitian BNN dengan Universitas Indonesia mensinyalir sekitar 15 ribu orang Indonesia setiap tahunnya mati sia-sia akibat memakai narkoba. Perang terhadap narkoba memang terus didengungkan. Berbagai operasi penindakan dan penegakan hukum dilancarkan. Selama tahun 2006, jumlah kasus narkoba secara nasional yang diungkap sebanyak 11.400 kasus, dengan jumlah tersangka yang ditangkap sebanyak 22.503 orang terdiri atas 22.457 WNI dan 46 WNA. Barang bukti yang disita mencakup ganja 9.888.994,72 gram, kokain 149,20 gram, heroin 4.042,34 gram, sabu-sabu 1.188.113,51 gram dan ecstasy 180.498,5 tablet.

Untuk pabrik narkoba, BNN berhasil membongkar 18 pabrik pil ecstasy dan sabu-sabu, berikut laboratorium di Indonesia. Pabrik itu antara lain ecstasy (MDMA) sindikat Burhan Tahar di Cengkareng, Tangerang, pabrik ecstasy sindikat Ang Kiem Soei di Tangerang, pabrik ecstasy sindikat Hans Philip di Bogor, Jawa Barat, pabrik sabu-sabu (Met Amphetamine) sindikat Benny Sudrajat di Cikande, Banten. Laboratorium gelap psikotropika sindikat Siswo Prawiro di Batu Jawa Timur, laboratorium gelap pil ecstasy sindikat Hangki Gunawan di Surabaya. Di wilayah Jakarta misalnya, hasil analisa dan evaluasi (Anev) Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya, sejak Januari sampai Mei 2007 jumlah kejahatan narkoba sebanyak 3.226 kasus dengan tersangka 3.957 orang terdiri atas produsen 3 orang, pengedar 1.724 dan pemakai atau penyalahguna 2234 orang, 7 di antaranya WNA.

Suguhan angka statistik di atas bisa dengan mudah kita buat, namun tidak halnya dengan pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Idealnya, penyalahgunaan narkoba harus dilawan dengan memakai sistem dan koordinasi yang baik dari berbagai komponen. Sekolah misalnya, dapat membuat sistem melalui pendidikan, penerapan aturan dan tata tertib yang tegas dan kondusif, membentuk jaringan antinarkoba di lingkungan sekolah, serta melaksanakan koordinasi dengan masyarakat, sekitar sekolah, LSM, dan aparat kepolisian. Namun, apa yang kita jumpai di lapangan masih jauh dari ideal. Jumlah pengguna dan sindikat narkoba terus bertambah. Entah dengan alasan atau kondisi apapun, makin banyak orang yang memilih mengonsumsi narkoba, menggali liang kubur sendiri dan meretas jalan ke neraka. Mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya. ■ **MLP**

726 Bahasa Daerah Terancam Punah

13/11 - Sebanyak 726 dari 746 bahasa daerah di Indonesia terancam punah karena generasi muda enggan memakai bahasa tersebut. Bahkan, kini hanya tersisa 13 bahasa daerah yang memiliki jumlah penutur di atas satu juta orang, itu pun sebagian besar generasi tua. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Pembinaan Pusat Bahasa Mustakim di sela-sela Kongres Bahasa-bahasa Daerah Wilayah Barat di Bandar Lampung. Menurut Mustakim, sebanyak 13 bahasa daerah yang jumlah penuturnya lebih dari satu juta penutur adalah Bahasa Jawa, Bahasa Batak, Sunda, Bali, Bugis, Madura, Minang, Rejang Lebong, Lampung, Makassar, Banjar, Bima, dan Bahasa Sasak. Bahkan, tidak sedikit bahasa daerah yang jumlah penuturnya kurang dari satu juta bahkan hanya tinggal puluhan penutur saja. Di antaranya bahasa di daerah Halmahera, Maluku Utara, yang jumlah penuturnya sangat terbatas. Salah satu faktor penyebab terjadinya penurunan jumlah penutur adalah akibat pengaruh budaya global. Pengaruh budaya itu menyebabkan generasi muda lebih suka berbicara dengan menggunakan bahasa nasional Bahasa Indonesia, sesekali diselingi dengan menggunakan bahasa asing, daripada dengan bahasa daerah.

Indonesia Perlu Komponen Cadangan

14/11 - Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Muladi mengemukakan komponen cadangan untuk pertahanan sangat diperlukan oleh Indonesia mengingat luas wilayah dan sumber daya alam yang harus diamankan cukup besar. Ia mencontohkan, Singapura yang merupakan negara pulau dengan penduduk empat juta orang memiliki 2,5 juta tentara sedangkan Indonesia yang jumlah penduduknya hampir 300 juta, angkatan bersenjatanya hanya kurang dari 300 ribu orang. Muladi menambahkan, untuk membentuk komponen cadangan diperlukan payung hukum berupa undang-undang yang berlaku bagi semua warga negara Indonesia. Oleh sebab itu, Departemen Pertahanan saat ini tengah mengajukan rancangan undang-undang tentang komponen cadangan dalam rangka memperkuat sistem pertahanan nasional guna mendukung komponen utama yakni Tentara Nasional Indonesia. Dalam rancangan undang-undang itu ditetapkan bahwa setiap warga negara berusia lebih dari 18 tahun diwajibkan menjadi anggota komponen cadangan.

Kasus Dana BI Menyeret 16 Nama

15/11 - Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat atau BK DPR mengantongi 16 nama anggota DPR periode 1999-2004 yang diduga menerima aliran dana dari Bank Indonesia. Dari 16 nama tersebut, 7 nama diantaranya diperoleh dari Koalisi Penegak Citra DPR. Sebagian dari mereka kini masih menjadi wakil rakyat di Senayan. BK menolak mengumumkan nama mereka karena akan diperiksa. Sementara itu, anggota Badan Supervisi BI Romli Atmasasmita menegaskan, nama siapa pun yang disebutkan dalam surat Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Anwar Nasution kepada KPK, tanggal 14 November 2007, harus dibaca terindikasi korupsi atau penyuapan. Dalam suratnya, Anwar menduga adanya penggunaan dana BI dan Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) yang tidak tepat. Dana senilai Rp 100 miliar dari YPPI, yayasan yang dimiliki BI, dipakai untuk membantu penanganan hukum terhadap mantan pejabat BI sebesar Rp 68,5

Karikatur Berita

miliar dan disalurkan ke DPR senilai Rp 31,5 miliar. BI juga mengeluarkan dana Rp 27,747 miliar untuk bantuan hukum pada mantan petinggi BI. Sejumlah saksi yang dimintai keterangan Badan Kehormatan DPR mengakui, sejumlah rapat DPR ternyata juga difasilitasi BI, termasuk penyediaan hotel tempat rapat.

Proyek Busway Ada yang Dibatalkan

16/11 - Pembangunan jalur khusus bus transjakarta koridor XI, XII, dan XIII, yang direncanakan pada 2008, dibatalkan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lebih memilih optimalisasi 10 koridor yang ada, memperbaiki kualitas pelayanan dan pengadaan kendaraan pengumpan daripada membangun koridor bus transjakarta yang baru. Selain itu, angkutan pengumpan yang terintegrasi dalam sistem juga akan dibangun untuk mempermudah calon penumpang mengakses transjakarta. Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo mengatakan, sepanjang 2007, bus transjakarta sudah mengangkut 44 juta orang. Kapasitas angkut dan pengumpan harus ditingkatkan untuk mendorong pengendara kendaraan pribadi pindah ke bus transjakarta. Sementara itu, pembangunan badan jalan untuk jalur bus transjakarta Koridor X sudah mencapai 92 persen. Sementara di Koridor VIII mencapai 78,9 persen dan Koridor IX mencapai 78,12 persen. Cepatnya pembangunan badan jalan itu tidak diikuti dengan pembangunan halte dan pengadaan bus. Pembangunan halte baru akan selesai Februari 2008.

Safari Megawati Dinilai Tebar Pesona

18/11 - Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang telah bersedia dicalonkan sebagai calon Presiden dalam Pemilu 2009, Minggu (18/11) pagi mulai berkampanye dengan mengelilingi Pulau Jawa. Safari yang dikemas dalam bentuk "Silaturahmi Megawati Bersama Rakyat." ini berlangsung selama lima hari hingga Kamis 22 November 2007. Megawati mengungkapkan perjalanannya keliling Jawa adalah untuk menemui konstituen partai yang dipimpinnya di pulau dengan populasi penduduk terbesar di Indonesia, dan bukan untuk mencuri "start" kampanye Pemilu 2009. Pernyataan Megawati ini ditanggapi dingin dari istana karena sebelumnya Megawati pernah mengatakan bahwa Presiden Yudhoyono tidak banyak melakukan kerja dan hanya "tebar pesona" dengan melakukan kunjungan ke berbagai daerah. "Makanya, saya katakan siapa yang tebar pesona," kata Juru Bicara Kepresidenan, Andi Mallarangeng di Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta (19/11), sebelum mengikuti perjalanan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Singapura.

KPPU Memvonis Temasek Bersalah

19/11 - Perusahaan telekomunikasi milik Singapura, Grup Temasek, diharuskan melepas seluruh kepemilikan sahamnya di salah satu perusahaan,

Karikatur Berita

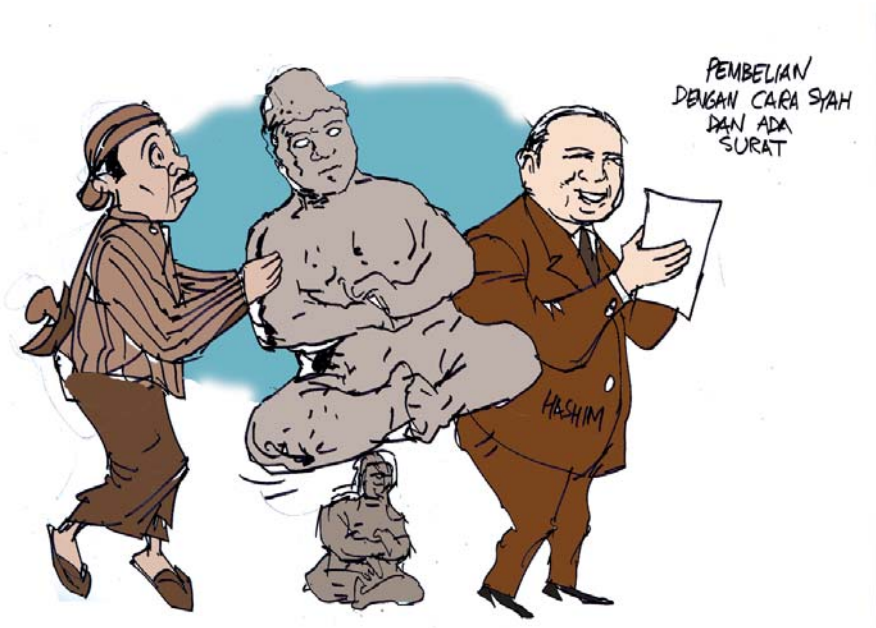

yaitu PT Telekomunikasi Selular atau PT Indosat Tbk, dalam waktu paling lama dua tahun. Selain itu, BUMN Singapura itu harus membayar denda Rp 25 miliar, karena terbukti melanggar UU No. 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dalam keputusannya menyebutkan ada 10 pihak terlapor antara lain Temasek Holdings Pte Ltd, Singtel, STT Communications Ltd, Asia Mobile Holdings Company Pte Ltd, Indonesia Communications Ltd, Singapore Telecommunications Pte Ltd dan Singapore Telecom Pte Ltd. Dalam keputusan KPPU yang dibacakan Ketua Majelis Komisi, Syamsul Ma'arif dijelaskan bahwa Singapore Telecomunication juga terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 27 huruf a UU no 5 tahun 1999. Dalam pasal itu tertulis bahwa pelaku usaha dilarang memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis yang melakukan kegitan usaha, pasar dan satu pelaku usaha atau kelompok usaha menguasai lebih dari 50 persen pangsa pasar atau jenis barang atau jasa tertentu. KPPU pun memutuskan Telkomsel terbukti melanggar Pasal 17 Ayat (1) UU No 5/1999 tentang monopoli. Telkomsel dihukum denda Rp 25 miliar. KPPU memerintahkan Telkomsel menghentikan praktik pengenaan tarif tinggi dan menurunkan tarif layanan seluler sekurang-kurangnya 15 persen dari tarif yang berlaku pada tanggal dibacakannya putusan ini. Dari hasil pemeriksaan, KPPU menemukan kerugian konsumen industri seluler tahun 2003-2006 sebesar Rp 14,764 miliar hingga Rp 30,808 miliar. Pascaputusan KPPU ini harga saham PT Indosat Tbk dan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, yang merupakan induk perusahaan Telkomsel, sempat jatuh.

Piagam ASEAN Ditandatangani

20/11 - Setelah 40 tahun berdiri, akhirnya ASEAN memiliki Piagam ASEAN atau ASEAN Charter, yang ditandatangani semua kepala negara pada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN di Singapura. Dengan adanya piagam itu, ASEAN kini memiliki aturan hukum yang jelas untuk mengatur hubungan kerja sama di antara 10 negara ASEAN sehingga bisa menjawab tantangan ke depan. Implementasi Piagam ASEAN harus menunggu proses ratifikasi di setiap negara. Dalam acara penandatanganan Piagam ASEAN tersebut, semua kepala negara juga menandatangani tiga dokumen lain, yaitu Cetak Biru Komunitas Ekonomi ASEAN, Deklarasi ASEAN tentang Pembangunan Lingkungan yang Berkelanjutan (Environmental Sustainability) dan Deklarasi ASEAN terhadap Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim. Sejumlah poin penting dari Piagam ASEAN yang terdiri dari 13 bab dan 55 pasal itu adalah menjaga dan meningkatkan perdamaian dan keamanan di kawasan, membentuk pasar tunggal berbasis produksi yang kompetitif dan terintegrasi secara ekonomi, memperkuat demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik, serta menegakkan aturan hukum dan mengedepankan hak asasi manusia.

Arca Kuno Transit di Kemang

21/11 - Poltabes Solo dibantu Polres Metro Jakarta Selatan akhirnya membawa kembali lima arca kuno yang dicuri dari Museum Radya Pustaka Solo. Kelima arca batu itu disita dari rumah pengusaha nasional Hashim Djojohadikusumo di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Selasa (20/11) dan tiba kembali di Solo pada hari Rabu, sekitar pukul 15.45 WIB. Arca-arca buatan abad IV sampai abad X itu adalah Ciwa Mahadewa, Durga Mahisasuramardhini, Agastya, Mahakala, dan arca Durga Mahisasuramardhini II. Menanggapi pemberitaan tentang lima arca Museum Radya Pustaka yang disita Poltabes Solo di rumahnya di Kemang, Hashim melalui sahabat dekatnya, Fadli Zon, menyatakan tidak pernah terlibat jual beli arca dengan pihak Museum Radya Pustaka. Menurut Fadli, Hashim membeli

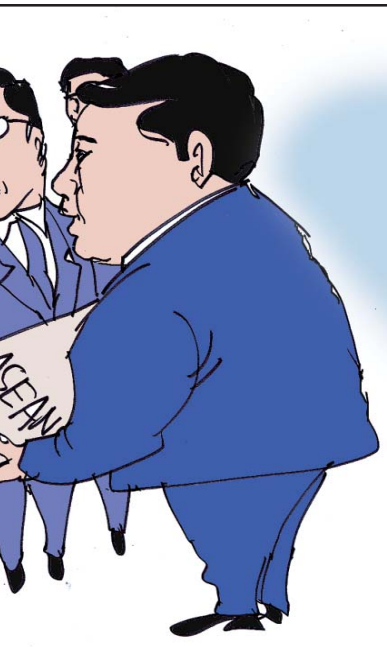

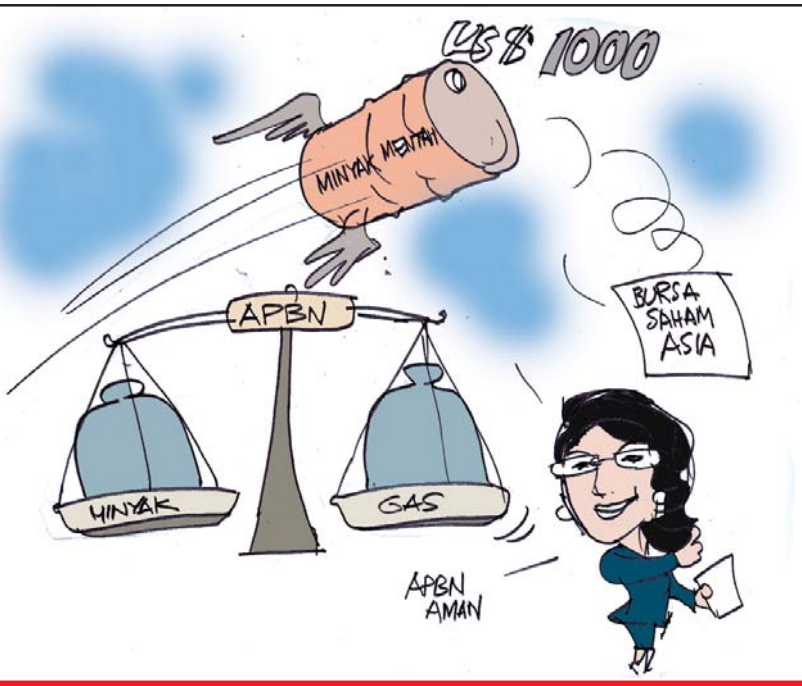

benda-benda tersebut lengkap dengan surat-surat yang ditandatangani oleh Hugo Kreijger, dealer dan konsultan benda-benda seni yang pernah bekerja lama di Christie's Amsterdam dan Sunan PB XIII. Dengan adanya sertifikat dan surat-surat itu, Hashim yakin arca-arca itu adalah milik pribadi/keluarga dari Sunan PB XIII. Dalam kasus ini sudah ditetapkan empat tersangka dugaan pencurian dan pemalsuan koleksi museum diantaranya Kepala Museum Radya Pustaka KRHT Darmodipuro (69), yang akrab disapa Mbah Hadi dan Jarwadi, juru pelihara museum.

Reog Diklaim Malaysia

22/11 - Reog Ponorogo yang telah beratus-ratus tahun menjadi kesenian daerah yang menjadi warisan leluhur warga Ponorogo yang telah membumi di nusantara dan bahkan dunia internasional kini diklaim menjadi milik Malaysia. Hal itu, diakui Malaysia dengan mempublikasikan Seni Barongan Malaysia yang diterbitkan Kementrian Kebudayaan, Kesenian, dan Warisan Malaysia melalui sebuah portal (heritage.gov.my). Hal ini membuat Pemkab Ponorogo dan sekaligus masyarakat Ponorogo merasa geram dengan tindakan yang telah dilakukan Malaysia tersebut. Bupati Ponorogo Muhadi Suyono menyatakan akan 'melawan' melalui jalur hukum. "Kesenian reog ponorogo sudah dihakpatenkan. Namun, jika memang Pemerintah Malaysia mengaku-ngaku, maka kita siap melawan melalui jalur hukum," kata Bupati Ponorogo Muhadi Suyono di kantor Pemkab Ponorogo. Menanggapi hal ini, Dubes Malaysia menyatakan bahwa tidak ada klaim dari pihak pemerintah Malaysia.

Dua Anak Indonesia Juara Se-Asia Pasifik

23/11 - Dua anak Indonesia, Adrian Rizaldi Azhar (11) dan Cindy Agatha (9), meraih penghargaan dalam lomba melukis se-Asia Pasifik. Adrian, pelajar kelas VI Sekolah Dasar Negeri (SDN) II Ciampea, Bogor, meraih medali emas United Nation (UN) Habitat Award, sedangkan Cindy, pelajar kelas IV SD Mutiara 17 Agustus, Bekasi, meraih juara III Asia Pacific Children Convention. Penghargaan untuk dua anak Indonesia itu diserahkan di kantor UN Habitat Jakarta, Menara Thamrin, Jakarta. Lomba melukis ini diikuti 493 peserta dari 11 negara, yaitu Indonesia, Banglades, Sri Lanka, China, Filipina, Afganistan, Singapura, Pakistan, Rusia, Maladewa, dan Jepang. Adrian, putra pasangan Hefni Effendi dan Kurniati ini, melukis sejak kelas III SD. Adapun Cindy, putri pasangan Boyke Sitorus dan Ocha Sianturi, suka melukis sejak usia 4 tahun. Chris Radford, pejabat UN Habitat Fukuoka, mengatakan, lomba lukis untuk anak-anak ini sudah dimulai sejak tahun 2001.

Konversi BBM di Luar Jawa Dimulai

24/11 - Konversi bahan

Karikatur Berita

bakar minyak atau BBM dari minyak tanah ke gas di luar Jawa dimulai di Palembang, Sumatera Selatan. Sebanyak 50 keluarga warga Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami, menerima paket konversi berupa tabung gas tiga kilogram, kompor gas, selang, dan regulator. Pembagian paket konversi itu adalah untuk tahap pertama di Kecamatan Sukarami yang akan dilanjutkan hingga 50.000 keluarga. Acara penyerahan paket konversi yang berlangsung di halaman Kantor Kecamatan Sukarami itu dihadiri Wakil Gubernur Sumsel Mahyuddin NS, Wali Kota Palembang Eddy Santana Putra, dan Direktur Pemasaran PT Pertamina Ahmad Faisal. Mahyuddin NS mengungkapkan, program konversi minyak tanah ke gas memang menimbulkan kontroversi, karena merupakan kebijakan baru. Pemerintah provinsi meminta agar Sumsel mendapat satu juta paket konversi yang diberikan secara bertahap. Khusus Palembang pada 2007 ini, ditargetkan mendapat 200.000 paket konversi.

Demokrasi Hanya Alat

25/11 - Rapat Pimpinan Nasional III Partai Golkar menyimpulkan, demokrasi hanyalah cara, alat, atau proses, dan bukan tujuan, sehingga bisa dinomorduakan di bawah tujuan utama peningkatan dan pencapaian kesejahteraan rakyat. Demikian diutarakan Ketua Umum Partai Golkar M Jusuf Kalla dalam pidato politiknya pada penutupan Rapimnas di Jakarta, Minggu malam. Kesimpulan itu juga dikuatkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam arahannya, Presiden memuji dan berterima kasih kepada Partai Golkar atas pernyataan politik dan dukungannya untuk pemerintah hingga Oktober 2009. Presiden minta partai lain meniru yang dinyatakan Partai Golkar. Dalam Rapimnas, Golkar mengeluarkan 10 pokok pernyataan politik yang disarikan dari dinamika masyarakat, sambutan Kalla, dan pandangan semua peserta. Pernyataan politik yang dibacakan Syamsul Muarif itu merupakan penegasan atas komitmen lama, seperti mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan mengatasi ketertinggalan dari bangsa lain dengan karya nyata.

Air Laut Pasang, Jakarta Kacau

26/11 - Lalu lintas di Jalan Tol Prof Sedyatmo ruas Pluit-Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, pukul 16.30-22.30, terputus akibat genangan air laut pasang dengan ketinggian 40 sentimeter di Kilometer 27. Selain mengacaukan lalu lintas di jalan tol dan jalan arteri di Jakarta, genangan itu juga membuat banyak penerbangan tertunda. Tak hanya calon penumpang, kru pesawat pun terjebak kemacetan. Sejak pukul 16.00 sampai pukul 20.30 sedikitnya ada 11 penerbangan yang tertunda. Kondisi itu membuat banyak calon penumpang yang akhirnya batal berangkat. Sebaliknya, penumpang baru mendarat pun tertahan di bandara. Tertundanya penerbangan dari Jakarta ini menyebabkan tertundanya penerbangan dari kota-kota lain karena menunggu kedatangan pesawat dari Jakarta. Setidaknya ada delapan kota yang tertunda penerbangannya lebih dari dua jam karena keterlambatan kedatangan pesawat dari Jakarta antara lain Yogyakarta, Palembang, Padang, Surabaya, dan Makassar. Keadaan membaik pada pukul 22.30 setelah genangan air mulai disedot dan dialirkan ke tempat lain. Sementara itu, daerah

paling parah tergenang air laut pasang ialah Muara Baru di Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara. Wilayah ini sudah terendam sejak sebulan lalu, tetapi genangan tertinggi terjadi Senin pukul 10.00-14.00, yakni setinggi 1,7 meter.

Ahmad Albar Ditangkap

27/11 – Penyanyi musik cadas Ahmad Albar menjadi tersangka kasus Narkoba setelah ditangkap dan diperiksa sejak Senin malam (26/11). Ia dituduh menyembunyikan tersangka Jenny di rumahnya, Cinere, Depok. Jenny diduga menjadi kurir kasus penyelundupan 490.000 butir ekstasi, di Mall Taman Anggrek, Jakarta Barat beberapa hari sebelumnya. Atas tindakan tersebut, polisi menuduh Albar terlibat persekongkolan dengan sindikat Narkoba. Ketika rumahnya digeledah, polisi menemukan sebutir ekstasi di kamar mandi. Polisi menuduh, itu milik Albar. Itu karena hasil tes urine Albar menunjukkan adanya kandungan Narkoba. Selain itu, lanjutnya, polisi juga menemukan 1,2 gram kokain di kamar Fachry, putra Albar.Temuan ini membuat Fachry menjadi buronan polisi. Fachry Albar akhirnya menyerahkan diri ke Badan Narkotika Nasional, di Jl MT Haryono, Jakarta Timur, Jumat (30/11) sekitar pukul 01.40 WIB. Ahmad Albar kini ditahan di Mabes Polri dan telah ditetapkan sebagai tersangka dengan tuduhan menyembunyikan anggota sindikat dan pemakai ekstasi. Sedangkan keterangan Fachry sangat dibutuhkan untuk mengetahui asal kokain yang berada di kamar itu. Apakah Fachry terlibat atau tidak.

SBY Merasa Dihalang-halangi

28/11 - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan, ada upaya yang dilakukan pihak-pihak tertentu untuk menghalang-halangi upaya pemerintah memberantas korupsi dan pembalakan liar, atau dalam bahasanya, mencuci piring setelah pesta pora pada masa lalu. Halangan itu muncul sejak awal pemerintahan, tahun 2004. "Tentunya, saya tahu sendiri. Ada upaya-upaya untuk tidak berlanjutnya upaya besar ini," ujar Presiden Yudhoyono dalam jumpa pers di kediamannya di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat. "Karena kelalaian kita, dulu banyak yang pesta. Pesta di hutan, pesta di bisnis dengan bisnis KKN, dan mengambil uang negara. Mereka lupa mencuci piringnya, piringnya kotor. Kita cuci bersama-sama piringnya sekarang ini. Tetapi jangan diganggu. Kita mencuci piring akibat kekotoran yang selama ini terjadi di negeri kita," ujar Presiden sebelumnya di Cibadak, Bogor. Fungsionaris Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Budiman Sudjatmiko malah berpendapat lain. Pernyataan Presiden bahwa intensifnya pemberantasan korupsi ini karena mereka yang "berpesta pora" pada masa lalu tidak mau "mencuci piring", lanjut Budiman, sebenarnya juga menunjuk ke Yudhoyono sendiri. Sebab, sebelum ini ia ikut duduk di pemerintahan.

70 Parpol Baru Daftar ke Depkum dan HAM

29/11 - Lebih 70 partai politik (parpol) baru telah mendaftar ke Departemen Hukum dan HAM (Depkum dan HAM) walaupun pendaftaran belum dibuka secara resmi. Menteri Hukum dan HAM Andi Mattalata mengatakan, jika DPR telah menyetujui RUU tentang Parpol, pihaknya akan memproses lebih lanjut, terutama membuka pendaftaran secara resmi. Departemen Hukum dan HAM tidak menolak pendaftaran karena sebagian pengurus Parpol beranggapan bahwa pendaftaran bisa dilakukan setiap saat. Di sisi lain, belum ada anggaran untuk melakukan verifikasi parpol. "Satu tahun membutuhkan sekitar Rp32 miliar. Kalau lima tahun berarti anggaran verifikasi butuh Rp160 miliar," katanya. Yang perlu ditegaskan, kata Menteri, UU Parpol yang baru harus secara tegas mengatur apakah verifikasi dilakukan setiap saat atau secara periodik. Verifikasi dilakukan dua kali, yaitu verifikasi yang dilakukan Departemen Hukum dan HAM untuk mendapatkan status badan hukum dan verifikasi untuk persyaratan mengikuti Pemilu yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Karikatur Berita

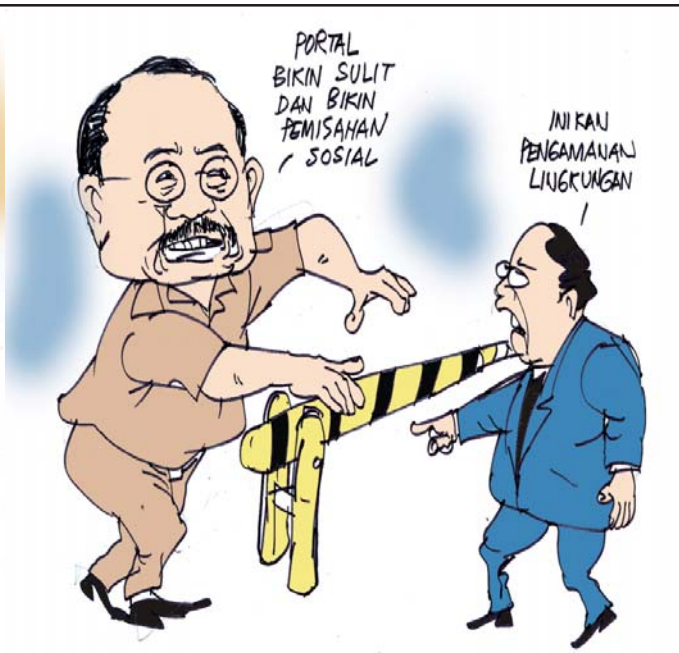

Perlu Pembenahan Segera

Pertumbuhan ekonomi Indonesia 2007 tidak mencapai target, jaminan kepastian hukum berinvestasi masih lemah, tingkat kemiskinan masih sangat tinggi, dan kesenjangan masyarakat makin lebar.

Sesuai penjelasan Menteri Keuangan Sri Mulyani, pertumbuhan ekonomi 2007 kemungkinan tidak mencapai target seperti yang ditetapkan pemerintah. Hal itu di antaranya disebabkan arus investasi yang juga tidak seperti diharapkan. Mandegnya arus investasi ini, jelas pengaruh kekurangpercayaan investor kepada Indonesia akibat beberapa faktor seperti kurangnya jaminan kepastian hukum. Baru-baru ini misalnya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memvonis Temasek melakukan monopoli di sektor industri telekomunikasi Indonesia. Muara dari semua masalah itu adalah tingkat kemiskinan yang tinggi, sekaligus kesenjangan masyarakat yang semakin lebar. Semua hal itu memerlukan pembenahan sesegera mungkin. Itulah beberapa topik yang jadi sorotan harian terbitan Ibu kota pertengahan sampai akhir November.

Harian *Kompas* (15/11), menyoroti pertumbuhan ekonomi 2007 yang kemungkinan tidak bisa sesuai target. Indikasi yang disampaikan Menteri Keuangan di depan DPD itu, menurut *Kompas* adalah akibat adanya kelemahan dalam implementasi berbagai kebijakan ekonomi. Hal mana juga tidak terlepas dari rendahnya tingkat penyerapan APBN serta rendahnya investasi swasta. Terhambatnya investasi, diakibatkan banyaknya kendala, mulai dari berbagai aturan yang tidak mendukung, ekonomi biaya tinggi, infrastruktur yang tidak memadai, hingga ketidakjelasan penegakan hukum. Kini masalahnya, tinggal penyelesaiannya karena persoalan sudah bisa diidentifikasi. Saran *Kompas*, untuk mencapai target, pemerintah harus lebih berani melakukan eksekusi. Pengakuan Menkeu itu seharusnya menyadarkan bangsa ini untuk mengubah cara kerja dari sekadar berwacana menjadi tindakan nyata.

Seakan menyambung pendapat *Kompas* di atas, harian *Suara Pembaruan* (21/11) juga menyoroti persoalan investasi berkaitan dengan vonis KPPU kepada Temasek. Menurut harian ini, keputusan KPPU yang mempersalahkan Temasek dalam kasus kepemilikan silang di Indosat dan Telkomsel adalah satu contoh lemahnya jaminan kepastian hukum berinvestasi di Tanah Air. Keputusan itu menebar kekhawatiran di kalangan investor. Sebab sebelumnya, ketika Temasek membeli saham Indosat, transaksi sepenuhnya didukung pemerintah dan disetujui DPR. Melihat persoalan yang melanda BUMN yang diprivatisasi pemerintah selama ini, korbannya adalah investor asing. Polanya juga sama yakni menyeruaknya dalil-dalil bernada nasionalisme. Padahal menurut harian ini, dalam pengelolaan entitas bisnis seharusnya konteks yang dikedepankan adalah asas manfaat, bukan asas kepemilikan. Sedangkan untuk mencegah munculnya persoalan di belakangan hari, seharusnya sejak awal pemerintah mampu menakar potensi kerawanan manakala hendak menjual saham BUMN, menguasai aturan-aturan mana saja yang masih ada celah penyimpangan, serta memiliki data akurat calon investor.

Sementara harian *Bisnis Indonesia* (16/11), menyoroti masih tingginya tingkat kemiskinan di Indonesia serta sikap politik Presiden mengenai hal tersebut. Seperti diketahui, pada peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-43 lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia masih sangat tinggi, yakni mencapai 37,1 juta jiwa. Karena itu, masih dibutuhkan anggaran yang besar membiayai subsidi dan pelayanan sosial bagi masyarakat miskin tersebut. Sikap politik Presiden itu menurut harian ini perlu didukung karena arahnya dapat dipandang sebagai komitmen kepedulian terhadap masyarakat miskin. Paling tidak, itu sudah tercermin dari upaya pemerintah menyediakan asuransi kesehatan bagi 74 juta penduduk miskin dan yang nyaris miskin. Kini masalahnya adalah bagaimana menjaga agar subsidi itu benar-benar tepat sasaran agar bisa dimanfaatkan warga miskin keluar dari kemiskinannya atau paling tidak bertahan sehingga tidak semakin terjerembab. Jadi, jika untuk mengatasi kemiskinan dan memacu pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas, yakni menghasilkan lapangan kerja, kebijakan subsidi itu perlu didukung.

Hal senada juga disampaikan harian *Investor Daily* (23/11). Disebutkan, sungguh ironis bila mencermati ketimpangan dan kesenjangan masyarakat negeri ini yang kian lebar. Di satu sisi, kelompok superkaya tumbuh sangat pesat, -berada di peringkat ketiga di Asia Pasifik-. Tapi sebaliknya, penduduk miskin juga semakin banyak. Menurut *Investor Daily*, pemburukan kesenjangan dan potensi bertambahnya penduduk miskin ini harus dihentikan. Pemerintah sebagai pemegang peran sentral harus mengupayakan agar pertumbuhan ekonomi lebih berkualitas dengan sasaran utama pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran. Investasi dan industrialisasi perlu digenjot sehingga mampu menyerap banyak tenaga kerja. Pemerintah jangan takut merealokasi anggaran dengan memangkas anggaran yang tidak mendesak untuk dialihkan ke program-program pengentasan kemiskinan. Intinya, pemerintah harus habis-habisan menekan laju kesenjangan, bahkan bila perlu menempuh kebijakan yang radikal sebelum keresahan sosial meledak jadi kerusuhan sosial. ■ **MS**

Menuju Kejayaan

Tahun Emas Deklarasi Djuanda 1957-2

Deklarasi Djuanda menekankan peran penting Indonesia sebagai kawasan paling dinamis dalam percaturan dunia, baik secara ekonomis maupun politis. Ekonomi kelautan seharusnya sudah menjadi tumpuan utama dalam pembangunan ekonomi nasional.

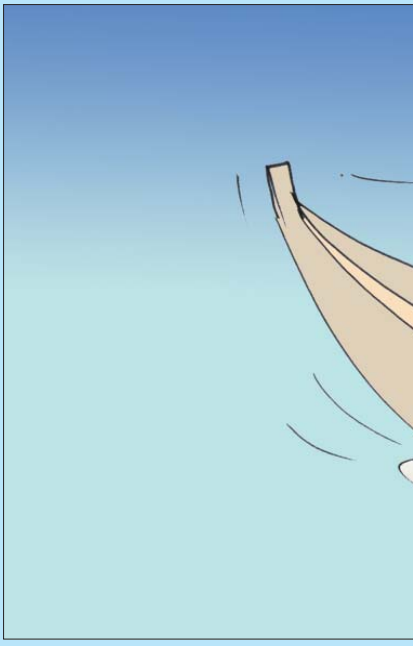

Sebagai negara kepulauan berbentuk cincin raksasa, Perdana Menteri Republik Indonesia Ir H Djuanda mencita-citakan Indonesia dari Sabang sampai Merauke bisa dikuasai secara berdaulat penuh tanpa menyisakan ruang intervensi pihak asing. Walau awalnya merupakan klaim sepihak yang dituangkan ke dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Prp) No. 4 tahun 1960, hingga memperoleh tentangan dari negara besar seperti Amerika Serikat dan Australia, Deklarasi Djuanda (13 Desember 1957) berhasil menempatkan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia.

Perjuangan Djuanda mempersatukan Indonesia tidak mudah terwujud. Dunia internasional mengakui maklumat Djuanda baru 25 tahun kemudian, tepatnya di tahun 1982 ketika badan dunia PBB dalam sidangnya menyepakati Konvensi Internasional tentang Hukum Laut (*United Nations Convention on The Law of The Sea* atau UNCLOS), yang lalu diratifikasi Indonesia. Di dunia internasional, Indonesia lalu dikenal sebagai negara pelopor hukum laut, yang menerapkan prinsip-prinsip negara kepulauan dalam mengelola negara.

Dengan Deklarasi Djuanda, Indonesia mempunyai wilayah laut seluas 5,8 juta kilometer persegi. Terbesar kedua di dunia, memiliki garis pantai 81.000 kilometer terpanjang di dunia, serta memiliki pulau 17.508 buah dengan segala kandungan kekayaannya yang sangat besar.

Posisi sebagai negara kepulauan terbesar kedua di dunia menempatkan Indonesia sebagai pemilik keanekaragaman hayati yang terbesar di dunia, ditambah letak geografisnya yang sangat strategis di antara dua benua (Asia dan Australia) dan dua samudera (Hindia dan Pasifik).

Membangun laut berarti membangun masa depan Indonesia yang mandiri, sejahtera, maju dan disegani. Membangun laut adalah keniscayaan karena 60 persen penduduk atau sebanyak 140 juta orang Indonesia bermukim di wilayah pesisir. Bahkan, 22 persen di antara mereka tinggal di desa pesisir dan pulau-pulau kecil. Membangun ekonomi kelautan harus menjadi arus utama di setiap kebijakan pembangunan. Laut jangan lagi diposisikan sebagai sektor pinggiran *(peripheral sector)*.

Seluruh anak bangsa yang memiliki jiwa negarawan dan bergiat membangun negerinya, harus sepakat bahwa momentum peringatan Deklarasi Djuanda dapat membulatkan tekad dan komitmen bersama

Roadmap Indonesia

- Tahun 1939, Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan ketentuan TZMKO (Territoriale Zee en Maritiem Kringen Ordonantie), yang menetapkan wilayah laut Indonesia hanya 3 mil dari garis batas pantai di setiap pulau.
- 13 Desember 1957, dicetuskan Deklarasi Djuanda oleh Perdana Menteri Ir H Djuanda, yang menetapkan wilayah laut Indonesia 30 mil dari garis batas pantai di setiap pulau, hingga menempatkan Indonesia sebagai Negara Kepulauan terbesar kedua di dunia.
- Tahun 1960, keluar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 4/1960 tentang Perairan Indonesia.
- Tahun 1961, keluar Undang-Undang No. 19/1961 tentang Persetujuan Atas Tiga Konvensi Jenewa Tahun 1958 mengenai Hukum Laut.
- Tahun 1982, PBB menyepakati Konvensi PBB Tentang Hukum Laut (UNCLOS).
- Tahun 1983, keluar Undang-Undang No. 5/1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
- 18 Desember 1996, Menristek BJ Habibie di Makassar membacakan pidato Presiden RI yang dikenal dengan konsepsi pembangunan Benua Maritim Indonesia.
- Tahun 1996, keluar Keppres No. 77/1996 tentang Dewan Kelautan Nasional.
- Tahun 1998, Presiden BJ Habibie mendeklarasikan visi pembangunan kelautan Indonesia dalam Deklarasi Bunaken.
- 26 Oktober 1999, Presiden KH Abdurrahman Wajid mendirikan Departemen Eksplorasi Laut, dipimpin untuk pertama kali oleh Sarwono Kusumaatmadja.
- 13 Desember 1999, Presiden KH Abdurrahman Wahid mencanangkan 13 Desember sebagai Hari Nusantara.
- Desember 1999, Departemen Eksplorasi Laut berubah nama menjadi Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan.
- Tahun 1999, keluar Keppres No.

n Bangsa Bahari

2007

ilustrasi: dendy

untuk membangun Indonesia yang berbasiskan pembangunan kelautan.

Dengan demikian seluruh elit politik bangsa, petinggi birokrasi hingga masyarakat umum harus memahami konsep Wawasan Nusantara. Setiap kebijakan pemerintah serta perilaku masyarakat dalam membangun bangsa harus sesuai dengan jati diri, geografi, geostrategi, dan geopolitik Indonesia sebagai negara kepulauan.

Hari Nusantara

Kebangkitan bangsa bahari Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1957 dengan dideklarasikannya Wawasan Nusantara yang dikenal pula dengan "Deklarasi Djoeanda".

Pada 18 Desember 1996 di Makassar, Sulawesi Selatan, BJ Habibie sebagai Menristek membacakan pidato Presiden RI yang dikenal dengan pembangunan "Benua Maritim Indonesia".

Selanjutnya pada tahun 1998 Presiden BJ Habibie mendeklarasikan visi pembangunan kelautan Indonesia dalam "Deklarasi Bunaken". Inti dari deklarasi tersebut adalah laut merupakan peluang, tantangan dan harapan untuk masa depan persatuan, kesatuan dan pembangunan bangsa Indonesia.

Selanjutnya, sejak tahun 1999 Presiden Abdurrahman Wahid menyatakan komitmennya terhadap pembangunan kelautan. Komitmen pembangunan pemerintah di bidang kelautan, diwujudkan dengan dibentuknya Departemen Eksplorasi Laut pada tanggal 26 Oktober 1999 dan menempatkan nama Sarwono

a Negara Kepulauan

161/1999 tentang Dewan Maritim Indonesia.

- Tahun 2001 awal, Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan berubah nama menjadi Departemen Kelautan dan Perikanan.
- 11 Desember 2001, Presiden Megawati Soekarnoputri mengeluarkan Keppres No. 126/2001, yang menetapkan 13 Desember sebagai Hari Nusantara dan meresmikannya sebagai perayaan nasional.
- Tahun 2004, keluar Undang-Undang No. 31/2004 tentang Perikanan.
- Tahun 2006, keluar Undang-Undang No. 16/2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan.
- Tahun 2006, Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi mengeluarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 17/2006, sebuah deregulasi yang meningkatkan iklim usaha dan investasi di bidang kelautan dan perikanan yang lebih berpihak kepada industri dalam negeri.
- 5 Februari 2007, keluar Undang-Undang No. 17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, yang memuat misi Indonesia sebagai Negara Kepulauan yang Maju, Mandiri, Adil dan Makmur.
- 21 September 2007, keluar Keppres No. 21/2007 tentang Dewan Kelautan Indonesia.
- 4 Oktober 2007, diresmikan pembentukan Peradilan Perikanan.
- Tahun 2007, keluar Undang-Undang No. 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- 26 Oktober 2007, Indonesia memperingati Sewindu Departemen Kelautan dan Perikanan, berlangsung di STP Jakarta dengan mengambil tema, "Sewindu DKP Bersama Anak Bangsa Membangun Negeri".
- 13 Desember 2007, Indonesia memperingati Hari Nusantara 2007 dan Tahun Emas Deklarasi Djuanda.

foto: berindo ht

Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi selaku Ketua Harian Dewan Kelautan Indonesia (Dekin).

Kusumaatmadja sebagai nakhoda pertama.

Keputusan bersejarah dan monumental dari Gus Dur terus berproses menuju kesempurnaan. Pada bulan Desember tahun itu juga nama departemen ini berubah men-jadi Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan, dan sejak awal tahun 2001 berubah lagi menjadi Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) hingga sekarang.

Demi menggemakan semangat pembangunan nasional yang berbasiskan kelautan, Presiden KH Abdurrahman Wahid lantas mencanangkan 13 Desember sebagai Hari Nusantara dan memperingatinya untuk pertama kali di Istana Negara, Jakarta tahun 1999.

Visi pembangunan kelautan Gus Dur kemudian diteruskan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri, dengan menetapkan 13 Desember sebagai Hari Nusantara berdasarkan Keppres No. 126 Tahun 2001 tentang Hari Nusantara, dan menjadikan tanggal tersebut sebagai hari resmi perayaan nasional.

Guna mencapai visi membangun Indonesia yang berbasiskan pembangunan kelautan, dibentuklah Dewan Kelautan Indonesia (Dekin) berdasarkan Keppres No. 21/ 2007 tentang Dewan Kelautan Indonesia, terbit 21 September 2007. Pembentukan Dekin merupakan penyempurnaan lembaga lama Dewan Maritim Indonesia (DMI), yang dibentuk berdasarkan Keppres No. 161 Tahun 1999 tentang Dewan Maritim Indonesia. Dekin yang dipimpin langsung oleh Presiden RI, dengan Ketua Harian Menteri Kelautan dan Perikanan *ex officio*, merupakan forum konsultasi bagi penetapan kebijakan umum di bidang kelautan.

Dekin beranggotakan Presiden, 12 Kementerian, Kepala Polri, KSAL, Tim Pakar, Wakil Perguruan Tinggi, Wakil Asosiasi Dunia Usaha, dan Wakil Lembaga Swadaya Masyarakat. Dekin sehari-hari dikendalikan secara *ex officio* oleh Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Ekologi dan Sumber daya Laut, kali ini dipimpin oleh Prof. Dr. Ir. Rizald Max Rompas, M.Agr.

Sejalan dengan konsepsi NKRI sebagai Negara Kepulauan, beberapa daerah memiliki banyak pulau telah mendeklarasikan diri sebagai Provinsi Kepulauan. Provinsi yang telah menetapkan diri sebagai Provinsi Kepulauan adalah Provinsi Kepulauan Riau, Kepulauan Maluku, Kepulauan Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara dan Bangka Belitung.

Belum Maksimal

Dewan Kelautan Indonesia (Dekin) ketika masih bernama Dewan Maritim Indonesia (DMI), melalui majalah internal *Maritim Indonesia* edisi Juli 2007 menyebutkan, laut Indonesia menyimpan potensi kekayaan yang dapat dieksploitasi senilai 156.578.651. 400 dollar AS per tahun. Jika dirupiahkan dengan kurs Rp 9.300 per 1 dollar AS, angka itu setara dengan Rp 1.456 triliun.

Potensi laut Indonesia tersebut, antara lain berasal dari sektor perikanan senilai 31.939.651.400 dollar AS, dari wilayah pesisir 56 miliar dollar AS, dari sektor bioteknologi 40 miliar dollar AS, dari sektor wisata bahari 2 miliar dollar AS, dari sektor minyak bumi lepas pantai 643 juta dollar AS, dan dari sektor transportasi laut 20 miliar dollar AS.

Jika dianalogikan secara sederhana, jumlah potensi laut yang Rp 1.456 triliun lebih itu hampir dua kali lipat APBN tahunan Indonesia. Hal itu berarti, dengan mengeksploitasi potensi laut saja Indonesia sanggup menjalankan roda pemerintahan dengan kemampuan anggaran yang dua kali lipat kekuatannya.

Apabila versi Dekin terlalu optimistik, Bappenas, sebuah lembaga perencana pembangunan nasional setingkat kementerian, mempunyai angka yang lebih moderat menghitung potensi lestari laut Indonesia yakni sebesar 82 miliar dollar AS. Angka yang juga dianut oleh Rokhmin Dahuri, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu setara dengan Rp 762.6 triliun atau hampir mendekati nilai APBN-P 2007.

Walaupun demikian, kontribusi sektor kelautan terhadap PDB nasional dinilai masih rendah. Pada tahun 1998 sektor kelautan hanya menyumbang 20,06 persen ter-hadap PDB, itupun sebagian besarnya atau 49,78 persen disumbangkan oleh subsektor pertambangan minyak dan gas bumi di laut. Ini menunjukkan bahwa kekayaan laut Indonesia yang sangat besar itu masih disia-siakan potensinya. Berbeda dengan negara kepulauan lain seperti RRC, AS, dan Norwegia, yang sudah memanfaatkan laut sedemikian rupa hingga memberikan kontribusi di atas 30 persen terhadap PDRB nasional mereka.

Indonesia seharusnya tidak terlena dengan hanya bangga memiliki kekayaan laut yang melimpah namun tidak mengelolanya dengan maksimal demi kemakmuran bangsa. Yang pertama memulai perubahan tentu para insan kelautan dan perikanan sendiri, terutama mereka yang kini tergabung dalam Departemen Kelautan Perikanan Republik Indonesia. Namun sayangnya, DKP hanya dimodali anggaran selama tahun 2007 sebesar Rp 3,31 triliun ditambah ABT Rp 50 miliar untuk membangun 144 juta masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir, dan memanfaatkan kekayaan laut yang melimpah.

Anggaran DKP tahun depan diperkirakan masih berkutat di jumlah yang tidak jauh berbeda. Sebagaimana disebutkan Kepala Pusat Statistik, Data, dan Informasi (Pusdatin) DKP Saut P. Hutagalung, anggaran DKP untuk tahun 2008 mendatang disepakati hanya Rp 3,35 triliun. Besaran anggaran DKP dua tahun terakhir masih kalah besar dengan pagu anggaran Departemen Diknas yang tidak terserap selama tahun 2007, yang disebutkan Prof. Dr Anwar Arifin, Wakil Ketua Komisi X DPR mencapai Rp 4 triliun, dari seluruh anggaran Depdiknas tahun 2007 yang mencapai Rp 44,9 triliun.

Hal lain yang sangat disayangkan, sangat jarang kita dengar satu atau dua pejabat DKP yang sesekali mau berbicara memperjuangkan kenaikan anggaran lembaga-nya. Mungkin mereka sudah terlena dengan anggaran yang bersifat *nonbudgeter*, sebagaimana pernah terjadi sebelumnya.

DKP memang belum sepenuhnya tampil sebagai regulator yang disegani. Bahkan, atas nama mengejar target PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak), DKP malah berperan sebagai operator. Di sejumlah pelabuhan perikanan, misalnya, aparat DKP lebih suka bertindak sebagai pemungut uang pas masuk pelabuhan hingga uang parkir dan berbagai retribusi lain, daripada menyusun regulasi yang kondusif dan menentukan insentif bagi industri kelautan dan perikanan. Tak mengherankan apabila beberapa badan usaha milik negara (BUMN) bentukan dan yang berafiliasi dengan DKP, kiprahnya tak sementereng BUMN departemen teknis lain sebagai sokoguru perekonomian nasional. ■ **MS-HT**

foto: berindo wilson

Kapal asing masih menguasai angkutan laut asing dan domestik.

Industri Kelautan Dinomorduakan

Industri Pelayaran, Industri Perikanan, dan Pariwisata Bahari berpeluang besar untuk dikembangkan sebagai sokoguru ekonomi kelautan di masa-masa mendatang.

Industri pelayaran merupakan tulang punggung (*backbone)* sebuah negara kepulauan terbesar. Harus diakui kondisi industri pelayaran nasional masih terpuruk. Kontribusinya terhadap PDB masih 1,49 persen. Kapal-kapal berbendera asing masih menguasai 96,6 persen muatan angkutan laut asing, dan menguasai 46,8 persen muatan angkutan laut dalam negeri.

Indonesia setiap tahun "harus" membayar jasa kepada kapal-kapal asing itu setidaknya Rp 100 triliun. Akibatnya terjadi defisit transaksi berjalan, membayar jasa kepada kapal luar negeri lebih besar daripada mendapatkan penerimaan dari komoditi yang diekspor.

Industri galangan kapal Indonesia juga masih belum berkembang sedemikian rupa. Padahal peranan industri galangan kapal sangat besar karena mempunyai rantai hulu-hilir yang panjang. Identifikasi akar masalah industri perkapalan, menunjukkan, pajak kapal terlalu besar dibandingkan negara tetangga terdekat seperti Singapura dan Malaysia.

Dukungan perbankan terhadap pengembangan industri perkapalan pun masih sangat rendah. Misalnya, dikenakan suku bunga tinggi terhadap kredit investasi dan kredit modal kerja. Di tataran kebijakan pun sama saja, belum mampu mendorong industri galangan kapal berikut industri penunjangnya. Sektor lain terasa tak memberikan dukungan, padahal industri perkapalan merupakan bagian integral dari keseluruhan industri maritim.

Persoalan yang sama terjadi pada sistem pelabuhan di Indonesia, hanya berperan sebagai cabang atau ranting dari Singapura atau lainnya. Sistem pelabuhan Indonesia masih tidak efisien, tidak aman, dan tidak produktif. Daya saing sumber daya manusia pelayarannya pun relatif rendah, baik itu pelaut maupun di industri pelayaran.

Persoalan yang dihadapi sistem pelabuhan Indonesia, antara lain, baru kurang dari separuh pelabuhan di Indonesia yang sudah memperoleh sertifikat International Ship and Port Facilities Security (ISPS), *port day*s kapal-kapal nasional masih terlalu tinggi, terdapat kegiatan yang tidak ada pelayanan tetapi dikenakan biaya, dan belum ada pemisahan yang jelas antara fungsi pemerintah (regulator) dan fungsi pengusahaan (operator). Juga belum terjadi kompetisi antarterminal dan antarpelabuhan, lemahnya pengawasan, penegakan hukum belum efektif, dan belum tersedia terminal khusus karena rendahnya arus barang.

Industri Perikanan

Potensi industri perikanan Indonesia sesungguhnya sangat besar, yang sepatutnya menempatkan bangsa ini sebagai kampiun perikanan di Asia. Tetapi kontribusinya terhadap PDB hanya berkisar 2 persen hingga 3 persen saja. Yang bikin miris, seolah selamanya nelayan merupakan kelompok masyarakat termiskin.

Armada kapal ikan bermotor yang dapat mencapai Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) sangat terbatas. Pertambahan jumlah kapal ikan dalam negeri sangat tak berarti dibanding serbuan ribuan kapal asing yang diduga melakukan *illegal fishing* di perairan dan yurisdiksi Indonesia.

Pertambahan kawasan budidaya perikanan pun sangat kurang dan tidak signifikan. Demikian pula kawasan-kawasan industri pengolahan ikan belum banyak terbangun. Bahkan, lebih dari separuh sarana dan prasarana pelabuhan perikanan tidak difungsikan.

Identifikasi akar masalah pengembangan industri perikanan, antara lain, pajak kapal yang dirasakan terlalu besar dan belum memadainya insentif dan kredit untuk kapal perikanan, sebagaimana di negara lain.

Program APBN/APBD juga masih terlalu berorientasi pa-

da proyek Economic Overhead Capital (EOC) dan Social Overhead Capital (SOC), belum mengarah kepada Directly Productive Activity (DPA) seperti *seed* untuk investasi kapal, tambak, dan pengolahan.

Di sisi lain, belum ada kebijakan yang mengatur sistem prosedur kapitalisasi aset dan dana. Karena itu, perlu diintegrasikan *value engineering* untuk mengubah lahan pesisir murah menjadi kawasan budidaya perikanan yang produktif dengan *financial engineering* melalui kebijakan fiskal, penjaminan kredit, dan bagi hasil yang adil antara pengelola, karyawan, masyarakat dan pemerintah daerah.

Pariwisata

Pengembangan pariwisata bahari memiliki kelebihan, diyakini dapat mempunyai efek berganda *(mutiplier effect)* yang dapat menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, mendatangkan devisa bagi negara, dan dapat mendorong konservasi lingkungan.

Pengembangan pariwisata bahari juga berdampak positif pada tumbuhnya jiwa dan budaya bahari, dan mendorong terwujudnya negara maritim yang tangguh. Sayangnya, pariwisata bahari nasional belum berkembang. Kontribusinya terhadap PDB masih sangat kecil. Kalender wisata bahari belum tersusun. Industri hulu-hilir pariwisata kelautan termasuk multimoda transportasi dan jasa hospitality belum berkembang.

Identifikasi akar masalah pengembangan pariwisata bahari nasional antara lain prosedur untuk mendapatkan izin masuk CAIT *(Clearance Approval for Indonesian Territory)* sangat mempersulit wisatawan bahari mancanegara, sehingga banyak *cruiser/yacht* enggan untuk berkunjung ke objek-objek wisata bahari Indonesia.

Pengurusan CIQP masih perlu diperbaiki, utamanya mengenai VoA *(Visa on Arrival)* maupun visa bisnis yang dinilai masih kurang lama dan tidak konsisten dengan durasi CAIT. Sebab para *yachter* mancanegara menginginkan waktu lebih dari 60 hari agar mereka dapat mengunjungi banyak objek wisata di wilayah Nusantara.

Kontribusi sektor kelautan terhadap PDB nasional masih rendah.

Persepsi keamanan nasional dan pengelolaan kesehatan lingkungan juga masih buruk. Kesadaran masyarakat mengelola sumber daya kelautan masih rendah, ditambah dengan beban kemiskinan yang menyebabkan tingkat kerusakan terumbu karang menjadi besar akibat pemboman dan penggunaan racun ikan.

Dari semua identifikasi akar permasalahan dalam pengembangan industri pelayaran, industri perikanan, dan pariwisata bahari, untuk membangun ekonomi kelautan dibutuhkan keberpihakan pemerintah, keterpaduan kebijakan lintas sektoral, dan kerjasama antara pemerintah-swasta.

Semuanya memang masih sulit terwujud, antara lain karena belum tersedia *grand strategy* yang didukung kebijakan antarlembaga pemerintah dan pemda, belum tersedia sistem insentif bagi para pelaku, dan belum ada lembaga khusus yang diberi kewenangan untuk mengoordinasikan antar pelaku.

Kondisi Tahun 2020

Sebagai sokoguru ekonomi kelautan di masa mendatang, industri pelayaran, industri perikanan, dan pariwisata bahari akan menampakkan wajahnya yang sesungguhnya di tahun 2020.

Diharapkan, tahun 2020 pada industri pelayaran sudah terbangun armada pelayaran nasional yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan di dalam negeri dan berdaya saing internasional, sehingga dapat berperan *fair share*, yaitu 40 persen kegiatan ekspor-impor.

Pelayaran rakyat mendapatkan peranan penting dalam pelayaran Nusantara, khususnya dalam sistem distribusi logistik nasional dan angkutan penduduk antarpulau. Juga terbangun sekurang-kurangnya tiga pelabuhan hub-internasional yaitu di Sabang, Batam, dan Bitung yang didukung oleh sub-sub sistem pelabuhan di dalam tatanan pelabuhan nasional yang berdaya saing.

Juga terbangun dua kawasan industri galangan kapal utama nasional, yaitu di Batam-Bintan-Karimun, dan di Bitung. Terbangun pula enam Sekolah Tinggi Pelayaran yang merupakan *center of execellences* berstandar internasional yaitu di Banda Aceh, Batam, Jakarta, Semarang, Makassar, Bitung, dan Ambon yang terpadu dengan sistem SMK pelayaran berstandar internasional di kota-kota pesisir.

Kondisi industri perikanan nasional yang diharapkan di tahun 2020 adalah meningkatnya kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir.

Terbangun kapal ikan baru sebanyak 5.000 unit dengan ukuran masing-masing 70 GT, dan armada semut sebanyak 25.000 unit dengan ukuran masing-masing 5 GT tersebar di pesisir atau perairan barat Sumatera, Selat Karimata, selatan Jawa, Nusa Tenggara, Teluk Tomini, Maluku Utara, Maluku, dan Papua.

Terbangun pula kawasan industri *(cluster)* pengolahan ikan terpadu dengan pusat-pusat distribusi dan pemasaran pada kawasan-kawasan di pesisir/perairan barat Sumatera, Selat Karimata, selatan Jawa, Nusa Tenggara, Teluk Tomini, dan Maluku Utara, Maluku dan Papua, pesisir timur Sumatera, utara Jawa, Papua Selatan, dan Selat Makassar.

Kondisi pariwisata bahari nasional yang diharapkan di tahun 2020, adalah, terbangunnya daya saing kawasan pariwisata bahari andalan yang telah ada di pulau Nias, Mentawai, Batam, Bintan, Kepulauan Seribu, Krakatau, Pelabuhan Ratu, Pangandaran, Parang Tritis, Bali, Lombok, Komodo, Moyo, Derawan, Wakatbo, Togean, Bunaken, Banda, dan Raja Ampat.

Juga terbangun sarana dan prasarana kawasan pariwisata bahari baru di Pulau We, Pulau Banyak, Pulau Enggano, Pulau Rupat, Bangka Belitung, Karimata, Anambas, Natuna, Cilacap, Roti, Kupang, Lembata, Alor, Siparamanita, Banggai, Sangihe Talaud, Ternate, Biak, dan Mpia.

Pembangunan ekonomi kelautan perlu dipercepat dengan membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pembangunan Ekonomi Kelautan. Tugas Pokja adalah menyiapkan *grand strategy* percepatan pembangunan ekonomi pelayaran, perikanan, dan pariwisata kelautan.

Pokja juga membahas kebijakan pemerintah dan dunia usaha dalam kewenangan masing-masing instansi. Lalu, Pokja melaksanakan dan mengusahakan reformasi terutama pada sektor fiskal, perbankan, dan sistem regulasi/birokrasi untuk mendukung percepatan pembangunan ekonomi kelautan.

Selain itu, menyiapkan dan mengusulkan RUU Kapitalisasi Aset atas Pengelolaan Kekayaan yang dimiliki negara, serta, mengupayakan pembentukan lembaga koordinasi khusus yang berwenang dalam perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian.

Dengan demikian peluang Industri Pelayaran, Industri Perikanan, dan Pariwisata Bahari sebagai sokoguru ekonomi kelautan dapat terwujud secara nyata di masa-masa mendatang. ■ **HT**

Potensi Kelautan
Kekayaan Yang Harus Digali

Indonesia memiliki banyak potensi kelautan

Keberhasilan pembangunan sektor kelautan diharapkan dapat menopang pembangunan nasional di masa depan.

Indonesia adalah negara maritim dan kepulauan (*archipelagic state*) terbesar di dunia, dengan luas laut 5,8 juta km persegi dan jumlah pulau sekitar 17.508 pulau yang dikelilingi oleh garis pantai sepanjang 81.290 km. Selain itu, Indonesia juga berada di jalur strategis, yakni pada jalur pelayaran Internasional baik melalui Selat Malaka maupun melalui jalur Laut Kepulauan Indonesia.

Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki banyak potensi kelautan. Widi A. Pratikto, semasa menjabat Dirjen Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan mengatakan, potensi sumber dayanya yang terbaharui terdiri dari sumber daya perikanan tangkap, perikanan budidaya, dan bioteknologi kelautan. Perairan Indonesia diperkirakan memiliki potensi lestari ikan laut sebesar 6,4 juta ton per tahun. Selain itu potensi perikanan budi daya di Indonesia juga cukup besar.

Berdasarkan hitungan, sekitar 5 km dari garis pantai ke arah laut, potensi lahan kegiatan budi daya laut diperkirakan sekitar 24,53 juta hektar yang terbentang dari ujung bagian barat Indonesia sampai ke ujung wilayah timur Indonesia. Produksi perikanan budi daya Indonesia sampai tahun 2005 mencapai 1.295.300 ton. Meski demikian, jumlah ini jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan negara-negara produsen perikanan lainnya seperti China, India, Jepang dan Filipina. Pada tahun 2005 saja produksi perikanan budidaya China sudah mencapai sekitar 32.444.000 ton.

Sementara itu dari sisi potensi lahan, total lahan budi daya di kawasan pesisir (budidaya udang/tambak) mencapai 913.000 hektar yang tersebar di 28 propinsi. Namun demikian, pemanfaatan lahan budi daya untuk tambak baru mencapai sekitar 40 persen atau 344.759 hektar. Sebagai ilustrasi, dengan produktivitas tambak sebesar 3 ton/ha maka apabila seluruh potensi lahan dimanfaatkan maka produksi yang bisa dihasilkan dari budi daya di kawasan pesisir mencapai 2,739,000 ton per musim tanam atau kurang lebih 5,478,000 ton per tahun.

Selain lahan budi daya untuk kepentingan tambak, potensi budi daya kelautan (marikultur) menjadi salah satu andalan bagi pembangunan kelautan dan perikanan di Indonesia. Menurut data Departemen Kelautan dan Perikanan (2004), dengan potensi garis pantai sepanjang 81.000 km dan ekosistem perairan laut semi tertutup (*semi-closed waters*) yang cukup banyak, maka peluang pengembangan budi daya kelautan (marikultur) masih terbuka lebar. Data DKP menyebutkan bahwa luas potensial perairan laut untuk budidaya adalah bisa mencapai 24 juta hektar. Dengan produktivitas 2 ton per ha per tahun, maka produksi potensial budidaya laut mencapai 48 juta ton per tahun. Jumlah ini tentu saja lebih besar dari China yang hanya memproduksi sebesar 32 juta ton pada tahun 2005.

Selain itu, bioteknologi kelautan dapat memberikan kontribusi ekonomi yang besar bagi penyediaan bahan baku industri farmasi dan kosmetik. Selain itu, lebih dari 35.000 spesies biota laut memiliki potensi sebagai penghasil bahan

obat-obatan, tapi yang dimanfaatkan baru 5.000 spesies.

Indonesia sebagai negara maritim terbesar, memiliki kandungan minyak dan gas bumi yang cukup besar. Berdasarkan data geologi, diketahui bahwa Indonesia memiliki 60 cekungan potensi kandungan minyak dan gas bumi dimana 40 cekungan terdapat di lepas pantai, 14 cekungan berada di daerah transisi daratan dan lautan (pesisir) dan hanya 6 cekungan yang berada di daratan.

Dari ke-60 cekungan diperkirakan dapat dihasilkan 84,48 milyar barel minyak, namun baru 9,8 milyar barel saja yang sudah diketahui dengan pasti. Sedangkan sisanya 74,68 milyar barel masih berupa kekayaan yang belum dimanfaatkan.

Cadangan minyak dan gas bumi Indonesia cukup besar itu tersebar pada lokasi yang cukup jauh dari pusat konsumen dan jaringan pipa gas. Pertamina, Chevron Indonesia, dan ExxonMobil Oil Indonesia Inc sangat diharapkan menjadi tumpuan peningkatan produksi migas nasional hingga 30% dalam tiga tahun ke depan.

Di masa yang akan datang energi yang bersumber dari BBM (bahan bakar minyak) semakin menipis. Oleh sebab itu, energi Kelautan yang merupakan energi non-konvensional dan termasuk sumber daya kelautan nonhayati yang dapat diperbarui memiliki potensi untuk dikembangkan di kawasan pesisir dan lautan Indonesia.

Jenis energi kelautan yang berpeluang dikembangkan adalah *ocean thermal energy conversion* (OTEC). Perairan Indonesia merupaan suatu wilayah perairan yang sangat ideal untuk mengembangkan sumber energi OTEC. Sumber energi kelautan lainnya seperti energi yang berasal dari perbedaan pasang surut, dan energi yang berasal dari gelombang juga memiliki potensi yang baik untuk dikembangkan di Indonesia. Kajian terhadap sumber energi ini sudah dilakukan oleh BPPT bekerjasama dengan Norwegia di Pantai Baron, di Yogyakarta. Hasil dari kegiatan ini merupakan masukan yang penting dan pengalaman yang berguna dalam upaya Indonesia mempersiapkan sumberdaya manusia dalam memanfaatkan energi non konvensional.

Sementara itu, potensi pengembangan sumber energi pasang surut di Indonesia paling tidak terdapat di dua lokasi, yaitu Bagan Siapi-Api dan Merauke, karena di kedua lokasi ini kisaran pasang surutnya mencapai 6 meter.

Sumber daya kelautan yang dimiliki Indonesia juga mencakup potensi pengembangan pariwisata dan pelayaran. Dewasa ini pariwisata berbasis kelautan atau disebut juga wisata bahari telah menjadi salah satu produk pariwisata yang menarik dunia internasional.

Kehidupan nelayan di Indonesia masih dalam taraf kemiskinan. foto: berindo wilson

Selain itu ada satu potensi lagi yang sering luput dari perhatian, yakni harta karun di dasar laut yang berasal dari kapal-kapal kuno yang karam.

Meski demikian terasa sangat ironis, dengan potensi yang demikian besar, nelayan yang mendiami pesisir lebih dari 22 persen dari seluruh penduduk Indonesia justru berada di bawah kemiskinan dan selama ini justru terpinggirkan dalam pembangunan yang lebih mengarah kepada daratan.

Keadaan itu menurut pengamat kelautan Indrawadi, S.Pi, karena selama ini usaha kecil di bidang perikanan seperti menangkap ikan di laut dianggap usaha yang tidak layak diberi kredit, sehingga tidak ada lembaga keuangan dan perbankan yang percaya kepada nelayan.

Padahal krisis ekonomi dan depresi rupiah terhadap dollar yang berdampak terhadap merosotnya kontribusi ekonomi terhadap sektor lain, namun di sektor perikanan justru menunjukkan sebaliknya. Data terakhir menunjukkan bahwa ekspor komoditas hasil laut pada tahun 1997 mencapai 1.617,5 juta dollar AS. Artinya pada masa krisis, sektor perikanan justru menjadi tumpuan. Ini menunjukkan bahwa perikanan merupakan sektor yang "tahan banting" dan mampu menghadapi krisis. Kendati demikian potensi perikanan dan kelautan yang sedemikian besar semestinya dapat berkinerja lebih baik dan memberikan kontribusi yang lebih signifikan lagi.

Bila dibandingkan dengan Thailand, hasil yang dicapai Indonesia jauh lebih kecil. Rata-rata nilai ekspor perikanan Thailand mencapai 5,6 miliar dollar AS. Norwegia yang memiliki luas laut yang jauh lebih kecil di banding Indonesia bisa meraup nilai ekspor 2 miliar dollar AS per tahunnya.

Yang lebih ironis lagi, kesejahteraan nelayan justru sangat minim dan identik dengan kemiskinan. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 1998, penduduk miskin 49 juta jiwa dan 60% di antaranya adalah masyarakat yang hidup di kawasan pesisir.

Di sisi lain pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumberdaya kelautan dan pesisir selalu beriringan dengan kerusakan lingkungan dan habitat seperti terumbu karang dan hutan mangrove, dan hampir semua eksosistim pesisir Indonesia terancam kelestariannya.

Di sisi lain, potensi jasa lingkungan kelautan lainnya yang masih memerlukan sentuhan pendayagunaan secara profesional agar potensi ini dapat dimanfaatkan secara optimal adalah jasa transportasi laut (perhubungan laut).

Selain itu, sebagai negara bahari ternyata pangsa pasar angkutan laut baik antarpulau maupun antarnegara masih dikuasai oleh armada niaga berbendera asing. Padahal, berdasarkan data yang

ada, hampir 80 persen proses perpindahan barang dan jasa antarpulau menggunakan jasa perhubungan laut. Transportasi laut berperan penting dalam dunia perdagangan internasional maupun domestik. Transportasi laut juga membuka akses dan menghubungkan wilayah pulau, baik daerah yang sudah maju maupun yang masih terisolasi.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia memang amat membutuhkan transportasi laut, namun, Indonesia ternyata belum memiliki armada kapal yang memadai dari segi jumlah maupun kapasitasnya. Data tahun 2001 menunjukkan, kapasitas *share* armada nasional terhadap angkutan luar negeri yang mencapai 345 juta ton hanya mencapai 5,6 persen.

Adapun *share* armada nasional terhadap angkutan dalam negeri yang mencapai 170 juta ton hanya mencapai 56,4 persen.

Kondisi semacam ini tentu sangat mengkhawatirkan terutama dalam menghadapi era perdagangan bebas. Selain diperlukan suatu kebijakan yang kondusif untuk industri pelayaran, peningkatan kualitas SDM yang menangani transportasi juga diperlukan.

Menumbuhkan Paradigma Baru

Sumber daya kelautan amat potensial dimanfaatkan sebagai sumber daya yang efektif dan modal dasar dalam pembangunan bangsa Indonesia dan menyejahterakan penduduknya. Sayangnya, Indonesia belum mengelola dan mempergunakannya sebagai dasar pola pikir maupun pembangunan ekonomi.

Upaya pemerintah dalam pengelolaan potensi kelautan salah satunya dilakukan oleh Departemen Kelautan dan Perikanan, dengan menawarkan kepada investor untuk berinvestasi di 37 pulau kecil potensial yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Sejauh ini beberapa calon investor asing sudah ada yang menyatakan berminat untuk memanfaatkan pulau-pulau tersebut.

Negara yang berminat untuk berinvestasi di 37 pulau tersebut antara lain Jepang, Jerman, Australia, Singapura, dan Taiwan. Calon investor dari Jepang ingin memanfaatkan pulau sebagai tempat khusus bagi orang jompo yang ingin beristirahat, sedangkan calon investor dari Jerman ingin menjadikan pulau kecil untuk tempat berlayar. Pulau-pulau tersebut dianggap memiliki potensi untuk dikembangkan dari berbagai sisi, seperti konservasi, pengembangan budidaya, pariwisata, pertanian dan peternakan, industri UKM bagi masyarakat sekitar, budidaya laut, dan *e-business*.

Pengamat kelautan Arif Lukman Hakim memandang keputusan pemerintah untuk mengoptimalkan potensi pulau-pulau kecil itu merupakan hal yang wajar. Namun perlu digarisbawahi, keputusan tersebut harus mempertimbangkan semua aspek, baik aspek politik, sosial, budaya, dan keamanan. Tak semata-mata mempertimbangkan aspek ekonomi saja. Masyarakat dituntut untuk lebih aktif dan kritis agar dalam penyusunan rencana tersebut, dan pemerintah setempat lebih bijaksana dengan mempertimbangkan betul berbagai aspirasi yang berkembang di masyarakat. Sehingga keputusan yang diambil betul-betul membawa manfaat bagi orang banyak.

Indonesia memiliki banyak potensi kelautan

Di sisi lain, bisa dianggap keinginan untuk menawarkan sejumlah pulau tersebut kepada pihak asing membuktikan bahwa selama ini pemerintah masih belum memiliki paradigma dan konsep yang jelas dalam pembangunan sektor kelautan. Padahal, Indonesia merupakan negara yang sebagian besar wilayahnya terdiri atas 25 persen teritorial daratan dan teritorial laut seluas 75 persen. Luas wilayah daratan ini sama dengan 57 kali luas negara Belanda, 5 kali luas Jepang, dan 2 kali luas Pakistan. Belum lagi jumlah pulau besar dan kecilnya yang lebih dari 17.000. Potensi besar ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan teritorial laut terluas di dunia.

Sebenarnya, yang mendesak untuk segera dilakukan terkait dengan pengelolaan potensi laut Indonesia adalah melakukan reorientasi paradigma pembangunan yang selama ini dititikberatkan pada pembangunan wilayah kontinental dan cenderung mengabaikan peran besar potensi laut Indonesia.

Sebenarnya laut adalah masa depan Indonesia. Reorientasi terhadap paradigma ini diharapkan bisa dijadikan sebagai titik awal kebangkitan usaha dan industri yang berbasis kelautan di Indonesia.

Kekeliruan paradigma pembangunan tersebut pada akhirnya menimbulkan banyaknya kegagalan pembangunan sektor kelautan, di antaranya belum pernah tercapainya swasembada ikan di negara ini.

Menurut Arif, beberapa potensi laut yang bisa dieksploitasi dan dikembangkan saat ini adalah pertama, eksplorasi (pengangkatan) harta karun bawah laut. Kedua, optimalisasi perikanan, khususnya usaha perikanan laut. Sampai tahun 2002, Indonesia masih mengalami defisit ikan. Penyebab dari tidak optimalnya pembangunan perikanan ini adalah tidak seimbangnya daerah operasional penangkapan ikan dan kapasitas sumber dayanya. Ketiga, pengembangan wilayah pesisir, pantai, dan pulau-pulau kecil, yang selama ini masih belum digarap dengan serius.

Keempat, pengembangan industri wisata bahari. Program wisata bahari ini diarahkan kepada pengembangan kawasan wisata pesisir dan pantai serta taman laut Nusantara.

Yang perlu mendapatkan perhatian serius karena nilai ekonominya yang sangat tinggi adalah pengelolaan terhadap taman laut yang kaya akan terumbu karang. Diperkirakan sedikitnya 950 jenis terumbu karang terdapat di perairan Indonesia dengan potensi luas mencapai 60.000 km2 dan membentang sepanjang 17.500 km. Sebagian di antaranya sudah ditetapkan menjadi taman laut nasional. ■ **RH**

Jangan Biarkan Diku

Selama ini hanya 30 persen saja alokasi sumber daya yang disediakan untuk membangun dan mengembangkan sektor kelautan. Selebihnya berpusat pada pembangunan darat.

Diperkirakan, sedikitnya 950 jenis terumbu karang ada di perairan Indonesia.

Tanpa bermaksud menyalahkan siapa-siapa, bidikan sektor kelautan masih belum menjadi primadona di negara tercinta ini. Padahal kita bisa melihat betapa kayanya potensi laut Indonesia, yang harusnya bisa dinikmati oleh 240 juta penduduknya. Ada beberapa potensi kelautan yang bisa menghasilkan devisa sehingga sangat perlu untuk terus dikembangkan. Misalnya perikanan tangkap di laut, jasa pengiriman laut *(forwarding)*, pertambangan dan energi laut, transportasi laut, pengangkutan barang dengan kapal *(shipping)*, potensi pulau pulau terluar, potensi harta karun bawah laut, barang muatan kapal tenggelam (BMKT) dan sebagainya.

Potensi Perikanan

Bila dicermati, nilai potensi ekonomi dari sektor perikanan dan kelautan mencapai 82 miliar dolar AS, sebuah nilai yang tidak sedikit.

Sayangnya semua potensi tersebut tidak bisa begitu saja dinikmati. Melainkan harus melalui perjuangan yang cukup lama. Belum lagi kita harus berhadapan dengan pihak asing yang telah lebih dahulu menguasai sedemikian besar bidang kelautan. Terutama soal sektor perikanan tangkap.

Potensi lestari sumber daya ikan (SDI) laut Indonesia sekitar 6,4 juta ton per tahun, atau 7,5 persen dari total potensi lestari ikan laut dunia. Saat ini tingkat pemanfaatan ikan Indonesia baru mencapai 4,4 juta ton per tahun. Dua tahun lalu Indonesia berhasil membukukan jumlah ikan tangkapan sebesar 6,4 juta ton ikan, yang diprediksi akan naik menjadi 9 juta ton pada tahun 2008.

Negara ini hampir tiap tahun kehilangan potensi perikanan senilai Rp 30 triliun akibat penangkapan ikan ilegal *(illegal fishing)* di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Tentu, angka kehilangan ini sangatlah fantastis. Padahal, terdapat pula banyak kapal-kapal ikan berbendera asing yang secara resmi melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia.

Data Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) menyebutkan, tahun 2006 jumlah kapal ikan berbendera asing yang diijinkan beroperasi di wilayah Indonesia terutama di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sebanyak 712 kapal.

Ali Supardan, Direktur Jendral Perikanan Tangkap mengatakan potensi perikanan tangkap Indonesia yang dicuri telah berhasil dimanfaatkan sebesar 80 persen. DKP sudah tak lagi membuka ijin baru penangkapan ikan oleh asing.

Selain itu, kata Ali, pemerintah juga mewajibkan perusahaan penangkapan ikan asing yang beroperasi di perairan Indonesia untuk mendirikan industri pengolahan ikan di tanah air.

Dengan demikian, hasil tangkapan tidak boleh lagi dibawa keluar namun harus terlebih dahulu diolah di Indonesia, dan diekspor sudah dalam bentuk olahan. Cara demikian membuat perikanan Indonesia memiliki nilai tambah dan mampu membuka lapangan kerja.

Sejak tahun 2005 hingga 2007, DKP secara bertahap telah menghentikan ijin-ijin operasi kapal ikan asing dari negara Philipina, Thailand dan Cina di perairan Indonesia. Paling tidak hingga akhir tahun 2007 pemerintah tidak akan memperpanjang lagi ijin kapal ikan asing beroperasi di Indonesia.

Ali mengakui dengan dihentikannya ijin mengakibatkan terjadi penurunan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yang sebelumnya bersumber dari sedikitnya 700 kapal asing. Untuk tahun 2007 DKP hanya menargetkan PNBP Rp 200 miliar.

Namun demikian Ali meyakini, kewajiban pengembangan industri pengolahan ikan di Tanah Air membuat pemasukan negara justru akan lebih tinggi dibanding PNBP.

Potensi Transportasi Barang

Potensi laut yang tak kalah besarnya adalah jasa pengangkutan atau pengiriman barang melaui laut *(forwarding)* dan bisnis pengangkutan cargo melalui laut (*shipping*)

Setiap tahun, sekitar 600 juta ton barang dikirim melalui laut. Setiap tahun jasa pengiriman kargo pada jalur perdagangan internasional melalui

asai Asing

laut mencapai Rp 150 trilliun. Angka itu belum termasuk jasa pengiriman barang melalui laut pada jalur domestik.

Di sektor ini lagi-lagi para operator kapal kargo Indonesia kalah bersaing dengan para *forwarder* asing. Asing banyak bermain pada level internasional. Sementara kalangan *forwarder* Indonesia kebanyakan hanya pada level domestik.

Begitupula dengan bisnis pengangkutan barang atau *shipping* yang menunjukkan 46,8 persen armada yang wirawiri di perairan Indonesia ternyata adalah kapal-kapal milik asing. Sisanya baru dimiliki operator nasional. Padahal di sektor ini, uang yang masuk ke kantong operator asing setiap tahun mencapai 11 miliar dollar AS, setara Rp 99 triliun. Hal ini disebabkan Indonesia tidak memiliki kapal angkut yang representatif.

Ketua Ikatan Perusahaan Industri Kapal Indonesia (IPERINDO), Joeswanto Karijimedjo menghitung, dari 170 juta ton angkutan domestik, sebanyak 56 persennya diangkut oleh kapal asing. Kemudian dari 232 juta ton angkutan internasional yang melalui laut, sebanyak 95 persennya diangkut oleh kapal asing.

Artinya, Indonesia mengalami kekurangan armada kapal yang mampu mengangkut barang-barang melalui laut. Untuk itu, masih menurut Joeswanto, tahun 2012 Indonesia sudah harus memiliki sekitar 930 unit kapal untuk memenuhi kebutuhan pengangkutan barang melalui laut.

Penataan Pulau Terluar

Pengembangan wilayah pesisir, pantai, dan pulau-pulau kecil selama ini juga belum tergarap dengan serius. Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi mengatakan, dibutuhkan anggaran Rp 267,72 miliar untuk menata pulau-pulau terluar di wilayah Indonesia.

Saat ini jumlah pulau di Indonesia belum diketahui secara pasti. Menurut Dinas Hidro Oseanografi TNI AL, jumlah pulau Indonesia lebih kurang 17.508. Dari data itu sebanyak 11.801 pulau belum memiliki nama.

Sementara menurut Departemen Dalam Negeri, jumlah pulau yang belum memiliki nama sebanyak 10.117. Pulau-pulau tersebut tersebar mulai dari Aceh di wilayah barat sampai Papua di wilayah timur, serta di wilayah selatan mulai Jawa hingga Nusa Tenggara sampai mendekati gugusan kepulauan Filipina di sebelah utara.

Diperkirakan sekitar 10.000 pulau masih tak berpenghuni. Selama ini terhadap pulau tersebut terjadi banyak penyalahgunaan fungsi. Misalnya sebagai tempat pembuangan limbah, dan pencurian ikan oleh pihak asing.

Wisata Bahari

Pengembangan industri wisata bahari diarahkan kepada pengembangan kawasan wisata pesisir dan pantai serta taman laut Nusantara. Untuk wisata pantai, pengelolaannya tidak terlalu rumit. Banyak contoh model pengelolaan wisata pantai yang sudah berhasil seperti di Pulau Bali dan Nusa Tenggara Barat. Meskipun tidak bisa diseragamkan, tapi model pengelolaan di kedua daerah tersebut bisa dijadikan contoh untuk daerah pantai lainnya di Indonesia.

Yang perlu mendapatkan perhatian serius karena nilai ekonominya yang sangat tinggi adalah pengelolaan terhadap taman laut yang kaya akan terumbu karang. Diperkirakan sedikitnya 950 jenis terumbu karang terdapat di perairan Indonesia dengan potensi luas mencapai 60.000 km2 dan membentang sepanjang 17.500 km.

Sebagian di antaranya sudah ditetapkan menjadi taman laut nasional, antara lain di daerah Kepulauan Tukang Besi (Sultera), Kepulauan Takabonerate (Sulsel), dan Bunaken (Sulut). Bahkan, kalau dibandingkan dengan taman laut dunia, seperti di Tahiti, Kepulauan Karibia, dan Great Barrier Reef di Australia, nilai keindahan yang dimiliki taman laut Indonesia jauh lebih tinggi (World Tourism Organization).

Terumbu karang Indonesia saat ini 41 persen lebih berada dalam kondisi rusak, 28 persen lebih dalam kondisi sedang, dan kira-kira 23 persen lebih dalam kondisi baik.

Potensi laut yang juga bisa dikembangkan adalah eksplorasi atau pengangkatan harta karun bawah laut, berupa barang muatan kapal tenggelam (BMKT). Bila dilihat dari potensinya sejak tahun 1.400 sampai tahun 1.900, tercatat sebanyak 463 lokasi kapal tenggelam di seluruh lautan Nusantara. Belum termasuk tenggelamnya kapal-kapal kecil yang hampir terjadi setiap tahun. Apabila harta karun bisa dimanfaatkan tentu merupakan rezeki baru dalam penerimaan negara.

Justru Michael Hatcher, seorang warga negara Austria pada tahun 1986 yang berhasil mengangkat semua isi kapal Gerdelmalsen berisikan 213.000 keramik antik dan 160 batang emas lantakan, tersebar di beberapa lokasi wilayah Indonesia. Sebagian dari harta karun tersebut kalau diuangkan nilainya lebih dari 16,6 juta dollar AS atau 6,5 juta gulden. ■ ZAH

5,8 juta km luas perairan Indonesia memerlukan pengawalan yang ekstra ketat.

Menjaga Kedaula di Laut

Laut luas membentang menyatukan belasan ribu pulau di kawasan Nusantara. Berbagai kekayaan sumber daya alam dan hayati terkandung di dalamnya. Kewajiban bangsa ini, khususnya TNI AL, untuk menjaga semua itu. Terutama keutuhan dan kedaulatan negeri tercinta.

Sejak dulu Indonesia dikenal sebagai negeri bahari. Kebesaran negeri ini bahkan sudah melegenda sejak masa Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Pelaut Indonesia merajai kawasan maritim Nusantara. Bahkan mampu mengarungi samudra luas sampai ke negeri Campa dan Madagaskar.

Namun kebesaran negeri kepulauan ini belum memberikan kesejahteraan dan kemakmuran yang menjangkau seluruh warganya. Ketidak seriusan dan ketidak mampuan mengelola sumber daya yang tersedia secara baik agaknya menjadi salah satu penyebabnya. Di sisi lain, juga terkendala oleh keterbatasan sarana dan prasarana, di samping ada pula faktor "lalainya" perhatian terhadap kawasan maritim.

Salah satu bentuk "kelalaian" itu menyebabkan lepasnya Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan di kawasan Kalimantan Timur. Wilayah itu, berdasarkan keputusan mahkamah internasional, kini dimiliki dan dikuasai Malaysia yang begitu proaktif mengelola kedua pulau tersebut menjadi kawasan wisata.

Belakangan Blok Ambalat yang potensial memiliki cadangan minyak dan gas bumi juga diincar Malaysia. Sejumlah kapal perang negeri jiran itu bahkan sempat bermanuver di kawasan tersebut. Namun, tak ingin kecolongan seperti kasus Sipadan dan Ligitan, pasukan TNI bersiaga menjaga kawasan tersebut.

Berdasarkan data yang ada, di Indonesia saat ini terdapat 92 pulau yang dikategorikan pulau terdepan atau yang sering disebut pulau terluar. Sebanyak 12 pulau diantaranya rawan terjadi konflik karena posisinya langsung berhadapan dengan kawasan negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Filipina, Australia,

atan

dan Vietnam.

Green Water Navy

Laksamana TNI Slamet Subijanto saat menjabat KSAL (Februari 2005 - November 2007), memiliki pemikiran dan konsep membangun '*Green Water Navy*". Yakni membangun profesionalisme dan kekuatan angkatan laut yang mampu mengamankan dan menangkal setiap bentuk ancaman terhadap keutuhan wilayah NKRI.

Dasar pemikiran mantan Wakil Gubernur Lemhannas itu adalah mengingat luasnya wilayah perairan yurisdiksi nasional, posisi geografi yang berada pada silang dunia, sumber daya alam laut hayati dan non hayati, Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dan alur lintas damai, dan penyebaran penduduk yang tidak merata. Juga permasalahan lain yang terkait dengan perbatasan laut, penyelundupan, perompakan, *illegal fishing* dan sebagainya.

Permasalahan di laut yang berkaitan dengan masalah ekonomi juga perlu mendapatkan pengamanan yang baik. Pengamanan yang dilakukan oleh TNI AL terhadap sumberdaya hayati dan non hayati, dan kegiatan yang dilaksanakan di laut harus dapat diwujudkan. Hal ini secara tidak langsung memberikan arah bahwa kapal-kapal TNI AL yang dioperasionalkan mampu memberikan perlindungan terhadap setiap usaha kegiatan ekonomi di laut yang sedang digalakkan oleh pemerintah.

Misalnya, bagaimana menangkal pencurian dan penangkapan ikan secara liar. Juga pengamanan terhadap pencurian sumberdaya lain yang dilakukan oleh pihak-pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Di samping itu, *illegal logging*, tranfer barang/minyak di laut, penyelundupan dan perompakan di laut juga memberikan pengaruh buruk yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi Indonesia.

Oleh karena itu, kapal yang diperlukan TNI AL adalah kapal-kapal bertonase 400 sampai dengan 800 ton. Tidak perlu terlalu canggih tetapi mampu bertahan di laut sekitar 1 hingga 2 minggu dan dilengkapi kesenjataan sampai kaliber 57 mm, namun pada saat krisis dapat diubah secara cepat dengan melengkapi senjata mutakhir.

Dengan demikian, kekuatan tersebut dituntut mampu melaksanakan fungsi eksternal sebagai kekuatan pertahanan terhadap setiap agresi, kekuatan penangkalan, alat diplomasi dan fungsi internal sebagai kekuatan untuk mempertahankan stabilitas keamanan di laut dan kekuatan untuk menegakkan hukum.

Dengan memperhatikan permasalahan yang ada serta melihat kondisi keuangan negara, TNI AL hingga 2024 merancang pemenuhan kebutuhan akan armada kapal perang (KRI) secara bertahap sebanyak 274 buah. Terdiri dari "*Striking Force*", "*Patrolling Force*" dan "*Supporting Force*" serta pesawat udara sebanyak 137 unit.

Untuk Satuan Tempur Pemukul *(Striking Force)* meliputi kapal perusak kawal, kapal perusak kawal rudal, kapal selam, kapal cepat rudal, kapal cepat torpedo dan kapal buru ranjau. Untuk Tempur Patroli (*Patroling Force*) meliputi kapal patroli cepat. Sedangkan susunan Tempur Pendukung *(Supporting Force*) meliputi kapal markas, kapal angkut tank, kapal penyapu ranjau, kapal angkut serba guna, kapal tanker, kapal tunda samudera, kapal hidro oseanografi, kapal bantuan umum, kapal angkut personel dan kapal latih.

Sedangkan pesawat udara yang dibutuhkan di antaranya pesawat angkut sedang (berupa pesawat *fix wing* dan *rotary wing*), pesawat angkut ringan (*rotary wing*); pesawat patroli maritim, Heli AKPA dan AKS; serta pesawat latih (*fix wing* dan *rotary wing*).

Pesawat udara ini dioperasikan untuk pengendalian laut dan untuk proyeksi kekuatan ke darat. Termasuk di dalamnya untuk intai taktis dan patroli maritim serta untuk anti permukaan dan anti kapal selam. Selain itu juga untuk operasi penegakan hukum di laut sesuai pola koordinasi dengan kapal permukaan.

Dengan kondisi geografis Indonesia yang begitu luas dan sebagian besar terdiri dari lautan, sudah seharusnya TNI AL memiliki armada dan personel yang tangguh dan kuat untuk pengamanan wilayah dari berbagai ancaman aspek laut. Saat ini berdasarkan data yang ada, TNI AL memiliki 114 kapal perang, termasuk dua kapal selam. Sedangkan personel TNI AL berumlah 157.056 orang. Terdiri dari 20.725 Perwira, 54.711 Bintara, 67.955 Tamtama dan 13.665 PNS.

Meski masih sarat dengan keterbatasan, TNI AL harus senantiasa memberikan perhatian yang penuh dalam menjaga kedaulatan negara di laut. Sehingga sasanti "Jalesveva Jayamahe" atau "Di Laut Kita Jaya" benar-benar menjadi kenyataan. ■ **SP**

TNI AL menjadi pasukan pengawal terdepan laut Indonesia.

Hari Nusantara Pererat NKRI

Laut harus menjadi ruang juang dan ruang hidup. Dewan Kelautan Indonesia berperan mewujudkannya.

Sekretaris Umum Dewan Kelautan Indonesia (Dekin) Prof. Dr. Ir. Rizald Max Rompas, M.Agr mengatakan, peringatan Hari Nusantara 2007 agak spesifik. Peringatan dikaitkan dengan 50 Tahun Deklarasi Djuanda, keduanya bertemakan "Tahun Emas Deklarasi Djuanda". Panitia pusat dipegang Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, sedangkan panitia daerah dipegang Pemda DKI Jakarta.

Kepada *Ch Robin Simanullang* wartawan dari majalah *Berita Indonesia*, Rizald Rompas mengatakan, Hari Nusantara pertamakali diperingati di Banten karena sejarah kekuatan terbesar maritim Indonesia bermula dari sana, menyebar ke Sriwijaya dan Selat Malaka.

Menurut Rompas, spirit Hari Nusantara adalah gong untuk mempererat NKRI. "Para pendiri bangsa kita sudah susah payah mendirikan NKRI, kok, belakangan ini mau dipisah-pisahkan," kata Rompas, yang melihat keanekaragaman suku, budaya dan agama sebagai kekuatan yang tidak boleh dipisah-pisahkan.

Spirit menggaungkan potensi dan kekayaan laut Indonesia belum sepenuhnya menjadi perhatian para pengambil kebijakan. "Pengambil kebijakan saja tidak ada perhatian, bagaimana masyarakat bisa memberi perhatian. Mengapa, karena pengambil kebijakan kita masih dicekoki pola pembangunan yang ada di darat, dan itu yang ditanamkan dulu yang VOC sengaja mainkan," kata Rompas, Guru Besar Fakultas Teknologi Kelautan Universitas Sam Ratulangi, Manado memaknai pentingnya peringatan Deklarasi Djuanda tahun ini.

Dekin yang dibentuk 21 September 2007 sebagai pengganti Dewan Maritim Indonesia (DMI), kata Rompas akan mendorong supaya potensi yang ada di laut dapat menjadi penopang ekonomi nasional. Juga supaya Indonesia tidak terjepit, mengingat percaturan strategi politik global permainannya sudah di laut.

Prof. Dr. Ir. Rizald Max Rompas, M.Agr

foto: repro maritim indonesia

"Kita jangan sampai terjepit. Kita harus bangun ini," kata Rompas. "Kita mau hadapi strategi politik dunia sekarang ini tidak lewat udara. Kalau tahun 1980-an masih lewat udara, sekarang lewat laut."

Rompas menjelaskan, posisi laut kita yang menjadi putaran arus Pasifik memungkinkan musuh menghancurkan Indonesia dengan menebar racun, atau meledakkan bom berisi virus ke arus yang bergerak menuju laut Lombok dan Jawa. Model perang mendatang yang demikian memang belum terpikir sekarang ini. "Harus kita siap, oleh karena itu kita harus kuat," kata Rompas.

Demikian pula kondisi Selat Malaka, jalur dengan frekuensi pelayaran tertinggi di dunia, kata Rompas adalah contoh lain kuatnya pertarungan strategi percaturan politik global. Tiupan politik dunia selalu menggembar-gemborkan Malaka tidak aman, untuk memberikan ruang kepada asing turut bermain.

Salah satu strategi membangun kelautan Indonesia adalah dengan membentuk undang-undang kelautan. Undang-undang ini digunakan sebagai aturan main di laut, sebagaimana Kanada memiliki Ocean Act tahun 1996, dan AS juga Ocean Act sejak 2000.

"Kita di Dewan Kelautan mendorong supaya undang-undang kelautan harus muncul. Kita mau dorong tata pemerintahan di laut harus teratur. Jangan sampai nanti masing-masing merasa punya kekuasaan-kekuasaan," kata Rompas.

Rompas mengatakan, kita harus mendayagunakan seluruh potensi kekayaan yang ada di laut seperti perikanan, transportasi laut, energi, sumber daya mineral laut dan lain-lain. Pertambangan, misalnya, setelah di darat berkurang kini mengarah ke laut di daerah lepas pantai. PBB lewat komisinya pun sampai-sampai mengatur mineral-mineral yang ada di bawah dasar laut. "Menurut hukum laut internasional, wilayah Indonesia di atas laut dan di bawah dasar laut itu milik kita."

Sepakati Tiga Pilar

Rompas mengatakan manfaat Tahun Emas Deklarasi Djuanda adalah membangun kesepakatan bersama di antara seluruh kementerian anggota Dekin, tentang kelautan sebagai pilar ekonomi, pilar lingkungan hidup, dan pilar sistem kelembagaan di laut.

Dalam pilar ekonomi, pelayaran rakyat masih merana. Transportasi laut 95 persen masih dipegang asing kendati sudah diatur azas *cabotage* untuk mendayagunakan pelayaran nasional. Soal lain yang krusial adalah perikanan yang masih diwarnai *illegal fishing* atau *IUU Fishing*.

"Banyak potensi kita yang belum dikelola karena tidak ada perhatian dari para pengambil kebijakan, sebab kurang peduli terhadap laut," kata Rompas yang berencana menatar para pejabat eselon satu dan dua supaya memahami potensi yang ada di laut. Sekaligus, menjadikan laut sebagai ruang juang dan ruang hidup.

Wisata bahari juga turut merana. Wisata bahari kita sebagai daerah tropis banyak yang belum dikembangkan sebagai sumber ekonomi.

Soal pilar kedua, Rompas mengatakan tata pemerintahan di laut belum betul. Dengan komitmen semua menteri, laut harus ditata bersama sebab tujuannya sama yakni membangun.

Pilar ketiga soal lingkungan hidup, Rompas menyebutkan wilayah laut Indonesia subur dan kaya, berperan sebagai penentu iklim Asia Pasifik. "Karena kita yang menentukan iklim di Asia Pasifik, harusnya dunia memperhatikan kita. Kalau ini rusak, rusak iklim itu, jangan persalahkan kita yang merusak. Tapi di sana itu yang tidak memperhatikan," gugat Rompas.

"Kita harus nyatakan kepada dunia, ini menentukan. Apa kontribusi dunia terhadap kita, jangan bikin kacau di sini," tegas Rompas, didampingi Bonar Simangunsong Sekretaris Bidang SDM Dekin. ■ HT

Perlu Dukungan Semua Pihak

Selama sewindu Departemen Kelautan dan Perikanan telah menghasilkan beberapa karya nyata.

Perikanan laut Indonesia belum dikelola secara optimal.

Widi Agoes Pratikto, ketika masih menjabat sebagai Direktur Jenderal Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (P3K), dalam sebuah diskusi pribadi tahun 2003 dengan Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, M.Sc, Menteri Kelautan dan Perikanan ketika itu, pernah diminta untuk menghitung besaran anggaran yang ideal untuk membangun Ditjen P3K. Ditjen P3K sebelum dimekarkan menjadi Ditjen Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K) seperti sekarang, dihitung Widi saat itu membutuhkan anggaran untuk membangun wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil paling tidak sebesar Rp 10 triliun.

Widi yang sejak Oktober 2006 dilantik menjadi Sekretaris Jenderal Departemen Kelautan dan Perikanan (Sekjen DKP), kemudian menghitung lagi, untuk membangun DKP sebagai kendaraan pendorong kemajuan pembangunan kelautan di masa depan menemukan, setiap tahun DKP paling tidak membutuhkan anggaran Rp 25 triliun.

Tetapi sayang sekali fakta menunjukkan anggaran tahunan DKP masih tergolong kecil, tahun 2007 Rp 3,31 triliun saja, dan tahun 2008 belum bergerak hanya Rp 3,35 triliun. Terkesan sekali anggaran DKP dibuat steril atau dibonsai.

Anggaran DKP masih sangat kecil apabila diperbandingkan dengan potensi ekonomi yang dapat dikelola. Widi mengatakan hal itu tak terkait dengan kinerja DKP, sebagaimana gagasan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang menetapkan besaran kenaikan anggaran setiap departemen berbasiskan kinerja.

Sekalipun DKP ditetapkan sebagai satu-satunya kendaraan pendorong kemajuan pembangunan ekonomi kelautan, yang memiliki otoritas besar dan anggaran yang sepadan, Widi mewanti-wanti bila otoritas yang diberikan itu terlalu besar tak tertutup kemungkinan terjadi *abuse of power*, atau penyalahgunaan kekuasaan di institusi DKP.

Widi mengatakan, yang sangat dibutuhkan departemennya saat ini adalah semua pengambil keputusan, petinggi negara, birokrat, profesional, pengusaha dan masyarakat umum supaya memiliki *mindset* yang sama soal pembangunan nasional yang berbasis kelautan.

Dengan sudut pandang atau *mindset* yang sama Widi memastikan penentuan besaran anggaran pasti menjadi tidak masalah, dan persoalan *abuse of power* dapat terhindarkan.

Sewindu DKP

Peringatan perjalanan sewindu usia DKP (26 Oktober 1999-26 Oktober 2007), yang waktunya berdekatan dengan Tahun Emas Deklarasi Djuanda, juga momentum peringatan Hari Nusantara 2007, menurut Widi adalah cermin bagaimana memandang wilayah laut sebagai sumber perekonomian bangsa.

Kata Widi, adalah Presiden Abdurrahman Wahid yang pada tanggal 26 Oktober 1999 mengeluarkan keputusan bersejarah dan monumental, yaitu dengan membentuk Departemen Eksplorasi Laut pada Kabinet Persatuan Nasional, serta mengangkat Ir. Sarwono Kusumaatmadja sebagai Menteri Eksplorasi Laut.

Widi sangat mengagumi visi besar Presiden Abdurrahman Wahid tersebut, dan dukungan berbagai pihak terutama *stakeholders* kelautan dan perikanan dalam upaya mengubah orientasi pembangunan dari pembangunan yang berorientasi daratan *(continental oriented)* ke pembangunan yang berorientasi lautan *(0cean oriented)*.

Sejalan dengan peringatan Sewindu DKP, Widi mengatakan DKP harus meningkatkan kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan, dan masyarakat pesisir lainnya melalui pengembangan kegiatan usaha yang berkelanjutan. Secara bersamaan pula, DKP harus berbenah diri dengan penyediaan sumberdaya manusia, teknologi, sarana dan prasarana yang memadai.

Selama sewindu ini DKP telah menghasilkan beberapa karya nyata, seperti pengusahaan berbagai kebijakan dan program pembangunan serta hasil-hasilnya di bidang perikanan budidaya, perikanan tangkap, pengolahan dan pemasaran, pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan, riset dan pengembangan IPTEK.

Demikian pula dengan pengembangan sumberdaya manusia, karantina, pengawasan pembangunan dan tata pemerintahan yang baik, serta berbagai program lain yang menunjang upaya pengurangan kemiskinan *(pro-poor)*, penciptaan lapangan kerja *(pro-job)*, mendorong pertumbuhan ekonomi *(pro-growth)* dan mengembangkan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan *(pro-business)*.

Kata Widi, karya DKP lainnya adalah pembangunan sarana dan prasarana fisik dan non-fisik untuk mengejar ketertinggalan selama ini. Antara lain, terbentuknya UU No. 31/2004 tentang Perikanan, UU No. 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Pulau-Pulau Kecil, Undang-Undang Penyuluh Perikanan dan Kehutanan, serta yang terbaru pembentukan Peradilan Perikanan diresmikan pada tanggal 4 Oktober 2007.

Selain itu DKP juga telah melakukan penguatan kemitraan baik dengan berbagai instansi pemerintahan maupun dengan *stakeholders* pembangunan kelautan dan perikanan terutama asosiasi usaha, perbankan, lembaga swadaya masyarakat dan perguruan tinggi.

Terakhir adalah peningkatan iklim usaha dan investasi di bidang kelautan dan perikanan yang dilakukan dengan deregulasi bidang perikanan yang lebih berpihak kepada industri dalam negeri, antara lain melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 17 tahun 2006 dengan tujuan terutama meningkatkan lapangan kerja di industri pengolahan hasil perikanan di dalam negeri. ■ HT

WAWANCARA

Sekjen DKP Prof. Widi A. Pratikto, Ph.D:

"No Blood No Glory"

Perubahan paradigma di tingkat pemimpin menjadi kunci majunya pembangunan ekonomi di bidang kelautan.

foto: berindo wilson

Dalam rangka peringatan Sewindu DKP, Hari Nusantara 2007, dan Tahun Emas Deklarasi Djuanda, Sekjen DKP Prof. Ir. Widi Agoes Pratikto, M.Sc., Ph.D berkenan memberikan kesempatan wawancara kepada *Berita Indonesia*. Berikut petikan berbagai pemikiran besarnya tentang pembangunan kelautan Indonesia, disampaikan kepada *Haposan Tampubolon* dan *Nur Azizah*, berlangsung di Gedung DKP Kamis (15/11).

Kita seringkali mendengar pernyataan potensi kelautan kita begitu besar, tapi tak terkelola dengan baik. Bagaimana Anda melihatnya?

Kekayaan kita, *pertama*, letak strategis antara dua benua dan dua samudera pasti menjadi persilangan atau lalu lalang sistem transportasi. Kita tahu, 95 persen muatan dibawa kapal laut sehingga pasti melalui kita. Tapi apakah kita mempergunakan kestrategisan dengan baik, seperti membangun sistem pelabuhan yang bagus, aman, sesuai kriteria ISPS Code atau standar-standar pelabuhan.

Kedua, Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan kita negara kepulauan, juga Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, bahwa pembangunan jangka panjang harus berbasis pulau kecil. Ini juga belum mendapatkan perhatian dalam pembangunan.

Kita punya 17 ribu lebih pulau tapi aksesibilitas belum dibangun. Kita punya pabrik kapal punya pabrik pesawat terbang tapi didesain bukan untuk memfasilitasi pulau-pulau kecil.

Pertumbuhan kembali IPTN atau PT DI bisa melihat perspektif DKP, supaya membuat pesawat-pesawat kecil yang bisa mendarat di landasan pendek untuk masuk ke pulau-pulau kecil, sehingga pergerakan manusia sangat aktif. Kita juga memiliki sarana telekomunikasi tapi belum menjangkau pulau-pulau kecil. Poin-poin itu yang akan menjadikan pergerakan ekonomi kita ke sana.

Kita mempunyai sumber daya yang tidak bisa diperbaharui dan yang bisa diperbarui. Kita punya ikan, keindahan di bawah laut, tapi penggunaannya belum maksimal. Bisa jadi itu terkait dengan koordinasi pengelolaan di laut, dan koordinasi pengelolaan keamanan, sehingga masih banyak *IUU Fishing* dan *illegal logging*. Badan koordinasi belum jalan sebagaimana mestinya.

Kita memiliki hal lain yang berkaitan dengan obat-obatan. Banyak *sponge* (bunga karang) dari jenis-jenis tertentu yang dikembangkan di laut. Juga air mineral bawah laut. Sekarang produksi minyak dan gas 65-70 persen di laut.

Jadi kita merefleksikan apa yang kita miliki luar biasa, tapi belum mempersiapkan kendaraan untuk membangun dan menjadikan *income generating* di laut. Ke depan, Presiden hingga Bappenas harus mendorong alokasi anggaran untuk sektor kelautan yang harus lebih besar.

Tetapi mengapa anggaran DKP tahun ini hanya berkisar Rp 3,5 triliun, apakah terkait dengan kinerja yang kurang menggembirakan?

Saya melihat karena *mindset* kita belum ke laut. Coba kita lihat keterkaitan DKP dengan turisme. Seandainya aksesibilitas ke pulau kecil tinggi, dan ada *hand to hand* antara kita dengan Departemen Pariwisata, kegiatan wisata bahari seperti *diving*, *snorkling*, *sailing* bisa digalakkan. Beberapa kegiatan orang kaya adalah melihat gerakan ikan paus di daerah Alor, NTT. Sekarang ini belum *capture market*, masih *tailor market*. Di daerah Maumere kita bisa melihat lumba-lumba bergerak. Kalau kita bisa menyajikan itu, kapasitas daerah ada, rasanya ekonomi kelautan akan tumbuh.

Kita harus berterimakasih kepada Presiden Abdurrahman Wahid yang pada 26 Oktober 1999 mendirikan Departemen Kelautan dan Perikanan. Suka tidak suka ada perubahan paradigma, dengan menjadikan kelautan suatu kegiatan yang merupakan kendaraan menuju Indonesia yang sejahtera.

Intinya kita butuh modal kerja, modal tenaga dan modal *budget*. Perubahan paradigma mudah-mudahan membawa partisipasi sektor kelautan dalam ketahanan ekonomi Indonesia, dan devisa.

Mungkin, ketersediaan sumber daya manusia kelautan belum memadai?

Ada beberapa proses yang harus dilalui. Kita tidak bisa menunggu sampai SDM cukup. Diknas sudah melakukan program-program penyiapan pengelolaan kelautan tahun 1980-an. Di tahun 1985 ada program *marine scientist* dan *marine technology*.

Ada enam perguruan tinggi yang mengembangkan *marine scientist*: Unri, IPB, Undip, Unsrat, Unpatti, dan Unhas. *Marine scientist* terjemahan umumnya ilmu kelautan.

Perikanan sudah mulai tahun 1960-an. Sejak itu sudah ada perikanan yang menjadi cikal bakal *marine scientist*. *Marine technology* dilakukan ITB dan ITS.

Marine technology bicara *piping system* di bawah laut, *offshore*, *sea protection*, *coastal engineering*.

Pertumbuhan kekuatan SDM memang belum cukup. Tapi tidak mesti dicukupkan dulu baru anggaran pembangunan dikucurkan. Harus paralel. Kita harus berterimakasih sudah banyak perguruan tinggi yang membuka bidang-bidang perikanan, *marine scientist* dan *marine technology* di berbagai daerah, meski pertumbuhannya lebih banyak ke arah *marine scientist*.

Kita juga punya Program Mitra Bahari di 33 provinsi, kerjasama antara perguruan tinggi, Diknas, dan DKP. Sambil menunggu SDM yang kompetitif kita sudah bisa mempergunakan SDM yang tertarik pada masalah-masalah kelautan. Program Mitra Bahari merupakan salah satu cara solusi kekurangan sumber daya manusia.

Laut Indonesia sedemikian luas. Mengelolanya, cukupkah diserahkan kepada sebuah institusi bernama DKP?

Kita harus tanya bisakah manusia Indonesia berkoordinasi. Cukup kuatkah, kalau ada orang yang dikasih institusi besar itu, tidak *abuse of power*.

Negara Amerika mengelola laut dengan melibatkan 21 institusi dan yang mengoordinasi sebagai *entitle leading sector* adalah NOAA (*National Oceanic Atmospheric Administration)*. Di Indonesia, bisakah seperti DKP dikasih tanggung jawab untuk mengoordinasi semua kegiatan laut.

Atau opsi kedua, kita butuh *very brave person* seperti Gus Dur. Kita ada referensi, Korea, dengan Department Maritime and Fisheries-nya semua urusan di laut dikumpulkan dalam kementerian ini. Indonesia, bisakah seperti itu?

Misalkan hal-hal yang berkaitan dengan pertambangan laut, koordinasi dengan DKP dong masalah *safety* misalnya. Kalau gasnya, silakan. Tapi misalkan pipa di bawah laut harus dipendam berapa meter, harus dibor pakai proteksi beton, atau jangkar, atau apa, itu harus ada yang mengatur.

Kemudian menjual pesisir, siapa yang menjadi *entitlely institution*. Kalau kita mau menjual pulau dengan baik untuk industri atau turisme, dia harus teratur, kondisi lingkungannya harus baik. Sekarang, isinya masih orang miskin, kumuh, tidak sehat, listrik tidak ada.

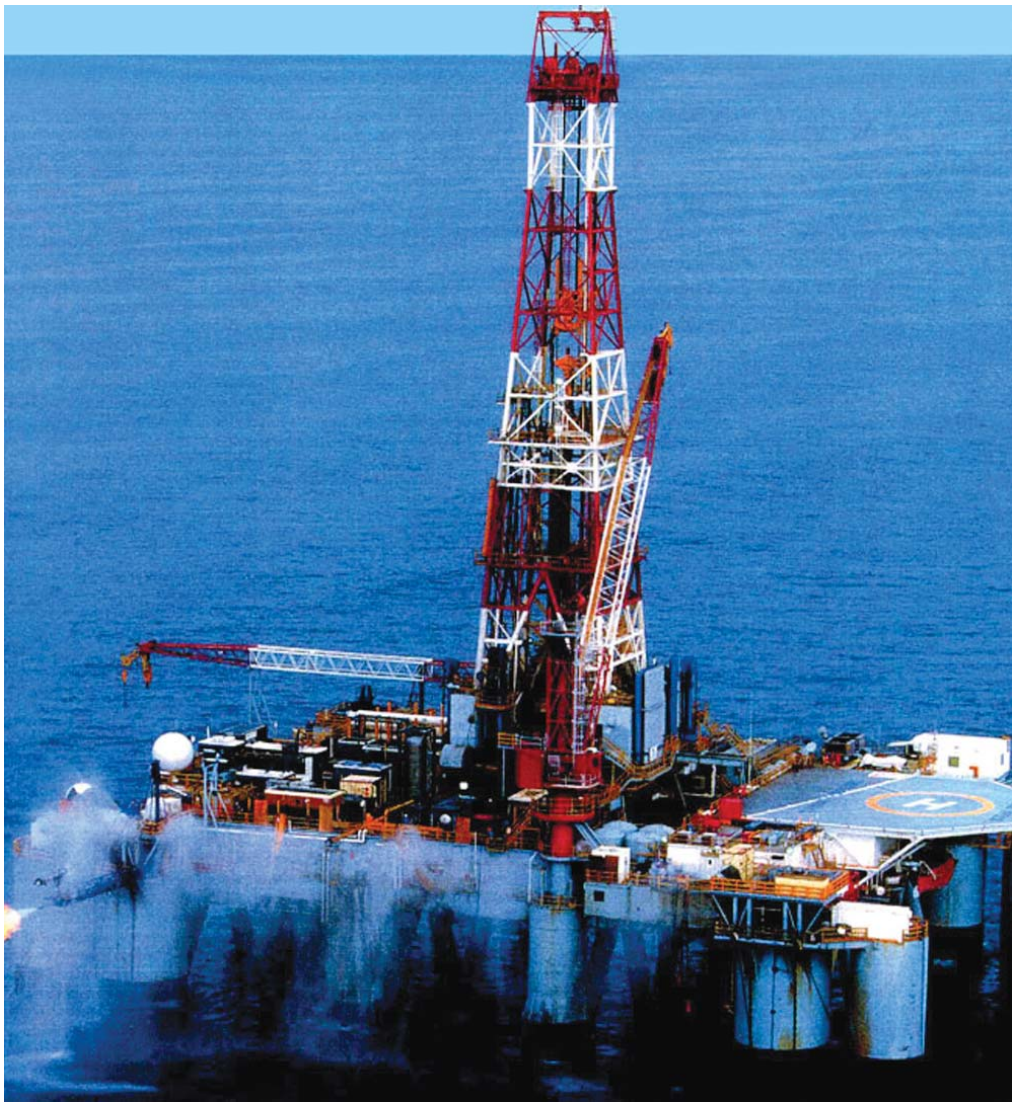

Presiden hingga Bappenas harus mendorong alokasi anggaran untuk sektor kelautan yang harus lebih besar.

Kalau kita ingin besar harus tanya kultur kita, bisa tidak, misalkan DKP dikasih tugas menjadi *lead institution* mengoordinasikan semua. Atau, disatukan ke satu departemen seperti di Korea Maritime and Fisheries.

Jika DKP diserahkan tugas mengoordinasi semua kegiatan pembangunan di laut, berapa kira-kira anggaran yang dibutuhkan setiap tahun?

Saya ingin mencoba melihat perspektif dari yang saya tekuni. Saya belajar teknik kelautan terutama masalah infrastruktur, fasilitas dan sebagainya. Sewaktu saya diminta Pak Rokhmin untuk mengembangkan Direktorat Jenderal Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (P3K) di awal tahun 2003, saya katakan, Pak Rokhmin, untuk menjadi Direktorat Jenderal yang baik dibutuhkan biaya anggaran Rp 10 triliun. Itu direktorat jenderal.

Kalau kita mau serius mengembangkan kelautan, termasuk perikanan, pelabuhan perikanan, turisme, mestinya sekurang-kurangnya Rp 25 triliun untuk satu departemen bernama DKP. Karena kita ngomong *outer ring fishing port*, pelabuhan-pelabuhan strategis supaya pulau-pulau terluar memiliki aktivitas ekonomi. Satu pelabuhan tidak kurang Rp 1 triliun.

Kemudian kita ngomong aksesibilitas, supaya pesawat kecil bisa masuk ke pulau-pulau kecil kita harus membangun infrastruktur atau landasan. Kita bisa mengembangkan pesawat yang hanya butuh landasan sederhana, misal tipe Cesna karavan yang hanya butuh rumput atau daerah yang sudah dipadatkan. Jadi ada *dual track*: industri pesawat kecil, kemudian menjadikan pulau-pulau kecil terjangkau ada aksesibilitas.

Anggaran sebesar Rp 25 triliun sudah sampai ke tahap eksploitasi laut?

Kalau eksploitasi, saran saya investor. Misalkan eksploitasi minyak di laut, biarkan orang-orang ESDM yang mengupa-

yakan karena memang bidang kerjanya mereka. Tapi begitu ngomong masalah pemipaan, atau transportasi lewat pipa, kriteria koordinasi lingkungan harus berhubungan dengan kelautan.

Dari sisi DKP, bagaimana Anda melihat potensi kelautan untuk sektor transportasi, lingkungan hidup, dan pertahanan keamanan?

Bicara pertahanan keamanan, kita harus melihat partisipasi masyarakat. Kalau yang dimaksud pertahanan alutsista, persenjataan, dan sebagainya saya tidak akan masuk ke sana.

Rasa aman terjadi manakala kita bersilaturahim. Ada keamanan, ada *trust*, sehingga masyarakat harus dilibatkan. Makin banyak aktivitas di laut harusnya makin aman. Manakala partisipasi masyarakat sudah tinggi, mestinya makin sedikit polisi atau orang yang bertugas mengawasi di laut.

Bicara transportasi, perikanan, sekarang kita tahu *gasoline* (minyak) harus menjadi parameter pokok menetapkan ukuran kapal. Supaya transportasi, kapal ferry atau kapal ikan efektif. Tidak bisa subsidi terus.

Khusus soal potensi transportasi laut, kita berada di titik persilangan tetapi belum bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri?

Kadang-kadang, memang. Masalah-masalah lain harus dirapikan. Misal masalah pajak, infrastruktur. Tapi juga dibutuhkan budaya pioner. Kembalilah kita seperti orang dahulu, berdarah-darah memperoleh kemerdekaan, mbok sekarang ini kita berdarah-darah menuju ke kemandirian. Harus dibuktikan itu.

Soal pembangunan kelautan di sisi perangkat hukum, sudahkah mencukupi?

Selalu kita menyalahkan perangkat hukum. Padahal kita dikasih akal dan mulut. Kan, mestinya, hal yang tidak tercakup dalam hukum bisa di*settle down* melalui akal dan mulut. Okelah, kita membuat peraturan dulu yang renik, yang detil, tapi juga manusianya bejat, diakali saja terus peraturannya.

Sejak sekarang kita harus berani melangkah untuk mengatasi segala permasalahan, apapun situasinya. Istilah orang Amerika, *no blood no glory*, tidak ada keberanian tidak ada *glory* (kemuliaan, keagungan), tidak ada suatu yang *magnificient*.

Atau, *no money no honey*, kalau tidak ada uang tidak ada cinta, kata mereka. Tapi saya lebih percaya *no blood no glory*. Jadi *glory* itu berdarah-darah dengan risiko.

Kita umumnya lebih suka enaknya saja?

Makanya saya pengen banyak orang Indonesia sekolah ke Amerika. Karena di sana sekolah betulan. Maksud saya sekolah bukan sekolah pendidikan, tapi *the way*. Orang Indonesia melihat AS seperti film koboi saja, atau kota Melrose Place yang indah-indah. Tidak tahu kalau kampus mereka buka sampai jam 12 malam, mahasiswa pagi-pagi sudah di kampus, perpustakaan jam enam sudah buka. Kita, belajar semalam mintanya dapat A.

Menurut saya, sistem pendidikan harus keras, disiplin, terus dosen harus *full timer*. Telur ayam bisa menetas kalau terus dieramin. Murid, sama, akan baik kalau 'dierami' sama profesor.

Kembali ke soal koordinasi. Sesungguhnya sudah bukan masalah lagi sebab ada Dewan Maritim Indonesia yang sejak September berubah menjadi Dewan Kelautan Indonesia?

Mestinya Dewan Kelautan harus jadi mesin yang menyatukan mengawal pembangunan kelautan. Dia menjadi advokasi, melobi supaya pembangunan sektor kelautan menjadi besar. Dia harus menjadi tempat berkumpulnya *the execellency*. Ini harapan saya, sehingga Presiden terbantukan.

Amerika Serikat memiliki *Ocean Blueprint for 21th Century* yang detil sekali isinya. Harusnya seperti begitu yang saya bayangin tentang produk Dewan Kelautan Indonesia. Selama kita nggak bisa detil, ya sudah, ditipu anak buah jadi temuan.

Mestinya kita harus runut, UUD kita sudah ngomong kepulauan, RPJPN kita ngomong berbasis kepulauan, sekarang apa APBN-nya ngomong masalah kepulauan? Salah-salah, tata ruangnya berbasis pulau besar Kalimantan, Papua dan sebagainya. Kondisi lingkungan harus menjadi parameter dalam proses pembangunan. Negara kita kepulauan, ada ijin membangun jembatan, ngapain? Kan, mestinya transportasi laut dong.

Mungkin Anda perlu mendistribusikan orang-orang Kelautan ke departemen-departemen lain supaya visi kelautan sampai?

Dulu waktu saya Dirjen, tanya Pak Lambok, kita berantem sampai beliau mengubah *mindset*-nya menjadi *mindset* kelautan. Dulu nggak ada yang percaya masalah UU-PWP. Saya yang mengawalnya sejak 2002, bertengkar terus isinya.

Saya punya buku-buku sistem perlindungan pantai, fasilitas pantai kasihkan Pak Lambok. Lalu dia sendiri yang cerita, setelah saya baca-baca oh, ini. Akhirnya tahun 2004 Ampresnya keluar. Alhamdulilah, meski saya tidak lagi Dirjen tapi kemarin sudah menjadi UU-PWP.

Deklarasi Djuanda dimaklumatkan 50 tahun yang lampau, apa makna khususnya untuk mengutuhkan NKRI?

Sebelum Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957, kita adalah negara yang unsurnya pulau dengan batas luarnya 3 mil. Artinya, ada *intersection*, ada ruang kosong yang bukan milik kita. Djuanda *visioner person* dengan menjadikan Indonesia seperti cincin luar biasa sehingga pertambahan wilayah laut kita menjadi 5,8 juta kilometer persegi.

Pak Djuanda sudah meletakkan prinsip-prinsip menjadi suatu negara besar yang wilayah teritorinya berbentuk *seawaters*. Sekarang sebagai anak bangsa, mari kita berpikir bagaimana mengisi, me-*manage*, menjadi tuan di negara tercinta Republik Indonesia ini.

Untuk meletakkan pondasi pengelolaan kelautan ke depan, warisan nilai-nilai apa yang bisa dipetik dari Deklarasi Djuanda?

Harus makin banyak orang berpikir dengan basis kelautan. Kalau Indonesia mau kembali jaya menjadi negara besar, pola pikirnya harus pola pikir laut. Lihat kerajaan-kerajaan dahulu yang berpola pikir laut seperti Sriwijaya, Majapahit, menguasai lautan.

Sekarang lahan pertanian makin kecil. Kalau pertanian mau ditingkatkan maka harus *hi-tech*, bioteknologi, benih baru, pokoknya hal-hal yang lebih canggih dan sebagainya.

Sektor kelautan jangan ngomong canggih dulu. Saya sampaikan, harus ada perubahan paradigma, cara berpikir, dan *mindset* supaya kita bisa.

Kita harus mau *struggle* (berjuang). Mengelola laut harus *struggle* dan harus punya ilmu. Membangun rumah di atas laut harus ada ilmu lebih. Ini yang harus disadari bahwa ketika kita berbicara soal laut harus ada ilmu dan harus ada modal. Tidak bisa ecek-ecek.

Setelah kita memperingati tiga perayaan, Sewindu DKP, Hari Nusantara, dan Tahun Emas Deklarasi Djuanda, apa harapan Anda ke depan?

Saya ingin ada perubahan paradigma dan *mindset* di tingkat pemimpin. Saya sangat percaya, Indonesia ini paternalistik. Kalau Presiden, Wapres, Ketua DPR, Ketua MPR, Bappenas, Menteri Keuangan dan semua menteri, otaknya "dibedah" lalu dimasukkan unsur kelautan, mereka akan berpihak ke kelautan.

Tapi jangan-jangan mereka berpikir begini: Habis, kita nggak yakin ke kelautan. Ya sudah, berarti dia tidak mengikuti sunnatullah.

Sunnatulah atau hukum alam, dua pertiga wilayah kita laut. Dan kita punya pulau-pulau kecil. Jangan menyalahkan sunnatullah sebab hukuman Tuhan akan turun lagi. ■

BUMN dan Permasalahannya

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diperlukan sebagai motor penggerak perekonomian negara. Tapi, jika dimonopoli akibatnya buruk dikemudian hari. Dan, para direksi dan komisaris BUMN yang tidak hati-hati, jabatannya bisa jadi malapetaka.

Permasalahan di berbagai perusahaan milik negara, seperti rencana membentuk holding company BUMN, masalah kepemilikan silang Temasek di Indosat dan Telkomsel, serta dugaan korupsi penjualan kapal tanker milik Pertamina menjadi laporan utama beberapa majalah terbitan Ibukota dua minggu terakhir.

Majalah *Investor* (Desember 2007) misalnya, mengangkat laporan utama mengenai rencana Kementerian BUMN mendirikan *holding company* yang menaungi seluruh BUMN di Indonesia. Gagasan ini sebenarnya sudah lama mencuat, tapi gagasan yang masih sebatas sektoral itu timbul tenggelam akibat berbagai kendala serta beberapa kali pergantian pemerintahan. Belakangan, keinginan itu menguat lagi. Tak hanya sektoral, tapi menyeluruh. Kepada *Investor*, Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil mengatakan, dia bercita-cita Kantor BUMN nantinya akan menjadi holding company. Siapa yang menjadi Menteri BUMN sekaligus akan jadi CEO (chief executive officer). Rencana itu diharapkan Sofyan Djalil sudah bisa rampung sebelum akhir masa jabatannya. Sebagai langkah awal mendukung rencana dimaksud, Kementerian BUMN sudah melakukan konsolidasi, mendorong transparansi, meningkatkan kinerja BUMN, bahkan diduga sudah menyiapkan kantor baru di Gedung Garuda Indonesia. Jika rencana tersebut terwujud, Menurut hitungan *Investor*, maka induk korporasi ini akan menjadi yang terbesar di Tanah Air, dengan aset sekitar Rp 1.500 triliun.

Sementara majalah *Trust* (19-25/11), menurunkan laporan utama mengenai vonis Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terhadap Temasek. Dituturkan, setelah menjalani proses pengusutan, KPPU akhirnya menyatakan Temasek bersalah melakukan monopoli di industri telekomunikasi Indonesia berkaitan dengan kepemilikan silang sahamnya di PT Indosat dan PT Telkomsel. Menurut Ketua KPPU Mohammad Iqbal, Temasek melanggar Pasal 27 UU No.5 tahun 1999 tentang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha yang Tidak Sehat.

Kasus ini sebelumnya berawal dari dijualnya Telkomsel kepada Singapura Telecom (SingTel) sebesar Rp.3,2 triliun pada tahun 2002. Pada akhir 2002, pemerintah kembali menjual saham Indosat kepada STT seharga US$627,35 juta. Penjualan yang sudah mendapat protes sejak awal ini semakin mencuat ke permukaan setelah Forum Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu melaporkan Temasek ke KPPU atas dugaan monopoli. KPPU menyimpulkan, kepemilikan saham Temasek di Indosat dan Telkomsel yang nyaris 50%, membuatnya cukup dominan untuk menentukan atau menghalang-halangi diambilnya keputusan strategis yang memerlukan persetujuan mayoritas khusus. Walau KPPU memutuskan demikian, tapi menurut *Trust*, masih sulit 'mengusir' Temasek dari Indosat dan Telkomsel. Temasek tentu tidak akan menerima begitu saja putusan itu. Mereka kemungkinan akan membawa kasus ini ke pengadilan negeri bahkan ke arbitrase internasional.

Majalah *Tempo* (26 Nov-2 Des) juga menurunkan masalah vonis KPPU ini sebagai laporan utama. Menurut laporan *Tempo*, akibat kepemilikan silang Temasek di Indosat dan Telkomsel sebagaimana diputuskan KPPU, tarif seluler di Indonesia jadi mahal. Bahkan merupakan yang termahal di Asia yang merugikan konsumen Rp 14,3 triliun hingga 30,8 triliun untuk kurun waktu 2003-2006. Oleh karena itu, Temasek diperintahkan menghilangkan kepemilikan silangnya dengan menjual habis sahamnya di Indosat atau Telkomsel dalam dua tahun dan membayar denda Rp25 miliar. Saran *Tempo*, KPPU sudah menunjukkan nyalinya kepada Temasek. Kini ditunggu nyali serupa ditunjukkan kepada kegiatan pemerintah ataupun BUMN yang juga monopolistik.

Sedangkan majalah *Gatra* (15-21/11), menyoroti BUMN terkait kasus dugaan korupsi Laksamana Sukardi ketika menjabat komisaris PT Pertamina. Diuraikan, Laksamana Sukardi menjadi tersangka korupsi penjualan dua kapal tanker milik Pertamina karena sebagai Menteri BUMN sekaligus menjadi komisaris utama PT Pertamina ketika itu, dia menyetujui usul Arifi Nawawi (Dirut) dan Alfred H Rohimone (Dir Keuangan) menjual dua kapal VLCC tersebut.

Bermaksud membela diri, Laksamana memakai PP Nomor 41 tahun 2003, tentang pelimpahan kedudukan, tugas, dan wewenang Menkeu dalam perusahaan perseroan, perusahaan umum, dan perusahaan jawatan kepada Menneg BUMN sebagai alasan tindakannya. Dan untuk itu, dia meminta mantan Presiden Megawati sebagai saksi. Jadi menurutnya, dirinya tidak melanggar karena hanya sekadar memberi persetujuan. Di samping itu, menurutnya, dalam anggaran dasar perusahaan, persetujuan komisaris atas tindakan direksi tidak bisa dipidanakan. Tapi sebaliknya, menurut Kejaksaan Agung, penjualan itu melanggar hukum karena dilakukan tanpa izin Menkeu sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003.

Laksamana yang merasa dirinya jadi korban politik, bermaksud membawa kasusnya kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tapi, Presiden Yudhoyono sendiri sudah memastikan tidak akan menemuinya dalam urusan ini. Presiden Megawati juga yang dimintanya sebagai saksi, seperti diutarakan Sekjen PDI-Perjuangan Pramono Anung Wibowo mengaku tidak tahu menahu mengenai kasus tersebut. ■ **MS**

Al-Zaytun
Model Konservasi Hutan Kota

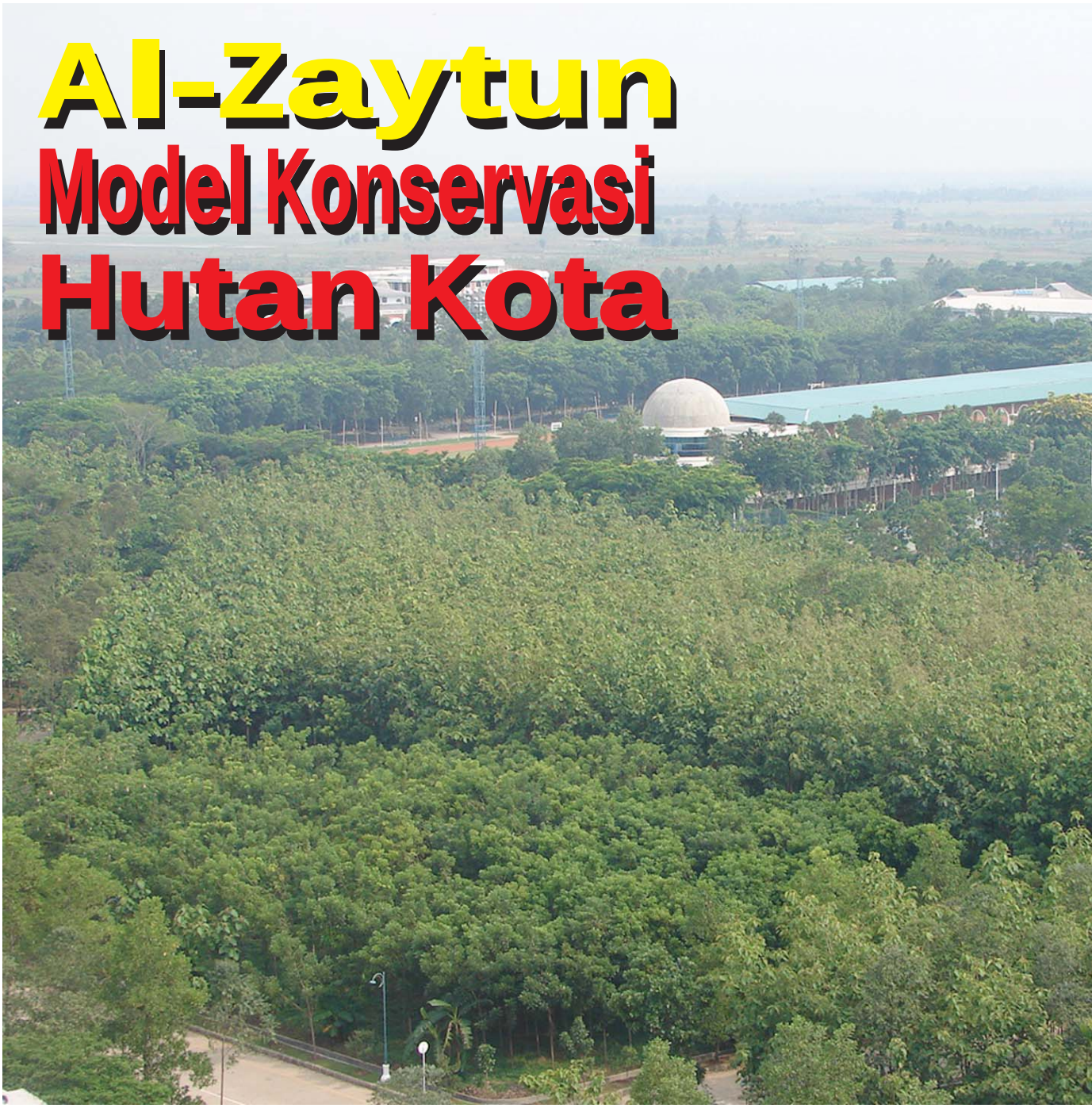

Kawasan Kampus Al-Zaytun yang tampak hijau.

Kampus Al-Zaytun adalah taman yang indah! Kampus ini patut dimeteraikan sebagai sebuah model konservasi hutan (taman) kota. Pernyataan ini tak terbantahkan tatkala kita menyelusuri dan menyaksikan kehijauan kawasan Al-Zaytun setelah ditata secara terencana sejak mula berdirinya. Penataan kawasan hijau Al-Zaytun dilandasi prinsip Syaykh Abdussalam Panji Gumilang bahwa menanam dan memelihara pepohonan (lingkungan) adalah salah satu ciri orang beriman.

= Reportase Bagian Dua =

foto: dok. al-zaytun

Reportase ini ditulis menjelang penyelenggaraan Conference of Parties Ke-13 United Nations Framework Convention on Climate Change, di Denpasar, Bali, 3-14 Desember 2007 yang dihadiri para pemimpin berbagai negara. Konferensi berniat menyelamatkan (menghijaukan) bumi dari kekuatiran terjadinya pemanasan global *(global warming)* yang berakibat pada perubahan iklim *(climate change)*.

Sementara, Al-Zaytun sejak mula telah berkarya menata alam dan lingkungan hidup sekitarnya tanpa harus menunggu pemimpin dunia berkumpul membahasnya.

Sebagai sebuah lembaga pendidikan terpadu, Al-Zaytun sejak awal telah giat berkarya membuat payung lingkungan di sekitarnya. "Sejak awal di sini kita buat payung. Delapan atau sembilan tahun ke depan, mungkin ada panas yang tidak diduga, kita telah sedia payung sebelum panas. Kalau orang-orang sedia payung sebelum hujan, kita sedia payung sebelum panas. Dan sekarang sudah ada payung-payungnya," jelas Syaykh Al-Zaytun Dr AS Panji Gumilang.

Komitmen itu diawali dengan program *takris* (bakti sosial) yang mewajibkan setiap calon penghuni menanam sedikitnya satu bibit pohon. Syaykh menargetkan penanaman dua juta pohon jati mas di kurang lebih 1.200 hektare areal Al-Zaytun.

Pada pertengahan November 2007 semua santri, kecuali SD, diajak kerja bakti menanam dan memelihara pohon di kawasan Al-Zaytun. "Kita ajak semua, kita kenalkan, itulah ciri orang beriman. Kalau kamu berdoa di gereja, solat di mesjid, itu masih minta, 'oh Tuhan, terimalah bakti kami ya Tuhan'. Belum tentu diterima. Tapi kalau kita menata lingkungan, sudah bisa kita lihat ,oh, bersih', Tuhan pun pasti senang. Malaikat lapor: Tuhan, lingkungan sana sudah bersih. Kalau kita solat di mesjid, itu masih robbana, oh Tuhan, terimalah kami. Belum tentu diterima. Kamu pura-pura, kan gitu. Tapi kalau membersihkan, memproning, indah, sudah. Kita sebut kepada anak-anak, itulah fikih lingkungan," kata Syaykh Panji Gumilang dalam percakapan dengan Wartawan Berita Indonesia di Wisma Al-Islah, Jumat 23 November 2007.

Menurut Syaykh, harus ada suatu sikap yang keras dan tegas menangani lingkungan. Dalam menjelaskan hal ini, Syaykh menguraikan bahwa Tuhan itu mempunyai dua macam sifat, yaitu sifat feminin dan maskulin. Sifat feminin adalah rahman rahim, kasih sayang, ghafur, pengampun, halus, lembut. Tapi juga punya sifat maskulin, harus keras, tegas, al mutakabir, artinya kenal harga diri. Kalau sudah harga diri, tak mau diusik, kena ancam, maskulin. "Tapi jangan dianggap Tuhan itu laki-laki dan perempuan," kata Syaykh mengingatkan.

Syaykh berharap, pemerintah mempunyai regulasi yang keras. Sebab kalau tidak, ya, semua bangsa ini akan terperosok kepada efek semua yang disebutkan dalam *global warming* itu.

Dalam pekan ini, Syaykh merenung seperti begini. Ternyata di kota dan di hutan, atau di desa dan di kampung sama tidak pedulinya terhadap tanaman. "Ada sebuah pohon di depan Istana, tidak jauh. Saya baca sebuah koran ibukota, mahoni besar tumbang, kemudian di pangkalnya itu ada api. Itu kan menandakan dibakar, tidak mungkin kalau tidak dibakar. Kan tiap hari orang melihat, satu pun tidak ada yang memadamkan, padahal musim hujan," ungkap Syaykh.

Di lingkungan kampung-kampung pinggir hutan juga begitu, sesukanya membakar hutan. Di kota, pohon yang peneduh dibakar, dirusak dan tidak ada orang peduli. "Itu kita renungi, kenapa begitu?" katanya.

Menurut Syaykh, sekarang harus disadarkan, bahwa membakar tanaman itu mestinya dilaknat. Membakar kayu itu wajib dilaknat. Regulasinya begitu, dilaknat. Karena dulu Nabi Muhammad membuat regulasi di negara Madinah yang begitu gersang, itu regulasinya begini. Madinah diharamkan untuk berbuat yang tidak senonoh. "Kita kira, tidak senonoh itu pergaulan dan sebagainya. Nabi Muhammad waktu itu tidak cerita itu," jelas Syaykh. Tapi poin pertama tidak senonoh itu: Tidak boleh memotong pohonan. Serius pada waktu itu, haram, diharamkan memotong pohonan. Memotong pohonan itu berbuat yang tidak senonoh.

"Kok pertamanya memotong pohonan. Bagaimana itu, kan iman namanya itu. Sekarang orang menebang tanaman merasa tidak dosa. Sepertinya yang banyak pahala itu masuk mesjid saja. Nebang tanaman tidak bersalah.

Syaykh juga mengungkapkan tentang orang yang mengatakan bahwa dia kapok, menanam angsana, karena angsana tumbang. Menurut Syaykh, angsana itu tidak mungkin tumbang kalau akarnya tidak dipotong-potong, melebarkan jalanan, akarnya dipotong. Melebarkan trotoar akarnya dipotong, mana bisa bertahan. Kemudian tidak diproning setiap saat. Jadi bukan angsananya, kitanya yang tidak mengenal tanaman.

Syaykh mengemukakan filosofi, kalau engkau menanam pohon, atau tanaman, kenali tanaman itu. Kalau engkau menanam pohon, kenali lingkungan. Kalau engkau mau menanam pohon, kenali musim. Kalau engkau menanam pohon dan tidak mengenal semua itu, kamu menanam dirimu sendiri. "Kenali, angsana, oh, tidak boleh terlalu menjuntai. Menjuntai, proning, proningnya mestinya jam 11 malam, jam tiga selesai angkut. Jadi tidak

foto: berindo wilson

Syaykh AS Panji Gumilang saat percakapan dengan wartawan Berita Indonesia.

Kalau engkau menanam pohon atau tanaman kenali tanaman itu, kenali lingkungan, kenali musim. Kalau engkau tidak mengenali semua itu, kamu menanam dirimu sendiri.

mengganggu lingkungan," jelasnya.

Syaykh Panji Gumilang memberi contoh Singapura yang menata lingkungannya, antara lain dengan menanam angsana. Mereka tidak mengeluh bahwa angsana itu gampang tumbang, karena mereka memeliharanya dengan baik.

Jadi, intinya, kata Syaykh, peliharalah lingkungan supaya manusia ini bisa berteduh. Jadi jangan pernah kapok menanam. "Karena angin, pohon tumbang, terus kapok. Nanam belum, sudah kapok. Salah memelihara kok kapok. Mahoni juga, kalau dibakar ya tumbang. Jati juga, kalau nggak dirawat tumbang," kata Syaykh.

Jadi mestinya, ujar Syaykh, tanaman itu ada perawatannya. Hutan kota itu wajib ada. Kemarin kita tengok di koran-koran orang banyak membagikan bibit-bibit kayu, ditanam di mana tidak dijelaskan. Menanam itu paling gampang, memeliharanya yang tidak gampang, perlu ketelitian ketekunan.

Perlu juga ada undang-undang yang tegas, baik itu hutan alam ataupun hutan kota. Menurut Syaykh, DKI Jakarta sudah bagus, tidak boleh nebang, harus ijin, tapi diluaskan lagi mestinya. Menurut Syaykh, orang punya tanaman, punya pohonan banyak, itu lebih daripada punya makanan segudang. Kenapa, kalau punya pohonan banyak, makanan segudang ada. Kalau tidak punya pohonan makanan segudang habis, dijual untuk beli ini itu. Kalau pohonan banyak yang segudang tetap. Karena apa, oh sejuk, enak adem, jangan dijual.

Syaykh menjelaskan tentang manfaat menanam pohonan. Antara lain, oksigen kita perbanyak. Tanaman memberi oksigen. Kalau kita banyak gerak memberikan karbon ke tanaman. Jadi saling beri. "Nah, baru bisa menciptakan ke depan itu air yang bagus. Sorga itu, saya pernah cerita dulu sorga itu, isinya air bersih, susu yang lezat, anggur yang enak diminum, madu yang lezat, buah-buahan yang enak. Sorga itu kan taman," urai Syaykh.

Syaykh mengajak agar setiap orang menciptakan taman-taman, mulai dari lingkungannya sendiri, tingkat desa, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, tingkat provinsi, tingkat negara. "Kan jadi keluarga sorga semua. Taman yang indah. Kalau sudah begitu, nanti setelah wafat, Tuhan kasih yang indah dan yang lebih indah lagi. Kalau di dunia nggak mau menata, malaikat lapor: Tuhan, jangan kasih dia taman yang indah itu," jelas Syaykh Panji Gumilang. *(Lebih lanjut pandangan Syaykh tentang penanaman pohon akan kami sajikan dalam Berita Utama edisi depan).*

Taman Indah Al-Zaytun

Keinginan Al-Zaytun untuk menata lingkungan dengan menanami berbagai tanaman yang bermanfaat tak terlepas dari posisi Indonesia yang dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki hutan tropis terluas yang menjadi paru-paru dunia, serta memiliki keanekaragaman hayati *(biodiversity)* hutan tertinggi di dunia. Namun dalam 35 tahun terakhir, kondisi hutan Indonesia telah rusak oleh ulah manusia yang dengan tamak dan rakus mengeksploitasi kekayaan alam tersebut dengan semena-mena.

Mencermati kondisi itu, sebagaimana disebut Syaykh Al-Zaytun Abdussalam Panji Gumilang tergerak untuk peduli *(awareness)* terhadap kondisi kehutanan itu dengan "Program Menghutankan Kembali Hutan Tropis Indonesia" yang pada tahap awal dimulai dengan menciptakan hutan taman tropis di areal Al-Zaytun. Program ini juga sekaligus berorientasi pendidikan yang ditujukan bagi para santri agar mereka memahami dan mengerti pentingnya hutan dan taman kota sebagai fungsi penyeimbang ekosistem.

Pengembangan kehutanan (penghijauan) di Al-Zaytun dikelompokkan dalam dua pengembangan yakni di areal kawasan pendidikan seluas 200 ha dan di areal kawasan penunjang seluas 1.000 ha. Pengembangan kehutanan di areal pendidikan ditujukan sebagai sarana belajar dan penelitian serta laboratorium alam bagi para santri dan mahasiswa. Sedangkan pengembangan

di lahan pendukung yaitu berupa hutan lindung berfungsi sebagai penyeimbang ekologis kawasan dan sebagai hutan tanaman industri (HTI) .

HTI itu dimaksudkan menjadi investasi jangka panjang guna mendanai kegiatan pendidikan di Al-Zaytun. Tanaman industri yang dikembangkan antara lain jati (tanaman utama) dan tanaman keras lainnya seperti *eucalyptus*, mahoni, sengon, akasia, gaharu, albasia serta tanaman hortikultura dan tanaman penguat teras.

Syaykh Panji Gumilang selalu menekankan bahwa generasi Al-Zaytun adalah generasi yang melestarikan hutan, bukan generasi yang merusak hutan. "Kita sebagai kader umat manusia sudah harus memulai untuk melestarikan kembali hutan Indonesia Raya ini mulai sekarang. Sehingga kelak, hutan itu akan mampu membiayai perjalanan selanjutnya," jelas Syaykh Al-Zaytun.

Kini, kegersangan kawasan ini telah menjadi sebuah cerita masa lalu tatkala Al-Zaytun belum berdiri. Kawasan ini telah berubah menjadi sebuah kawasan hutan yang asri, taman yang indah. Pencanangan Syaykh Panji Gumilang untuk menanam sebanyak 2 juta pohon di komplek dan sekitar Al-Zaytun menjadi suatu jaminan atas berlangsungnya penghijauan di kawasan ini. Pencanangan itu direspon dengan komitmen kuat oleh setiap eksponen Al-Zaytun untuk mewujudkannya.

Komitmen itu diawali dengan program *takris* (bakti sosial) yang mewajibkan setiap calon penghuni menanam sedikitnya satu bibit pohon.

Belum lagi target dua juta pohon tercapai, kondisi lingkungan kawasan ini sudah terlihat hijau dan asri. Dampaknya pun sudah langsung terasa, baik pada musim kemarau maupun musim hujan. Sebelumnya kawasan ini masih gersang hanya ditumbuhi ilalang, saat musim hujan akan kebanjiran dan air sulit meresap, sebaliknya pada musim kemarau akan kekeringan. Tapi saat ini, tatkala musim hujan, sebagian air dapat tertampung di lumbung air, danau, resapan air atau terserap oleh berbagai tanaman yang ada. Sebaliknya tatkala musim kemarau tiba, tidak lagi kekeringan karena cadangan airnya bisa dimanfaatkan untuk berbagai keperluan.

Bukan itu saja, seiring telah hijaunya lingkungan Al-Zaytun maka dengan sendirinya keseimbangan ekosistemnya pun kembali berlangsung alami. Dulu tatkala lingkungan Al-Zaytun belum hijau, tak seekor burung pun datang. Tapi sekarang ini, setiap pagi, tengah hari, sore hari, bahkan malam hari kita bisa mendengarkan nyanyian kicau burung. Satu contoh lain lagi, dulu di sini banyak tikus, diracun baru mati, tapi sekarang tidak perlu diracuni. Burung-burung malam yang berdatanganlah yang kemudian memangsa tikus sehingga keseimbangan ekosistemnya berlangsung kembali.

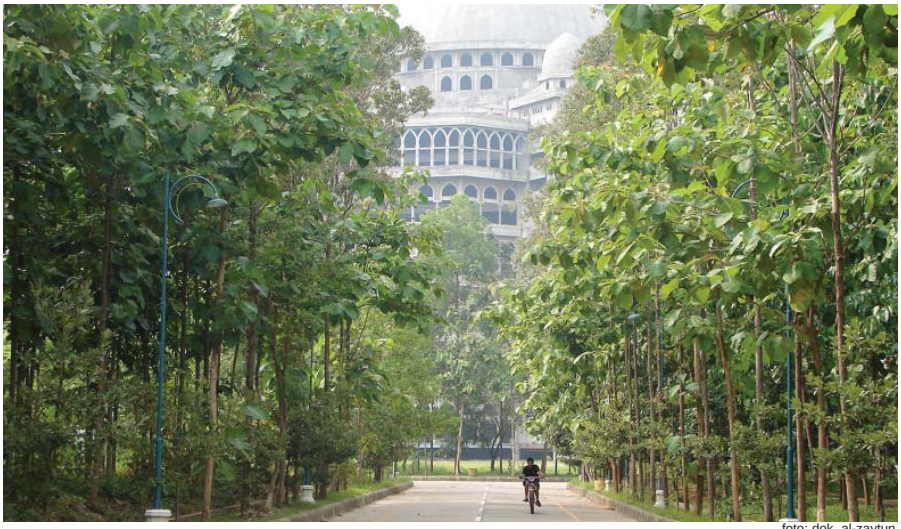

foto: dok. al-zaytun

Pohon jati ditanam rapi di setiap trotoar gedung di Al-Zaytun.

Penanaman berbagai jenis pohon hutan itu sendiri telah dimulai sejak tahun 1996, diawali dengan penanaman tanaman sawo kecik di sekitar jalan di trotoar jalan depan gedung Abu Bakar, terasering dan taman. Penanaman pohon jati dimulai pada tanggal 26 Februari 1999 yaitu jenis jati emas, dengan lokasi penanaman di Gedung Pembelajaran Umar Ibnu Khattab.

Untuk mencapai target 2 juta pohon itu, selain melalui program takris (bakti sosial) juga dipersiapkan berbagai sarana dan prasarana pendukung. Di antaranya membangun laboratorium kultur jaringan beserta *green house*-nya untuk penyediaan bibit unggul.

Di laboratorium kultur jaringan itu, tanaman yang dikembangkan bukan hanya tanaman jati (walaupun merupakan prioritas utama), tetapi juga berbagai tanaman langka, tanaman hortikultura, tanaman hias dan tanaman khas (zaytun dan tiin). Kapasitas produksi laboratorium tersebut menyediakan bibit mencapai 10.000 bibit per bulan.

Metode dan teknik kultur jaringan dipilih karena memiliki banyak keunggulan, seperti produksi tanaman dalam jumlah besar pada waktu singkat terutama varietas-varietas unggul, memperoleh tanaman yang bebas patogen, dan mempercepat pencapaian pertumbuhan tanaman. Selain menyediakan bibit untuk kebutuhan intern dan ekstern, laboratorium kultur jaringan Al-Zaytun juga berprogram untuk memperkaya keragaman jenis tanaman atau koleksi plasma nutfahnya.

Apa yang mendorong tercetusnya visi konservasi hutan di kawasan Al-Zaytun? Syaykh yang mencetuskan visi itu melihatnya dari sudut posisi potensial Indonesia sebagai salah satu sentral paru-paru dunia. Juga karena Indonesia memiliki berbagai jenis tanaman yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Kemudian dalam perkembangan sejarahnya, Indonesia menjadi daerah yang gundul akibat eksploitasi tanaman hutan secara berlebihan dan tak terkendali. Sementara di sisi lain penghijauannya dilupakan.

"Atas dasar fakta sejarah itulah kita ingin mengembalikan Indonesia sebagai paru-paru dunia," kata Syaykh AS Panji Gumilang. Dan itu mesti dimulai dari satu arena yang kecil seperti Al-Zaytun. Dalam hal memulai dari arena yang kecil itu, Syaykh tidak ingin disebut sebagai sponsor atau pelopor. "Kita hanya ingin memulai. Siapa tahu nanti banyak lembaga atau LSM-LSM atau pribadi-pribadi lain dan institusi-institusi lain yang mengikutinya," ujarnya merendah.

Ia ingin visi penghijauan itu menjadi kebiasaan bagi setiap orang. Apa yang baik telah dilakukan di kawasan Al-Zaytun bisa dijadikan contoh pembiasaan memelihara kelestarian hutan dan alam di sekitarnya.

Itulah pesan kuat yang kita petik setelah menyaksikan proses dan hasil penghijauan dan konservasi hutan dan taman di kawasan Al-Zaytun. Bahwa semua aktivitas di Al-Zaytun bermakna dan bermuara pada pembelajaran. Syaykh dalam beberapa kesempatan mengatakan pendidikan itu bermakna pembiasaan yang tak henti-hentinya. Jika warga negara tidak dibiasakan maka maknanya mereka tidak dididik. Muara segala kemajuan dan

kemunduran itu bisa dinilai dari nilai pendidikannya. Bagus pendidikan maka baguslah negara itu, kurang pendidikan maka kuranglah kemajuan negara itu.

Syaykh juga menguraikan betapa pentingnya peranan hutan dalam kehidupan manusia. Selain sebagai penyeimbang ekosistem, penentu siklus kehidupan, dan pengatur tata air, hutan juga berperan besar menghasilkan berbagai bahan baku produksi seperti kayu, rotan dan getah-getahan. Hutan, terutama hutan tropis, juga berfungsi sebagai paru-paru dunia.

Indonesia tercatat memiliki hutan tropis terluas nomor dua di dunia dengan kekayaan keanekaragaman (biodiversitas) hayati flora dan faunanya. Namun rahmat dari Tuhan itu ditelantarkan, dirusak, dan dieksploitasi tanpa nurani yang dampaknya akan dirasakan oleh sistem tata lingkungan dunia.

Seluruh tanaman yang ada di dunia ini pada hakikatnya bisa tumbuh di Indonesia. Tentunya dengan penanganan-penanganan khusus, termasuk di dalamnya penataan iklim khusus.

Ironisnya, eksploitasi hutan itu tidak diimbangi dengan usaha penanaman kembali. Akibatnya tingkat kerusakan hutan di Indonesia sudah mencapai ambang 2,4 juta ha/tahun dari luas hutan Indonesia yang 108,57 juta/ha. Jika tidak segera diatasi baik melalui reboisasi maupun rehabilitasi hutan, dalam jangka waktu sekitar 45 tahun, hutan Indonesia akan punah.

Berdasarkan data dari Forest Watch Indonesia, dari luas hutan ideal 30% dari luas daratan, luas hutan di Jawa kini sudah berada di bawah angka 14% dari luas daratannya. Di tingkat nasional, akibat kegiatan penebangan ilegal luas hutan Indonesia tinggal 40% saja. Diperkirakan, setiap menit hutan Indonesia kehilangan sekitar 5 ha.

Dampak dari kerusakan hutan sudah dirasakan oleh masyarakat. Ketika musim hujan tiba, banjir dan tanah longsor terjadi di mana-mana. Sebaliknya, ketika musim kemarau datang krisis air menghantui berbagai daerah. Berkurangnya kawasan hijau sebagai daerah resapan air mengurangi kemampuan tanah untuk menyimpan air.

Solusinya, reboisasi dan penghijauan harus dilakukan terutama untuk tanah-tanah kritis yang harus segera dihijaukan dan dipulihkan kesuburannya, terutama yang bisa membahayakan kelangsungan pembangunan dalam suatu wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS). Pelaksana utama dari reboisasi adalah pemerintah, sedangkan untuk penghijauan dilaksanakan oleh berbagai lapisan masyarakat dan dilakukan secara terpadu terutama oleh masyarakat dan para petani yang tinggal di daerah-daerah kritis.

Hijaunya lingkungan di Al-Zaytun telah mengembalikan

Tentu, mesti ada strategi yang juga memberi manfaat ekonomis sehingga masyarakat tidak merasa yang dilakukannya hanya sekadar kerja bakti. Salah satunya reboisasi dan penghijauan dalam terminologi hutan tanaman industri (HTI) melalui penanaman tanaman keras (tanaman industri). Tanaman industri berfungsi ganda, selain untuk penghijauan, secara ekonomis juga sebagai investasi ekonomis jangka panjang. Dana yang dihasilkan dapat dipergunakan untuk kepentingan bersama, seperti untuk pendidikan atau pembangunan di segala bidang.

Pohon Tiin dan Zaytun

Syaykh mengatakan, seluruh tanaman yang ada di dunia ini pada hakikatnya bisa tumbuh di Indonesia. Tentunya dengan penanganan-penanganan khusus, termasuk di dalamnya penataan iklim khusus. Dan untuk itu semua sudah ada ilmunya.

Pernyataan ini bukan sekadar basa-basi atau utopia. Melainkan sesuatu yang sudah dibuktikan. Bahkan, pohon tiin yang di negeri asalnya Timur Tengah ataupun di Eropa baru akan berbuah setelah berumur empat tahun, ternyata di Al-Zaytun umur empat puluh hari sudah mulai berbuah. Ini menandakan bahwa seluruh tanaman yang ada di dunia bila ditangani dengan seksama maka akan tumbuh dan berbuah dengan memuaskan di Indonesia.

Inilah sebuah 'keajaiban' yang kita

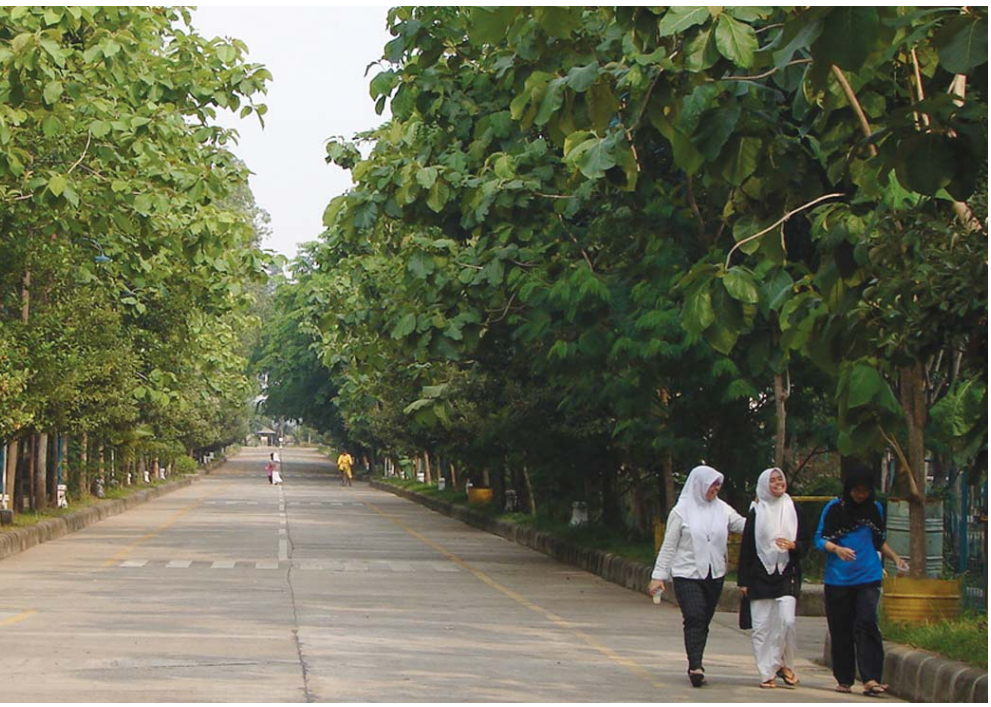

foto: dok. al-zaytun

an keseimbangan ekosistem di sana.

saksikan di Al-Zaytun. Keajaiban yang menyuguhkan kembali kepada kita tentang hasil uji coba (bermuatan pendidikan) yang dilakukan dengan tekun mengandalkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebuah tanaman khas Timur Tengah, yang di negeri asalnya itu telah dibudidayakan sejak 5.000 tahun lalu dan umat Islam pun mengenal karena nama Tiin disebut dalam Alquran.

Adalah Syaykh sendiri yang berinisiatif menggagas penanaman tiin dan zaytun di Al-Zaytun. Maka jadilah kebun tiin di seputar Al-Zaytun. Tumbuh subur dan berbuah sekali setahun. Buah tiin biasanya berbuah pada musim hujan, kemudian mulai matang setelah satu bulan. Biasanya buahnya matang secara berurutan.

Pada musim buah, akan menjadi kesan tersendiri bagi para pengunjung, terutama kaum ibu. Karena mereka setiap kali pulang akan menyempatkan diri mampir dulu ke Kantin untuk membeli oleh-oleh buah tiin.

Setiap musim hujan menjelang musim panas, kebun tiin yang ada di komplek Al-Zaytun selalu menghasilkan panen yang menggembirakan. Panen tumbuhan eksotik di Al-Zaytun dilakukan secara manual, menggunakan tangan. Pada musim berbuah, panen dilakukan tiap hari dan langsung dijual di kantin Al-Zaytun dalam keadaan masih segar.

Dua Juta Jati Emas

Pohon jati *(tectona grandis)* merupakan primadona tanaman hutan yang dikembangkan di Al-Zaytun. Pohon berdaun lebar ini bernilai ganda, selain bernilai ekonomi juga berfungsi sebagai pohon pelindung dan peneduh. Ditargetkan menanam dua juta pohon jati emas di kawasan Al-Zaytun.

Pohon jati yang ditanam pun bukan sembarang, tetapi merupakan bibit jati pilihan (unggul), yang pada awalnya didatangkan dari Myanmar dalam bentuk stek dan dari Cepu, Jawa Tengah.

Kemudian pembibitan pohon jati dikembangkan melalui teknologi kultur jaringan. Bibit-bibit jati yang dikembangkan dengan teknologi kultur jaringan itu merupakan hasil seleksi dari 250 ribu pohon jati yang ditanam di Al-Zaytun. Dari ribuan pohon unggul tersebut, berhasil diseleksi 572 pohon terbaik dengan berbagai nilai plusnya. Kemudian diseleksi lagi hingga hanya 286 pohon atau sekitar 50 persen saja yang kemudian dijadikan sebagai sumber *explant*.

Penebangan pertama jati di Al-Zaytun dilaksanakan pada 23 Juni 2001. Sebatang pohon jati yang berusia 28 bulan dengan ketinggian 10,20 m dengan diameter 8 cm, ditebang untuk dijadikan sebagai *explant* kultur jaringan.

Setelah berhasilnya kultur jaringan, maka Al-Zaytun tak perlu lagi mengimpor bibit-bibit jati dari luar, bahkan akan mampu menyediakan bibit pohon jati untuk menyukseskan obsesi penghijauan kembali Indonesia Raya.

Hal ini berarti, pembibitan pohon jati secara langsung telah memberikan sokongan ekonomi terhadap pendidikan. Bayangkan, harga sebatang pohon bibit jati yang siap tanam dijual antara Rp.15.000 hingga Rp.20.000,- Bahkan sebelumnya ketika Al-Zaytun mengimpor bibit jati dari Myanmar harganya mencapai 3 dollar Amerika, atau setara dengan Rp 27.000 (kurs 1 U$=Rp 9.000), yang berarti terjadi penghematan.

Jenis jati yang dikembangkan pun sangat unggul. Keunggulannya terlihat dari pertumbuhan (besar dan tingginya) yang lebih cepat dibandingkan dengan jati-jati lokal biasa. Juga jangka masa panennya yang begitu cepat berkisar antara 5 sampai 15 tahun. Itulah sebabnya penduduk setempat menyebut pohon-pohon jati yang ditanam di Al-Zaytun sebagai pohon emas.

Penyebutan nama itu, pada mulanya berawal dari penamaan pohon jati MAZ (Ma'had Al-Zaytun). Oleh penduduk setempat dilafalkan pohon jati mas. Kemudian dipopulerkan menjadi pohon jati emas. Pohon jati unggul yang bernilai ekonomi emas sekaligus berfungsi tinggi sebagai pohon penghijauan.

Penanaman pohon jati emas ini telah dilakukan sejak tahun 1999 sejalan dengan dimulainya pendidikan di Al-Zaytun. Pohon-pohon jati emas itu telah menghijaukan kompleks Al-Zaytun dan telah menjadi daya tarik tersendiri. Pohon-pohon jati berdaun lebar dan berbatang "bongsor" itu tampak tumbuh subur menghiasi keasrian dan kesejukan komplek ini. Sehingga bagi setiap pengunjung, pemandangan pohon-pohon jati itu telah menjadi daya tarik tersendiri yang antara lain mengundang keingintahuan tentang keunggulannya.

Keingintahuan itu juga didorong oleh belum banyaknya upaya pengembangan jati emas di Indonesia. Jangankan bagi awam, bahkan beberapa peneliti seperti dari Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia (PPKKI), PT. Perkebunan Nusantara XII dan Seameo Biotrop, Bogor, pernah datang ke Al-Zaytun untuk menyaksikan dari dekat pertumbuhan jati.

Juga beberapa Pemerintah Daerah yang berkunjung ke Al-Zaytun dengan spontan menyatakan ketertarikan mereka untuk melakukan kerja sama dalam pengembangan jati. Mereka tertarik atas keunggulan jati emas dibandingkan dengan jenis jati lainnya.

Seperti jati lokal yang dianggap unggul yang dijumpai di Cepu, Jawa Tengah biasa dipanen dengan diameter 45 cm kalau usianya sudah 30-45 tahun. Sedangkan jati emas dapat dipanen

Pada musim hujan, kawasan Al-Zaytun tidak lagi kebanjiran. foto: berindo wilson

Apa yang ada di komplek ini didedahkan (diperlihatkan) untuk memberikan inspirasi kepada santri bahwa bila kita berminat mengolah bumi, maka Allah akan memberikan kemakmuran.

setelah berumur berkisar 5-15 tahun. Lebih cepat dari jati di Myanmar, India dan Thailand yang bermasa panen antara 15-25 tahun.

Dalam upaya pengembangan jati emas ini, tim pertanian Al-Zaytun melakukan berbagai uji coba dan studi banding. Mereka antara lain studi banding melihat pohon jati super yang ditanam di Balung Estate, Sabah, Maret 2000.

Dari Sabah, pihak pertanian Al-Zaytun belajar bahwa ternyata jati memang merupakan tanaman potensial yang bisa ditumpangsarikan dengan tanaman kakao, sawit, aren, serta rotan.

Lalu di Al-Zaytun, jati yang telah cukup tinggi disulam dengan tanaman lada perdu. Lada ini pada prinsipnya perlu pelindung di saat-saat pertumbuhannya sehingga mengurangi penguapan.

Hal ini memenuhi harapan bahwa Al-Zaytun ingin memanfaatkan secara produktif setiap jengkal tanah yang ada di arena pendidikan ini.

Menurut Syaykh Panji Gumilang, keseluruhan apa yang ada di komplek ini didedahkan (diperlihatkan) untuk memberikan inspirasi kepada santri bahwa bila kita berminat mengolah bumi, maka Allah akan memberikan kemakmuran.

Budidaya Gaharu

Selain membudidayakan jati, Al-Zaytun juga membudidayakan gaharu. Pembibitannya dilakukan melalui kultur jaringan. Jenis tanaman gaharu yang sedang dikembangkan dari jenis *Aquilaria filaria*.

Jenis gaharu lainnya yang dikembangkan adalah *Aquilaria malaccensis*, gaharu dari Jambi dalam bentuk stek dan bibit cabutan. Gaharu dari Jambi ini juga akan ditanam berbarengan dengan bibit dari kultur jaringan. Penanamannya dilakukan di bawah tanaman peneduh berupa pohon *eucalyptus grandis* yang telah berumur kurang lebih 2 tahun.

Pembudidayaan gaharu ini dilatarbelakangi nilai ekonomis pohon ini. Menurut Syaykh, satu di antara hasil hutan Indonesia yang memiliki nilai ekonomis tinggi adalah kayu gaharu. Hasil utama dari gaharu bukan kayunya, melainkan gubal yakni gumpalan berwarna coklat muda, coklat kehitaman sampai hitam yang terbentuk pada lapisan kayu gaharu beraroma wangi.

Terjadinya gumpalan atau padatan yang beraroma wangi itu disebabkan adanya pelapukan yang diakibatkan oleh serangan jamur. Namun tidak semua tanaman gaharu dapat menghasilkan gubal gaharu. Dalam gubal gaharu tersebut beragam kandungan zat seperti agarofuran, agarospirol, jinkohol, jinkohol-eremol, kusunol, dibydrokaranone, jinkohol II, oxo-agarospirol dan lain-lain.

Selain itu, gaharu mengandung substansi aromatik yang termasuk dalam golongan *sesquiterpena* dengan struktur kimia yang sangat spesifik, sehingga sampai saat ini tidak dapat dipalsukan atau dibuat sintetis. Itulah yang membuat harga jual gaharu menjadi semakin mahal.

Sekadar catatan, harga jual gubal gaharu saat ini berkisar antara US $ 25 hingga US $ 500 per kilogram, tergantung dari kualitasnya.

Aroma wangi yang terdapat pada gubal gaharu itu banyak dipergunakan untuk keperluan ritual agama, juga sebagai bahan baku industri kosmetika seperti parfum.

Bukan itu saja gubal gaharu ini juga dipergunakan untuk bahan baku obat-obatan seperti obat rematik, sakit perut, asma, malaria, tonikum serta pengobatan setelah melahirkan. Banyaknya manfaat dari gubal gaharu menjadikan permintaan pasar luar negeri terus meningkat, seperti India, Cina, Korea, Jepang, Arab Saudi ataupun Singapura.

Apalagi semenjak tahun 1994 dalam konferensi CITES II di Florida, kuota gubal gaharu yang ditetapkan untuk Indonesia sebanyak 250 ton per tahun. Namun sangat disayangkan, tingginya permintaan dan mahalnya harga gubal gaharu telah membuat banyak orang untuk mengeksploitasinya tanpa adanya regenerasi tanaman.

Akibatnya populasi gaharu semakin menyusut. Saat ini, hanya Aceh dan Irian Jaya yang memiliki tanaman gaharu. Jika ini dibiarkan tanpa adanya regenerasi tanaman tidak mustahil kayu gaharu tinggal menjadi "kayu kenangan" Indonesia. Apalagi pertumbuhan gaharu sangat lambat. ■

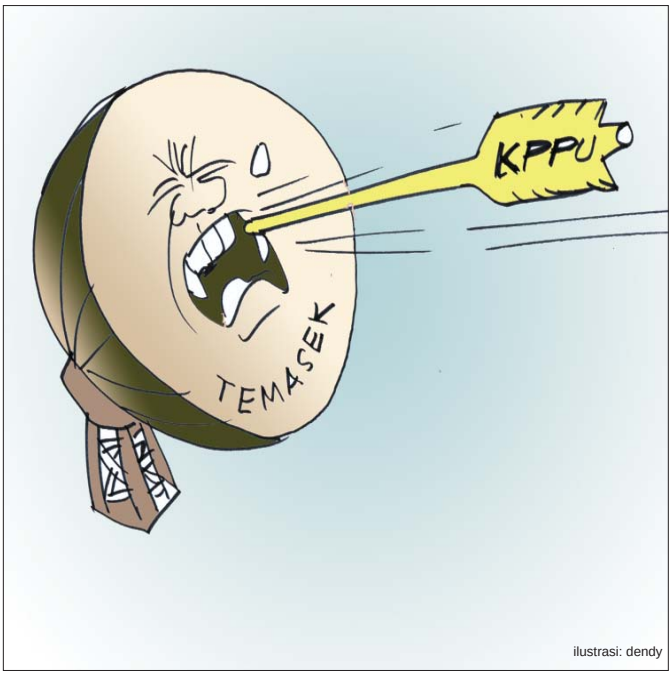

ilustrasi: dendy

Babak Baru Nasib Temasek

KPPU semakin strategis sebagai pengadil untuk memastikan iklim berusaha berlangsung secara sehat. Siapapun harus berhati-hati jika ingin memonopoli atau membentuk kartel.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memenuhi janjinya mengumumkan hasil pemeriksaan akhir terhadap tudingan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh Temasek Holding, sebuah badan usaha milik pemerintah Singapura. KPPU Senin (19/11) memvonis Temasek yang lewat anak-anak usahanya menggurita di Indonesia, bersalah.

Vonis sontak membuat lantai Bursa Efek Jakarta (BEJ) sempat bergetar. Para pemburu rente segera meraup keuntungan sebanyak-banyaknya, memanfaatkan kepanikan investor usai pengumuman terpenting dalam peta perjalanan industri jasa telepon selular (ponsel) tersebut.

IHSG sempat terkoreksi oleh penurunan sesaat kapitalisasi saham PT Telkom dan PT Indosat, walau kemudian segera pulih kembali. Analis beralasan, pelaku pasar akan mengabaikan permasalahan yang membelit Telkom dan Indosat, sebab vonis tidak akan memengaruhi bisnis kedua perusahaan telekomunikasi papan atas tersebut.

Dengan demikian, vonis ditengarai bakal menghambat minat asing berinvestasi di Indonesia, terbantahkan.

Jika kesimpulan KPPU benar adanya hingga berhasil memperoleh kekuatan hukum yang tetap, peta persaingan industri ponsel dipastikan akan semakin menarik, kondusif, dan tarif terjangkau oleh masyarakat luas. Sebab, tarif ponsel saat ini yang dikenal tertinggi di dunia, masih sangat berpeluang diturunkan hingga separuhnya.

Keputusan Yang Independen

Sebagai pengadil praktik persaingan usaha tidak sehat, KPPU pernah membuktikan kiprahnya dengan menghukum industri jasa penerbangan supaya menurunkan tarif, hingga kemudian dikenallah istilah maskapai berbiaya murah.

Kali ini, lewat pengumuman yang disampaikan oleh Ketua Majelis KPPU Syamsul Ma'arif, dinyatakan telah terjadi struktur kepemilikan silang *(cross ownership)* pangsa pasar ponsel secara bersama-sama yang terus meningkat antara Telkomsel dan Indosat. Sampai-sampai kedua operator menguasai 83 persen pangsa pasar.

KPPU menyatakan, Temasek Holdings mempunyai pengaruh yang kuat dalam setiap keputusan Telkomsel dan Indosat. Bahkan, "Temasek sengaja menghambat perkembangan Indosat, sehingga tidak efektif bersaing dengan Telkomsel. Akibatnya, pasar industri seluler di Indonesia menjadi tidak kompetitif," ucap Syamsul.

Telkomsel yang menguasai 55 persen pangsa ponsel di Indonesia, sahamnya 35 persen dimiliki oleh Singtel (sisanya 65 persen dimiliki PT Telkom), dan Temasek memiliki 56 persen saham pada Singtel. Sedangkan Indosat yang menguasai 27 persen pangsa ponsel, sahamnya 41 persen dimiliki oleh ST Telemedia melalui ICL Mauritius, yang 100 persen sahamnya di miliki Temasek.

KPPU menyimpulkan, struktur kepemilikan silang Grup Temasek menjadikan perusahaan ini tampil sebagai penentu tarif industri ponsel, dan menempatkan Telkomsel sebagai pemimpin pasar yang menetapkan tarif sesukanya hingga merugikan konsumen. "Perhitungan KPPU, konsumen mengalami kerugian Rp 14,7 triliun hingga Rp 30,8 triliun dalam rentang periode 2003-2006," kata Syamsul.

Indikasi pengerdilan terlihat dari terhambatnya perluasan cakupan Indosat, padahal industri seluler adalah bisnis jaringan. "Empat Direksi Indosat telah melapor tentang keterlambatan pembangunan BTS ke STT tapi tidak ada *action* sama sekali," tambah anggota KPPU lain, Erwin Syahrial.

KPPU menyimpulkan Temasek bersalah karena terbukti melanggar pasal 27 huruf a UU No. 5/1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. KPPU lalu memerintahkan Temasek dan sembilan anak usahanya membayar denda kepada negara masing-masing Rp 25 miliar. Temasek juga diperintahkan melepaskan kepemilikan saham pada salah satu dari keduanya, paling lambat dua tahun sejak vonis.

Kuasa hukum Temasek Holdings Company, Todung Mulya Lubis menanggapi vonis dengan berencana melakukan banding. Keputusan itu menurutnya menjadikan Indonesia sebagai negara yang tidak nyaman untuk berbisnis. "Padahal, pemerintah inginnya penanaman modal masuk ke Indonesia," kata Todung.

"Kami tidak bersalah. Keputusan tidak dapat dimengerti dan mengabaikan fakta," kata Simon Israel, Direktur Eksekutif Temasek di Singapura.

Menanggapi vonis, Menkominfo Muhammad Nuh meminta semua pihak yang terkait harus saling menghargai berbagai pendapat serta langkah-langkah hukum yang dilakukan masing-masing.

"Tentunya hasil putusan ini akan menimbulkan pro kontra di masyarakat. Namun yang lebih penting, bagaimana semua pihak menghasilkan suatu bentuk putusan yang dapat memperjuangkan rakyat," kata Nuh.

Nuh berharap KPPU tetap menjaga independensi dan objektivitasnya dalam membuat keputusan. Kata dia, KPPU juga harus konsisten dengan payung hukum guna menghindari intervensi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Senada dengannya, Menneg BUMN Sofyan A. Djalil menegaskan instansinya tidak campur tangan atas keputusan yang diambil KPPU. "Itu bukan sesuatu yang final, karena Temasek masih memiliki kesempatan untuk melakukan banding," ucap Sofyan, yang mantan Menkoinfo ini. ■ **RON, HT**

Kasus Adelin Lis Bikin Miris

Vonis bebas terhadap terdakwa pembalakan liar Adelin Lis yang dijatuhkan PN Medan (5/11), menjadi pertanda kalau mafia peradilan masih sangat menentukan wajah penegakan hukum.

Sesungguhnya tak terlalu istimewa kasus pembalakan liar yang didakwakan terhadap Adelin Lis, Direktur Keuangan PT Keang Nam Development Indonesia (KNDI) salah satu anak usaha PT Mujur Timber Grup milik keluarga Adelin raja kayu Sumatera Utara. Kecuali besarnya kerugian negara yang didakwakan.

Resminya Adelin Lis didakwa tidak membayar dana reboisasi (DR) dan iuran provisi sumber daya alam (PSDA) atas nama PT Keang Nam dan PT Inanta Timber. Tunggakan DR dan PSDA PT Keang Nam mencapai 336,6 miliar rupiah, sedangkan PT Inanta Timber 256,72 triliun rupiah.

Untuk semua kesalahannya jaksa menuntut Adelin hukuman 10 tahun penjara, denda Rp 1 miliar, dan membayar kerugian negara Rp 119,8 miliar dan 2,9 juta dollar AS.

Proses penangkapan Adelin yang berlangsung di Beijing China pada 8 September 2006 saat hendak memperpanjang paspor ke Kedubes RI Beijing sedikit luar biasa. Sebab Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang sedang berada di Helsinki, Finlandia ketika itu menyatakan kegembiraan atas penangkapan Adelin. "Saya merasa gembira dan menyampaikan penghargaan kepada penegak hukum kita yang telah dapat menangkap seseorang yang diduga sebagai arsitek atau pelaku utama kejahatan *illegal logging*," ucap Presiden Senin (11/9) malam waktu Helsinki.

Adelin memang sedang "kurang beruntung", sebab Pemerintahan SBY sedang gencar-gencarnya memberantas kasus-kasus *illegal logging* yang terjadi di berbagai daerah. Saat berbicara di Helsinki, Presiden meminta penegak hukum agar memproses kasus pembalakan liar dengan sangat serius, menjatuhkan hukuman yang benar-benar setimpal, serta berupaya keras mengembalikan kekayaan negara yang dirampok para pelaku kejahatan.

Sebagian kasus pembalakan liar ada yang bisa dijerat. Tetapi sebagian besar malah tak tersentuh hukum. Raja kelapa sawit Darianus Lungguk Sitorus adalah contoh figur sial yang "dipaksakan" terjerat. Sedangkan dua industri *pulp* dan kertas yang juga diduga turut membalak, yakni RAPP dari kelompok Raja Garuda Mas (RGM) milik Sukanto Tanoto dan IKPP dari kelompok Sinarmas milik Eka Tjipta Widjaja, sepertinya malah tak tertangani dengan baik.

Khusus kasus Adelin, setelah hakim ketua mengetukkan palu pembebasan, kegemparan melanda. Adelin dinyatakan tidak terbukti menebang kayu di luar area rencana kerja tahunan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Adelin hanya terbukti bersalah tidak menaati peraturan tebang pilih tanam Indonesia.

Karena kesalahan bukan merupakan wilayah hukum pidana, melainkan masalah administrasi maka yang patut menghukum Adelin adalah Menteri Kehutanan.

Pengaruhi Proses Pengadilan

Bebasnya Adelin bisa jadi karena Kejaksaan membuat dakwaan yang sumir. Seorang oknum jaksa disebut-sebut tak melengkapi prosedur P-21 pada tahap pra penuntutan.

"Inisialnya F, jaksa pra penuntutan peneliti berkas perkara. Ada prosedur dalam penelitian yang tidak sepenuhnya dipenuhi. Ada beberapa *check list* ketentuan yang mestinya dilakukan tapi tidak dilakukan," simpul Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan MS Rahardjo Jumat (16/11), usai melakukan eksaminasi terhadap JPU, dipimpin oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Abdul Hakim Ritonga.

Tetapi kesalahan yang lebih parah adalah, beberapa hari sebelum vonis bebas diketuk sudah tersedia surat eksekusi pembebasan Adelin dari Rutan Tanjung Gusta, Medan. Adelin divonis 5 November pukul 13.00 WIB, malamnya pukul 23.30 dilepaskan dengan Surat Eksekusi No. 2240/Pid B/2007 tertanggal 1 November 2007, dikeluarkan oleh Pengadilan. Rutan Tanjung Gusta juga membuat berita acara pembebasan dua hari sebelum vonis, didasarkan atas putusan pengadilan nomor W2.E11.PS.01-217/2007 tertanggal 3 November 2007. Semua surat menjadi janggal karena Adelin divonis bebas 5 November 2007.

Semakin aneh bin ajaib manakala surat pencekalan terhadap Adelin, kali ini terkait dengan dugaan pencucian uang, baru diberikan kepada pihak imigrasi pada 7 November 2007.

Kepolisian memang masih punya dakwaan lain untuk menjerat Adelin, yakni dugaan kejahatan pencucian uang - masih terkait dengan pembalakan hutan. Tetapi sangkaan ini tak disertakan sejak awal persidangan sebagai tuduhan berlapis. Ketika sangkaan kedua hendak dikenakan, Adelin sudah keburu kabur.

Adelin pun menghilang dan tak bersedia menyerahkan diri. Ia disebut pengacaranya mengalami trauma sebab selama 14 bulan ditahan di Kepolisian pernah dirantai selama dua hari, dan selama enam bulan tidur di lantai tidak diberi tikar untuk alas tidur.

ilustrasi: dendy

Bebasnya Adelin juga disebabkan kelima hakim yang mengadili tak berusaha menggali kebenaran fakta-fakta di persidangan.

Yang juga tak kalah runyam adalah sikap Menteri Kehutanan MS Kaban, yang bersedia menjawab surat dari kantor pengacara Hotman Paris Hutapea padahal kasus sedang diproses secara hukum. Perilaku seperti ini bisa dikategorikan sebagai usaha mempengaruhi proses peradilan. Sebagaimana berlaku di dunia pers, wartawan tidak diperkenankan melakukan penghakiman lewat media *(trial by the press)*.

Dan terbukti, pada akhirnya surat Kaban bernomor S.613/Menhut-II/2006/ 27 September 2006, yang isinya menyebutkan Adelin hanya melakukan pelanggaran administrasi menjadi alat bukti terkuat yang diajukan oleh Hotman Paris. Hakim pun turut mendasarkan putusan bebasnya dengan "fatwa" dari Kaban ini, dimana Adelin disebutkan hanya melakukan kesalahan administrasi bukan pembalakan.

Keinginan Presiden Tak Terpenuhi

Peta perjalanan kasus Adelin Lis seolah membenarkan pendapat seorang perwira polisi di Markas Besar Kepolisian RI, yang menyebutkan Adelin sudah lama memupuk kekuatan politik dan pengaruh di Sumatera Utara.

"Kekuasaan Adelin memang bukan main. Dia bisa memindahkan Kapolsek, Kapolres, bahkan Kapolda. Itu saya lihat dan dengar sejak tahun 1994," ujar sang perwira polisi tentang Adelin, yang juga sudah memupuk harta kekayaan di mana-mana.

Tinggal kini para anak bangsa saling menyalahkan, sibuk mencari kambing hitam, yaitu memeriksa oknum-oknum sipir penjara, polisi, jaksa, dan hakim.

Wakil Direktur Reserse Umum Polda Sumatra Utara AKB Arsianto dicopot dari jabatannya karena lalai menangkap Adelin pascavonis bebas PN Negeri Medan. Tetapi kelima hakim yang mengadili justru memperoleh promosi.

Ahli hukum senior Benyamin Mangkudilaga turut berkomentar dengan suara keras. Ia menyatakan sangat muak dengan berbagai kasus pembalakan liar apalagi yang melibatkan tersangka Adelin Lis. "Tulis, sudah muak aku menyaksikan kasus ini," kata Benyamin.

Advokat papan atas yang kini anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Adnan Buyung Nasution menilai ketidakmampuan Kepolisian menemukan keberadaan Adelin Lis dapat berdampak pada citra Indonesia dalam komitmen memberantas kejahatan transnasional. "Perkara Adelin Lis bagi saya paling menggemaskan. Karena di satu pihak pemerintah punya program-program transnasional untuk ikut pemberantasan pembalakan liar dan pencucian uang. Tetapi sampai saat ini tidak mampu mengusut keberadaannya," kata Buyung.

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring mengaku ternganga terhadap putusan bebas Adelin Lis. "Kami tetap percaya kepada para pelaksana hukum, tapi rasanya kita semuanya ternganga dengan pembebasan Adelin Lis," ujar Tifatul.

Wakil Ketua DPR RI Soetardjo Soerjoguritno mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengganti Menteri Kehutanan (Menhut) MS Kaban.

Senada dengan Sutardjo, dua anggota Komisi III DPR RI Gayus Lumbuun dan Benny K Harman berpendapat Kabinet harus bersih dari orang-orang bermasalah apalagi yang cenderung membebani Presiden RI.

"Menhut MS Kaban memang sebaiknya diberhentikan karena secara politik telah membebani Presiden Yudhoyono dengan sikapnya mengintervensi putusan pengadilan," kata Benny K Harman.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Polisi Sisno Adiwinoto turut meminta agar Menhut Kaban introspeksi. "Pernyataan Menhut agar Jaksa dan Polisi introspeksi merupakan hal yang terbalik, seharusnya Menhut yang introspeksi," kata Sisno. Menurut Sisno polisi hanya membantu penegakan hukum khususnya UU tentang kehutanan, terutama pasal 50 ayat 2 berbunyi pemegang ijin HPH tidak boleh melakukan pengrusakan hutan dan hutan harus tetap lestari.

Sisno berharap hakim pun tidak hanya duduk di belakang meja tetapi harus melihat fakta obyektif di lapangan dan kondisi hutan yang sesungguhnya. "Karena pidana materiil, kita melihat fakta obyektif materiil, lihat di lapangan, hutan yang sudah rusak," jelas Sisno. Ia mengakui masih terjadi perbedaan persepsi pembalakan liar. Bila ada ijin HPH dianggap tidak terjadi pembalakan liar. Padahal dalam UU tentang kehutanan pemegang HPH wajib menjaga hutan agar tetap lestari.

Tetapi MS Kaban yakin pembebasan Adelin tidak akan mempengaruhi upaya pemerintah dalam menegakkan hukum di sektor kehutanan. Kaban mendasarkan pada fakta industri penggergajian kayu *(sawmill)* liar di daerah sumber kegiatan *illegal logging* sudah tutup, dan kapal yang mengangkut kayu ilegal sudah tidak berkeliaran lagi. "Pemerintah serius dan tegas dalam pemberantasan pembalakan haram, sebagai salah satu upaya melindungi kawasan hutan negara dan memperkuat daya saing produk kayu olahan ekspor Indonesia di pasar internasional karena selama ini negara pesaing banyak memanfaatkan kayu murah yang ilegal dari Indonesia," ujar politisi asal Partai Bulan Bintang (PBB) ini.

Pengacara Adelin, Hotman Paris Hutapea ketika bertemu Komisi Yudisial menjelaskan, selama persidangan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam surat dakwaan mengakui Adelin memiliki izin Hak Pengolahan Hutan (HPH) seluas 58.590 ha di daerah Mandailing Natal. Berarti terdakwa tidak bisa dikenakan tuntutan pembalakan liar.

"Dalam UU, definisi pembalakan liar adalah melakukan penebangan tanpa izin, kalau izin HPH-nya ada dan diakui di pengadilan jelas bukan pembalakan liar," kata Hotman.

JPU juga menyebut perusahaan Adelin melakukan penebangan di dalam areal HPH. JPU tidak pernah mendakwa adanya penebangan di areal hutan lindung ataupun kawasan taman nasional Mandailing Natal seperti yang diungkapkan dalam pemberitaan media massa.

Kelemahan dakwaan JPU kata Hotman adalah mendakwa melakukan pembalakan liar karena menebang di luar Rencana Kerja Tahunan (RKT) perusahaan, akan tetapi masih di dalam areal HPH. Pasalnya, dalam Pasal 80 ayat 2 UU No 41/1999 tentang kehutanan diatur tidak ada sanksi pidana menebang di luar RKT asalkan masih di dalam HPH. Hal ini hanya akan dikenakan sanksi administrasi sebesar 15 kali biaya iuran HPH. Hotman menyebutkan pemerintah justru bisa mendapatkan uang lebih besar kalau menerapkan sanksi adminitrasi. ■ HT

Benda Bersejarah pun Dipalsukan

Pencurian benda bersejarah di Museum Radya Pustaka Solo terbilang unik. Yakni menggantikannya dengan barang-barang tiruan atau dipalsukan. Sejumlah arca curian ditemukan di kediaman pengusaha Hashim Djojohadikusumo yang juga kolektor benda antik. Pengusutan dan pengembangan kasus ini terus dilakukan. Sejumlah tersangka ditangkap, termasuk Kepala Museum, KRH Darmodipuro.

Masyarakat awam pengunjung Museum Radya Pustaka Solo, Jawa Tengah boleh jadi terkagum-kagum menyaksikan benda-benda bersejarah koleksi museum tersebut. Termasuk sejumlah arca peninggalan abad ke IV hingga X Masehi yang ada di sana. Diantaranya Arca Batu Siwa Maha Dewa, Arca Batu Durga Mahesa Suramardhini, Arca Agastya (Siwa Maha Guru), Arca Mahakala, Arca Durga Mahesa Suramardhini II, Arca Chyani Buddha, Arca Saraswati, dan Arca Bodhisatwa Awalogiteswara yang berusia ratusan tahun.

Namun belakangan kekaguman masyarakat berubah menjadi kekecewaan. Bahkan juga menimbulkan rasa keprihatinan. Pasalnya, sejumlah arca dan benda bersejarah lainnya yang mereka kagumi di kota budaya itu ternyata benda-benda tiruan alias palsu atau dipalsukan.

Misteri pencurian dan pemalsuan benda-benda purbakala dalam kurun waktu tiga tahun terakhir ini terungkap setelah pihak kepolisian Poltabes Solo melakukan pengusutan. Polisi pada September 2007 lalu mendapat laporan dari Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) Jawa Tengah mengenai pemalsuan koleksi benda-benda bersejarah tersebut. Sedangkan pihak BP3 Jateng sebelumnya memperoleh informasi dari Andrea Amborowatiningsih (24) mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.

Andrea Amborowatingsih, yang akrab disapa Ambar, pernah bekerja di museum tersebut sebagai pegawai honorer Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Pemerintah Kota Solo. Saat itu Ambar mendapati beberapa koleksi di museum tersebut raib dan berganti dengan barang tiruan alias dipalsukan.

Yang pertama kali diketahui hilang adalah piring keramik China dengan ciri warna putih kembang biru tua. Piring yang semula tergantung di tembok museum diketahui Ambar tidak ada di tempat tanggal 16 Agustus 2005. Hal itu kemudian disampaikan kepada Kepala Museum Radya Pustaka, KRH Darmodipuro. Namun dijawab tidak hilang.

"Besoknya piring itu sudah ada lagi, tetapi modelnya sudah berbeda. Bentuknya lebih kecil dari piring aslinya, warna dan gambar dalam piring sangat berbeda," kata Ambar. Sampai dia diberhentikan sebagai pegawai museum pada akhir Mei 2006, Ambar dan pegawai lain juga mendapati beberapa koleksi museum telah berganti dengan tiruan.

Belakangan, pemalsuan koleksi Museum semakin menjadi. "Makin banyak koleksi asli yang raib dan berganti tiruan, saya meminta agar dilakukan registrasi ulang terhadap koleksi di museum. Tetapi ternyata saya malah diberhentikan," ujar Ambar seperti ditulis *Kompas* (12/11).

Ambar menyampaikan informasi tersebut kepada dosennya, saat ia kuliah di UGM. Hingga akhirnya, BP3 turun tangan pada bulan September 2007 lalu. Tim BP3 mendatangi museum pada tanggal 26 September 2007 bersama beberapa anggota intelijen dari Poltabes Solo.

Dari pengumpulan data diketahui ada 11 koleksi museum yang dipalsukan. Meliputi delapan arca peninggalan sekitar Abad IV-X Masehi, nampan besar dari keramik, genta atau lampu gantung dari perunggu, dan tatakan buah dari kristal hadiah Napoleon Bonaparte kepada Paku Buwono IV.

Polisi yang melakukan pengusutan kemudian menangkap sejumlah tersangka. Yakni Kepala Museum Radya Pustaka Solo KRH Darmodipuro (69) yang akrab dipanggil Mbah Hadi, Suparjo alias Gatot, petugas keamanan museum, Jarwadi, juru pelihara museum, dan Heru Suryanto, seorang 'makelar' barang antik yang diduga keras terlibat dalam kasus pencurian dan pemalsuan benda-benda di museum.

Kepala Poltabes Solo Komisaris Besar Luthfi Luhbianto menyatakan, para tersangka dijerat Pasal 26 Undang-Undang No 5 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya. Yakni melakukan tindak pidana dengan sengaja memindahkan, mengubah, dan memperdagangkan atau memperjual-belikan atau memperniagakan benda cagar budaya tanpa ijin dari pemerintah.

Para tersangka diancam hukuman penjara paling lama 10 tahun karena mencuri arca yang berusia ratusan tahun. "Kami menjeratnya dengan UU Cagar Budaya, dan Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni pencurian dengan pemberatan," katanya.

Salah satu dari 8 Arca di Museum Radya P

Kepala Satuan Reskrim Poltabes Solo Ajun Komisaris Syarif Rahman menambahkan, selain untuk mempermudah penyidikan, penahanan para tersangka terpaksa dilakukan karena dikhawatirkan mereka menghilangkan barang bukti dan melarikan diri.

Diperoleh informasi sementara, tersangka Heru Suryanto menjual arca tersebut Rp 80 juta hingga Rp 280 juta. Namun pihak kepolisian masih akan melakukan konfirmasi lagi kepada pemegang atau pembeli terakhir.

Poltabes Solo juga berencana memanggil pembuat arca palsu museum Radya Pustaka untuk menguak misteri pencurian sekaligus pemalsuan lima arca kuno koleksi museum ini.

"Dari informasi yang berhasil dihimpun, ada dua pematung asal Muntilan, Magelang, yang telah membuat

Pustaka Solo yang hilang kemudian dipalsukan.

foto: repro kompas

tiruan kelima arca ini," kata Syarif Rahman, di Solo, Jumat (23/11).

Menurut Syarif, kedua pematung ini sementara dipanggil dalam kapasitasnya sebagai saksi. Namun status mereka bisa berubah tergantung hasil penyidikan. "Kalau memenuhi sejumlah unsur, bisa saja status mereka berubah menjadi tersangka," katanya. Unsur-unsur yang dimaksud, kata dia, ialah apakah para pematung ini memalsukan arca secara sengaja atau tidak.

Di Rumah Hashim

Dari pengembangan kasus ini Polisi akhirnya berhasil menemukan lima buah arca di kediaman Hashim Djojohadikusumo, pengusaha yang juga kolektor benda-benda antik, di daerah Kemang, Jakarta Selatan.

Kelima arca batu tersebut adalah arca Ciwa Maha Dewa, arca Durga Mahesa Suramardhini, arca Agastya (Siwa Maha Guru), arca Mahakala dan arca Durga Mahesa Suramardhini II. Arca-arca tersebut kemudian dibawa kembali ke Solo dan diamankan di Polresta Solo bersama lima arca palsu, yang disita polisi dari museum.

Hasil pemeriksaan sementara, menurut Kepala Kelompok Kerja Perlindungan BP3 Jateng Lambang Babar Purnomo, kelima arca yang dibawa dari rumah Hashim tersebut asli. "Bentuk dan ciri kelima arca tersebut sesuai dengan foto hasil invetarisasi koleksi BP3 Jateng atas Museum Radya Pustaka pada tahun 2001," katanya. Lambang menyatakan, tidak sulit membedakan arca batu asli dan palsu. Karena dari bentuk pahatan, atribut dan warna arca saja, bisa dilihat perbedaannya.

Sementara itu, Hashim melalui Fadli Zon (Volunteer di Yayasan Keluarga Hashim) mengakui kelima arca itu dibeli secara legal dari Dr Hugo Kreijger, dealer dan konsultan benda-benda seni yang pernah bekerja lama di Christie"s Amsterdam.

Menurut Fadli Zon, Hashim melalui telepon dari luar negeri menegaskan dirinya tidak pernah terlibat jual beli arca dengan pihak Museum Radya Pustaka Solo.

Hashim menyebutkan, sebelum membeli arca-arca tersebut, Hugo Kreijger mengatakan bahwa arca itu adalah milik Keraton Surakarta yang akan dijual ke luar negeri, lengkap dengan surat yang ditandatangani Hugo Kreijger dan Sri Susuhunan Pakubuwono XIII (PB XIII) Hanggabehi. "Dengan adanya sertifikat dan surat-surat itu, Hashim yakin arca-arca itu adalah milik pribadi/keluarga dari Pakubuwono XIII," ujar Fadli.

Namun Ketua Eksekutif Lembaga Hukum Keraton Kesunanan Surakarta KP Edy Wirabumi dan Pengageng III Pariwisata Museum Keraton Surakarta KP Satryo Hadinagoro membantah keras hal itu. Menurutnya, jika ada surat yang disebut-sebut ditandatangani Sampeyan Dalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Susuhunan Pakoe Boewono XIII (PK XIII) Hangabehi, pihak keraton memastikan surat tersebut adalah surat palsu yang dibuat oknum tertentu.

Soal keterlibatan orang dalam, Wirabumi menyatakan tidak tertutup kemungkinan, apalagi kop surat keraton tidak sulit dipalsukan.

Selama ini arca-arca itu ditempatkan Hashim di kantornya, dan baru dipindahkan ke rumahnya di Kemang untuk dibersihkan oleh konsultan ahli dari luar negeri, Collin Bowles. "Tidak ada sedikit pun rahasia atau usaha untuk menyembunyikan benda-benda itu karena Pak Hashim merasa memperolehnya secara sah dan legal," kata Fadli.

Hashim adalah kolektor benda-benda seni dan benda-benda bersejarah Indonesia. Sebagian besar koleksinya diperoleh dari balai lelang di luar negeri di London, Amsterdam, New York, dan Hongkong. Rencananya, benda-benda koleksi Hashim akan ditempatkan di museum yang dijajaki akan dibangun di Universitas Indonesia sebagai bagian dari Perpustakaan Soemitro Djojohadikusumo.

Sebagai sahabat dekat, Fadli Zon mengaku sangat terkejut nama Hashim disebut-sebut sebagai penadah arca-arca dari Museum Radya Pustaka Solo. Ia sangat yakin Hashim tidak melakukan hal-hal yang memalukan seperti itu.

"Karena itu, kalau Poltabes Solo mau memanggil, tidak perlu berlebihan dengan mengatakan akan memanggil secara paksa. Saya yakin Pak Hashim tidak terlibat seperti yang dituduhkan. Beliau adalah orang yang sangat peduli dengan benda-benda bersejarah di Tanah Air. Makanya dia membeli barang-barang dari Indonesia yang ada di Christie"s Amsterdam," ujarnya. Menurut Fadli, dalam waktu dekat, Hashim akan kembali ke Indonesia untuk menjelaskan masalah ini.

Kapoltabes Solo Kombes Pol.Lutfi Lubihanto melalui Kasat Reskrim Poltabes Solo AKP Syarif Rahman menyatakan, surat panggilan kepada Hashim sudah dilayangkan, Selasa lalu, dengan alamat rumah Hashim di Jakarta. Dalam mengembangkan kasus ini Poltabes Solo juga bekerja sama dengan Polres Metro Jakarta Selatan yang turut andil dalam upaya menyita ke lima arca sebagai barang bukti.

Kasus pemalsuan dan pencurian benda budaya tersebut sangat memalukan dan mencoreng wajah kota Solo sebagai kota budaya. Karena itu tidak berlebihan kalau Koordinator Solo Heritage Community, Sudarmono melontarkan kritik keras.

"Ini sungguh memalukan. Karena bukan hanya soal barang bersejarah semata-mata, tetapi soal nilai harga diri dari sebuah kota yang simbol budaya yang kuat," ujarnya.

Dia berharap, dalang dibalik pemalsuan benda-benda bersejarah ini segera diungkap dan diproses secara hukum. Dia juga meminta Pemerintah Kota Solo segera turun tangan untuk menata kembali keberadaan kota Solo sebagai kota budaya. ■ SP

SBY - JK Langgeng Hingga 2009

foto: presidensby.info

Presiden SBY berbincang dengan Jusuf Kalla saat menghadiri penutupan Rapimnas dan peringatan HUT ke-43 Partai Golkar.

Partai Golkar tetap komit mempertahankan pasangan SBY-JK hingga 2009. Partai berlambang pohon beringin ini menargetkan 30 % suara dan akan menentukan capres lewat survei.

Hajatan Partai Golkar yang menggelar Rapimnas sekaligus memperingati HUT ke – 43 usai sudah. Rapimnas yang digelar di Jakarta 22- 25 November 2007 lalu diikuti sekitar 1.000 peserta dari DPP, DPD I dan DPD II serta Ormas pendukung.

Sejumlah keputusan ditelorkan dalam kesempatan itu. Salah satunya yang sangat fundamental adalah, partai berlambang pohon beringin ini tetap akan mempertahankan pasangan SBY-JK hingga 2009.

Dalam pernyataan politik yang dibacakan Syamsul Ma'arif selaku Ketua Pengarah Rapimnas, (25/11), Partai Golkar berkomitmen mendukung secara kritis, objektif dan proporsional pemerintahan SBY-JK. Golkar juga bertekad untuk mengembangkan demokrasi yang berwajah damai dan tidak meneganggkan.

Partai ini juga mendukung pemilu dan pilkada yang dilaksanakan dengan sistem dan agenda yang lebih sederhana, efisien dan tidak melelahkan. Menurut Syamsul, demokrasi juga harus menjamin terbentuknya pemerintahan yang efektif dan stabil agar dapat bekerja mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Terkait dengan bidang ekonomi, Golkar mendesak pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM agar tidak membebani rakyat. Partai ini juga mendesak pemerintah benar-benar memanfaatkan pertumbuhan ekonomi untuk menggerakkan sektor riil. Untuk itu, harus digulirkan penyaluran kredit perbankan kepada rakyat dengan prosedur yang sederhana dan murah. Golkar juga meminta pemerintah tidak terpukau memperbesar simpanan di Bank Indonesia dalam bentuk SBI.

Tak Bahas Capres

Rapimnas kali ini memang tidak secara spesifik membahas calon presiden dari Partai Golkar dalam Pilpres 2009 nanti. Partai ini agaknya juga tidak akan menggelar konvensi yang dinilai selain menghambur-hamburkan dana, hasilnya juga tidak efektif. Golkar justru berniat melakukan penjaringan dengan metode survei. Sejumlah nama yang muncul nanti akan dibawa ke Rapimnas Khusus untuk diusung menjadi calon presiden dari Partai Golkar.

Kendati Rapimnas khusus itu baru akan digelar setelah mengetahui hasil pemilu legislatif 2009, namun di kalangan peserta rapimnas sudah beredar sejumlah nama yang disebut-sebut sebagai bakal calon presiden yang akan diusung Partai Golkar. Selain Jusuf Kalla, nama-nama itu diantaranya adalah Muladi, Din Syamsuddin, Prabowo Subianto, Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Akbar Tandjung.

Dalam rapimnas ini juga terungkap keinginan Golkar untuk merebut sekitar 30 persen suara pemilih. "Target itu kami harap akan tercapai jika Partai Golkar tetap melakukan konsolidasi organisasi secara maksimal dan meningkatkan kemampuannya memperjuangkan kesejahteraan rakyat," kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Agung Laksono.

Ketua Umum DPP Partai Golkar, Jusuf Kalla dalam pidato politiknya pada acara yang dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono serta sejumlah pejabat tinggi negara menyatakan, pemilu jangan dianggap sebagai kegiatan yang menghabiskan ongkos. Tapi pemilu harus dianggap sebagai investasi bagi bangsa. "Pemilu bukan hanya ongkos, melainkan juga investasi. Tapi investasi harus efisien," tegasnya.

Presiden SBY pada kesempatan itu menyambut gembira pernyataan Golkar yang tetap mendukung pasangan SBY-JK. "Saya berterima kasih karena Partai Golkar tetap konsisten mendukung pemerintah. Saya setuju, dukungan tersebut mestilah kritis, objektif dan proporsioal," katanya.

Diakuinya, pemerintah pasti punya kekurangan. "Saya dan Pak Jusuf Kalla juga memiliki kekurangan. Namun tentulah ada yang dicapai pemerintah. Saya berharap ketika menghasilkan sesuatu, terimalah. Ketika belum, kami akan perbaiki. Melawan dan menentang setiap kebijakan tentulah sikap yang tidak baik," katanya.

Presiden juga menilai sangat tepat tema yang diusung Partai Golkar pada Rapimnas kali ini yakni *"Berkarya bagi bangsa"*. Dia bahkan menyerukan kepada partai lain untuk memilih tema seperti ini. "Untuk bangsa yang utama, baru untuk parpol," tegasnya.

SBY setuju bahwa demokrasi bukanlah tujuan akhir. Demokrasi untuk melakukan sesuatu yang memberikan kebaikan bagi rakyat. Kebebasan mesti dilaksanakan dengan tanggung jawab dan akhlak baik.

Untuk itu dia mengajak para calon pemimpin bangsa untuk mengikuti etika dan aturan main yang berlaku sehingga rakyat tetap kompak bersatu, harmonis dan tidak terganggu. ■ **SP**

foto: repro investor daily

Polisi menenangkan para pendukung salah satu pasangan calon Gubernur Maluku Utara yang berunjuk rasa di depan gedung KPU, Jakarta.

Kemelut Pilkada Malut

Kemelut Pilkada Maluku Utara berlanjut ke Mahkamah Agung. Presiden melalui Keppres No.110/P/2007 menunjuk Timbul Pudjianto sebagai pejabat Gubernur sampai pelantikan gubernur definitif.

Kasus pemilihan kepala daerah Provinsi Maluku Utara (Malut) menjadi pelajaran menarik bagi perkembangan demokrasi di Tanah Air. Pilkada yang digelar 3 November 2007 lalu memang tak berjalan mulus. Bahkan sejak awal sudah mengundang kontroversi terkait dengan sikap KPUD Malut yang tidak konsisten dengan mengubah jadwal kampanye sampai pada saat pemilihan.

Kemelut tidak berhenti usai pemilihan yang diikuti empat pasangan calon. Yakni pasangan Anthony Charles Sunaryo – Amin Drakel; Thaib Armaiyn – Gani Kasuba; Abdul Gafur-Abdul Rahim Fabanyo, dan Irvan Eddyson Tombokan – Ati Ahmad.

Saat rekapitulasi hasil pilkada, kembali mencuat aroma tidak sedap terkait dengan isu penggelembungan suara di beberapa kecamatan di Kabupaten Halmahera Barat (Halbar). Dua kubu pasangan yang memperoleh suara paling dominan, Thaib – Gani dan Gafur – Fabanyo, sama-sama bersikeras mengklaim diri sebagai pemenang. Protes yang disertai pengerahan massa diarahkan ke kantor KPUD Malut. Akibatnya, sidang pleno untuk menetapkan pemenang pilkada sempat tertunda beberapa kali. Suasana mencekam pun menyelimuti kota Ternate. Dua kubu yang bersaing ketat masing-masing mengerahkan massa berunjuk rasa yang ditingkahi dengan adu fisik.

Keruwetan pilkada di Malut ini membuat KPU Pusat mengirim tim yang dipimpin anggota KPU I Gusti Putu Artha ke sana. Buntutnya, KPU Pusat mengambil alih persoalan pilkada tersebut. Semua anggota KPUD Malut, KPU di delapan kabupaten/kota se- Malut dan Panitia Pengawas Pilkada Malut termasuk para saksi pasangan calon diundang ke Jakarta untuk menyelesaikan masalah tersebut. Namun dalam beberapa kali rapat pleno KPUD dengan agenda penetapan rekapitulasi suara pilkada Malut yang digelar di Jakarta tak berhasil membuahkan kata sepakat.

KPUD Malut bersikukuh meminta KPU Kabupaten Halbar melakukan penghitungan ulang karena diduga ada penggelembungan suara. Padahal menurut keterangan tim sukses pasangan dan saksi-saksi, rekapitulasi di Halbar itu telah ditandatangani ketua dan tiga anggota KPUD serta tiga saksi.

Kendati rapat pleno mengalami *deadlock* beberapa kali, secara mengejutkan Ketua KPUD Malut M Rahmi Husen yang didampingi anggota KPUD Nurbaya Soelman (18/11) mengumumkan pemenang pilkada. Yakni pasangan Thaib-Gani sebagai Gubernur dan Wagub Malut periode 2007 - 2012. Pasangan yang didukung PKS, PKB, PBB, PD dan sejumlah partai kecil ini memperoleh 179.020 suara (37,35%). Sementara pasangan Gafur – Fabanyo yang didukung koalisi PG, PDK dan PAN mendapat 178.157 (37,17%). Pasangan Anthony – Amin meraih 76.117 suara (15,88%) dan Irvan – Ati mendapat 45.983 suara (9,59%).

Tak pelak, KPU Pusat merasa pengumuan ini tidak sah karena dilakukan tanpa prosedural yang benar. Tidak sesuai dengan pasal 33 ayat 22UU No.22/2007 yang mengharuskan rapat pleno dilakukan secara terbuka.

KPU Pusat kemudian memutuskan mengambil alih persoalan. Selain menganulir keputusan KPUD Malut, KPU juga memberhentikan sementara Ketua KPUD Malut M. Rahmi Husen dan anggota KPUD Nurbaya Soelman.

KPU beberapa kali mengadakan rapat pleno sejak hari Senin (19/11) yang diwarnai aksi unjuk rasa dan kericuhan antar kedua kubu yang bersaing. Namun kericuhan berhasil diredam aparat kepolisian.

Dalam rapat pleno KPU yang digelar (22/11) diputuskan pasangan Gafur – Fabanyo terpilih sebagai Gubernur – Wagub Malut dengan meraih 181.889 suara. Sedangkan pasangan Thaib – Kasuba mendapat 179.020 suara.

Rapat diikuti Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary dan tiga anggota KPU, Andi Nurpati, Endang Sulastri dan I Gusti Putu Artha. Dua anggota KPU lainnya, Abdul Aziz dan Siti Nuryanti yang sedang berada di Australia dalam pernyataannya melalui faksimile, menyetujui seluruh hasil rapat peno.

Suasana panas sempat terjadi dalam rapat pleno. Saat Andi Nurpati membacakan hasil rapat pleno, seorang saksi dari pasangan Thaib- Gani, yakni Syaiful Ahmad berulang kali mengajukan intrupsi. Namun tidak ditanggapi. Syaiful pun menolak menandatangani berita acara rekapitulasi.

Saat itu kubu Gafur-Fabanyo langsung melakukan sujud syukur. Gafur juga mengimbau warga masyarakat di Maluku Utara untuk bersatu padu membangun wilayah Maluku Utara.

Sementara kubu Thaib – Gani menyatakan akan membawa masalah ini ke Mahkamah Agung. “Dari awal kami berkeyakinan bahwa Surat Keputusan KPUD Maluku Utara sah dan konstitusional, sedangkan keputusan KPU Pusat justru inkonstitusional,” kata Syaiful Ahmad.

Kemelut berkepanjangan ini membuat Pemerintah melalui Keppres No.110/P/2007 tanggal 24 November 2007 menunjuk Dirjen Bina Administrasi Keuangan Daerah Depdagri, Timbul Pudjianto, sebagai pejabat gubernur sampai dengan pelantikan gubernur definitif. ■ **RON, SP**

Susilo Bambang Yudhoyono

Terima Medali Demokrasi

foto: presidensby.info

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atas nama seluruh rakyat Indonesia Senin (12/11) di Nusa Dua, Bali menerima Penghargaan Medali Demokrasi, atau International Democracy Award dari Presiden Asosiasi Konsultan Politik Internasional (IAPC), Ben Goddard.

Bangsa Indonesia dianggap berhasil menunjukkan komitmen kuat kepada demokrasi. Sebagai tolok ukur, Indonesia sukses menggelar pemilu langsung dalam skala terbesar di dunia, secara damai. Hal ini bisa dijadikan contoh bagi bangsa-bangsa lain di dunia.

Presiden mengatakan, medali didekasikan kepada rakyat Indonesia secara menyeluruh. SBY menilai berbagai hal yang dimiliki Indonesia saat ini, seperti, populasi penduduk yang bertambah pesat, kondisi geografi yang begitu luas, keberagaman etnik, budaya, dan bahasa, merupakan modal yang sangat berarti untuk perkembangan Indonesia ke depan. Selain itu, indikasi demokrasi bisa juga dilihat dari perubahan fundamental politik Indonesia yang tidak lagi sentralistik, tetapi sudah berbasis pada daerah-daerah. TNI sebagai kekuatan pertahanan, turut pula mereformasi diri secara gradual.

Demokrasi di Indonesia, demikian SBY, bisa sukses karena prosesnya tumbuh dari bawah. Dilanjutkannya, dulu, sebelum reformasi yang terjadi tahun 1998, demokrasi lebih berpusat pada sekelompok elit yang memotivasi timbulnya kolusi, korupsi dan nepotisme.

Penghargaan sejenis pernah diberikan kepada sejumlah tokoh besar dunia, antara lain mantan Presiden Philiphina Corazon Aquino, mantan Presiden Amerika Serikat Jimmy Carter, mantan Presiden Uni Soviet Mikhail Gorbachev, dan mantan Perdana Menteri Inggris Margareth Thatcher. ■ ZAH

Erwin Pardede

Berkebun Aneka Tanaman Hias

Cukup unik hobi sekaligus profesi yang ditekuni Erwin Pardede selepas menjabat anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan periode 1999-2004 lalu: Berkebun aneka tanaman hias di lahan seluas lima ribu meter persegi, terletak di Jalan Ciangsana Nomor 99 (Jalan Alternatif Cibubur), Nagrak, Bogor, Jawa Barat.

Tak kurang 700 jenis tanaman hias koleksi KATIAS, singkatan Kebun Aneka Tanaman Hias, milik Erwin, mulai tanaman biasa harga Rp 3 ribu hingga jenis *anthurium* seharga puluhan juta rupiah jenis bunga kalangan raja-raja pajangan istana yang kini sedang menjadi favorit para penggemar tanaman hias. KATIAS yang lebih mirip sebagai sentra belanja aneka tanaman hias, diluncurkan dua bulan lalu, menurut Erwin menelan innvestasi untuk bangunan dan koleksi tanaman sekitar Rp 3 miliar, di luar tanah yang ditaksir senilai Rp 5 miliar. Uang sebanyak itu merupakan hasil keringat pria kelahiran Pematang Siantar 17 Agustus 1943 ini selama menjadi kontraktor, profesi lama sebelum menjadi politisi.

Pimpinan redaksi majalah *Trubus* yang sudah datang meninjau berkomentar, selepas enam bulan pertama kebun milik Erwin setidaknya akan menghasilkan omset Rp 200 juta per bulan. Perkiraan itu bisa saja melebihi sebab Erwin masih aktif melengkapi koleksinya hingga kelak ribuan jenis tanaman hias.

Menjadi penggiat tanaman hias muncul setelah Erwin melakukan perjalanan spiritual mengunjungi Mesir hingga Israel. Kedua wilayah memiliki kontur dan kegersangan tanah yang sama. Tetapi Erwin menyaksikan keajaiban, tanah Israel bisa subur ditanami berbagai tanaman termasuk tanaman tropis. Berbeda dengan tanah Mesir yang tetap tandus. Dengan kecerdasan yang dimiliki Erwin memilih profesi tanaman hias memanfaatkan tanah yang sudah lama dimiliki di Cibubur, melupakan impian mendirikan pompa bensin. "Jadi menurut saya, tidak ada yang mustahil di bumi ini kalau kita bekerja keras," Erwin memberi alasan mengapa memilih berkebun kepada *Berita Indonesia*, berbicara di salah satu bangunan sudut kebun sebuah ruang kantor *full AC* yang disebutnya tempat bersemedi.

Sebagai pengusaha kontraktor kehidupan perekonomian Erwin, ayah lima orang anak buah pernikahannya dengan Rusline Hutasoit tergolong sudah mapan. Secara kebetulan saja, sesungguhnya, Erwin bersinggungan dengan politik tatkala memberanikan diri mengontrakkan bangunan kantornya di Jalan Raya Tengah No. 1 Pasar Rebo, Jakarta Timur menjadi kantor Megawati Soekarnoputri, pimpinan PDI Pro Mega yang sedang dianiaya oleh rejim orde baru sebelum kejatuhannya. Erwin mengatakan sangat bersimpati akan perjuangan Megawati dalam menegakkan kebenaran hingga nekat berbuat sesuatu dengan resiko mengorbankan usaha jasa kontraktornya digarisi hitam oleh pemerintah, hingga tak boleh ikut tender proyek-proyek pemerintahan pada saat itu.

foto: berindo ht

Kenekatan berbuahkan kepercayaan, Erwin dicalonkan sebagai anggota DPR pada Pemilu 1999 melalui daerah pemilihan Sumatera Utara, dan terpilih pula. Selama berkiprah di Senayan kinerja Erwin tergolong produktif. Duduk di Komisi IV dan menjabat Ketua Sub Komisi Pekerjaan Umum, anggota BURT DPR, anggota Baleg DPR, anggota sejumlah Pansus, Panja dan Timsus berbagai RUU, serta anggota PAH MPR RI. Di luar itu popularitas Erwin cukup baik pula karena kemampuannya menjalin komunikasi politik lewat media.

Tetapi pada Pemilu 2004 dari Dapil III Sumut nama caleg Erwin Pardede oleh pengurus partai di daerah dan pusat, karena berbagai alasan tertentu melorot dari seharusnya nomor urut satu ke nomor lima.

Tak lagi menghuni Senayan tak berarti Erwin berhenti berkiprah. Berbagai gejolak jiwa yang pernah dia alami sebagai pribadi, ummat, pebisnis, dan politisi dituangkannya ke dalam sebuah buku yang diberi judul, "Keyakinan Yang Membebaskan", setebal 415 halaman terbit Maret 2006. Buku filsafat kerohanian sekaligus biografi itu seolah membombardir hingga terpatahkannya berbagai keyakinan lama yang selama ini membelenggu alam pikir Erwin, untuk digantikan dengan sesuatu yang baru yakni budi baik.

Buku yang tergolong penuh kontroversi itu 3,5 tahun disiapkan Erwin sebelum dan sesudah lepas dari kesibukan DPR. Tetapi setelah buku terbit, kembali Erwin mengalami kekosongan, sampai-sampai disebutnya *error,* hingga akhirnya terbersit keinginan untuk menjadi penggiat aneka tanaman hias sebagai pengisi

Ir. M. Hatta Radjasa

Ketua IA-ITB 2007-2011

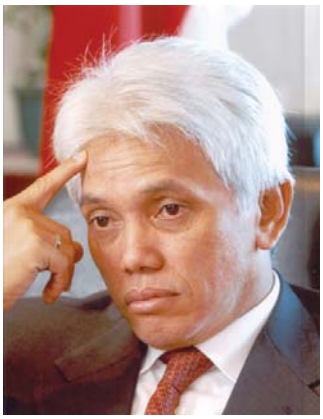

foto: dok. ti

Menteri Sekretaris Negara Ir. M. Hatta Radjasa Minggu (18/11) terpilih sebagai Ketua Ikatan Alumni Institut Tehnologi Bandung (IA-ITB) periode 2007-2011, menggantikan mantan Menneg BUMN Laksamana Sukardi.

Terpilihnya Hatta berlangsung secara demokratis dengan skema *one man one vote* secara serentak di 17 provinsi, serta negara Malaysia dan Singapura. Dengan meraih 4.510 suara atau 49,38 persen dari total 9.134 pemilih, Hatta yang alumni Teknik Perminyakan unggul atas empat kandidat lain. Mereka adalah Triharyo Soesilo (Presiden Direktur PT Rekayasa Mandiri), Betty Alisjahbana (Presiden Direktur PT IBM Indonesia), Boyke Minarno (Ketua Umum RPE Group), dan Zaid Perdana Nasution seorang dosen.

Hatta yang kelahiran Palembang 18 Desember 1953 berharap, ikatan-ikatan alumni lain termasuk IA-ITB bisa menjadi kekuatan bagi almamater, sekaligus berperan aktif dalam pembangunan bangsa. Suami Drg Oktiniwati Ulfa Darish ini mengatakan, IA-ITB bisa menjadi contoh bagi ikatan alumni lain.

Bagai meteor di era reformasi, begitu terjun ke dunia politik karir Hatta langsung melejit. Ia terpilih menjadi anggota legislatif pada Pemiilu 1999, kemudian terpilih sebagai Sekjen Partai Amanat Nasional periode 2000-2005. Pada era Kabinet Gotong Royong dipecaya sebagai Menristek (2001-2004), dan pada Kabinet Indonesia Bersatu dua tahun pertama dipercaya mengendalikan Departemen Perhubungan, hingga dirotasi menjadi Mensesneg.

Menanggapi terpilihnya Hatta, Rektor ITB Prof Djoko Santoso mengatakan alumni ITB merupakan salah-satu elemen penting dalam pengembangan pengaruh universitas. Djoko percaya pengalaman sebagai entreprener dan pucuk pemerintahan merupakan modal yang sangat cukup bagi Hatta untuk membawa IA-ITB ke arah lebih baik. ■ ZAH

kegiatan sehari-hari. "Waktu saya beristirahat hanya dua bulan. Otak saya kelihatannya beku. Bisa dikatakan jadi *error*. Ke-*error*-an inilah yang membuat saya berpikir lagi, apa sih yang akan saya lakukan," kata Erwin, yang tanpa tedeng aling-aling memaparkan semua "keliaran" hidupnya dalam bukunya. Cerita yang lebih dahsyat, konon masih akan terbit lagi berbentuk novel percintaan remaja dengan tokoh utama menggambarkan figur Erwin Pardede juga.

Menjadi pekebun membuat Erwin enggan mengomentari peristiwa politik aktual, kecuali bila ditanya. Ia melihat orientasi politik sekarang bukan lagi untuk menciptakan kesejahteraan rakyat, sebagaimana cita-cita para pendiri bangsa, melainkan orientasi kekuasaan semata. Demikian pula dengan PDI Perjuangan, partai yang sempat membesarkan namanya di arena perpolitikan nasional, dilihat Erwin bukan lagi partai berideologi nasionalis-sekuler. Tetapi sudah menjadi nasionalis-religius sebab demi mencari pengikut mendirikan sayap partai berbasis ormas keagamaan.

"Tetapi andaikata memang ada partai di republik ini yang sekuler-nasionalis, saya siap bangkit lagi," ucap Erwin, meneropong peluangnya untuk kembali berkiprah di gelanggang politik pada tahun 2009. ■ HT

Dahlan Iskan

Ketua Umum SPS 2007-2011

foto: tempo

Chief Executive Officer Grup Jawa Pos, Dahlan Iskan, Rabu (14/11) terpilih sebagai Ketua Umum Serikat Penerbit Suratkabar (SPS) periode 2007-2011, dalam kongres SPS ke-22 yang berlangsung di Hotel Santika, Jakarta. Kongres SPS kali ini dihadiri 90 delegasi dari 24 cabang. Lima cabang tidak mengirim utusan yakni cabang Aceh, Bengkulu, Kalbar, Maluku, dan Papua Barat.

Dahlan yang sukses menjalani operasi cangkok hati, terpilih untuk menggantikan Jacob Oetama, Pemimpin Umum harian *Kompas* yang sudah dua periode terakhir memimpin SPS. Jacob selanjutnya duduk sebagai Ketua Dewan Penasehat.

Dahlan mengatakan akan melakukan sejumlah perombakan mendasar sistem keorganisasian. Diantaranya, SPS akan lebih berorientasi kepada penerbit selaku anggota, secara langsung. Sehingga, peserta kongres SPS di masa-masa mendatang tidak lagi didominasi pengurus-pengurus cabang saja, melainkan juga seluruh penerbit surat kabar yang ada di Indonesia. Dengan demikian aspirasi para penerbit bisa terakomodir.

Menurutnya, SPS harus mempertahankan kebebasan pers dalam arti kebebasan untuk kebaikan bersama. SPS akan mendorong terciptanya standarisasi perusahaan penerbitan pers, supaya pers tidak diterbitkan oleh orang-orang yang hanya sekadar coba-coba memanfaatkan pers sedemikian rupa. Pers harus didirikan oleh orang yang betul-betul tahu tentang dunia pers.

Pria asal Magetan, Jawa Timur yang lahir pada 17 Agustus 1951, ini juga menyampaikan, hanya mau memperhatikan para penerbit yang punya keinginan untuk maju, bekerja keras, dan siap mengoreksi diri atas kelemahan-kelemahan yang dimiliki. Bukan sebuah penerbit yang malas melakukan renovasi dan inovasi, dan cenderung jalan di tempat.

Dahlan memulai karir sebagai calon reporter sebuah surat kabar kecil di Samarinda, Kalimantan Timur pada tahun 1975. Tahun 1976 ia diangkat menjadi wartawan majalah *Tempo*, hingga dipercaya memimpin surat kabar *Jawa Pos* sejak 1982 hingga sekarang. *Jawa Pos* yang hampir mati dengan oplah 6.000 ekslempar, ia bangun menjadi surat kabar dengan oplah 300.000 eksemplar hanya dalam tempo lima tahun.

Dahlan kemudian membentuk *Jawa Pos News Network* (JPNN), sebuah jaringan surat kabar terbesar di Indonesia dengan memiliki lebih dari 80 surat kabar, tabloid, dan majalah serta didukung 40 jaringan percetakan yang tersebar di seluruh Indonesia. ■ ZAH

Kasus Goro-Bulog

Setelah Tak Bersepakat

Mediasi perkara perdata tukar guling tanah dan gedung antara Bulog dan PT Goro Batara Sakti (GBS) gagal, Tommy Soeharto digugat setengah triliun.

Mediasi untuk mencapai perdamaian dalam perkara perdata tukar guling antara Bulog dan PT Goro Batara Sakti menemui kegagalan. Mediasi yang melibatkan Tommy Soeharto ini gagal karena tak mencapai kata sepakat tentang pembayaran kerugian negara.

Menurut jaksa pengacara negara (JPN) yang mewakili Bulog, Dachmer Munthe, pihak Tommy sebagai tergugat kedua menolak proposal perdamaian yang diajukan Bulog.

Poin pokok yang ditolak Tommy, ungkap Munthe, adalah pembayaran ganti rugi ke Bulog senilai Rp 550 miliar. Padahal, jelasnya, poin itu bersifat prinsip karena uang ganti rugi tersebut akan dikembalikan ke rakyat. Selain ganti rugi ke Bulog, poin perdamaian lain yang ditolak adalah permintaan penarikan uang Tommy di BNP Paribas, Guernsey, senilai 36 juta euro. JPN meminta rekening tersebut dibekukan di bawah pengawasan negara.

Sementara, pihak Tommy menginginkan uang itu dikelola bersama untuk membiayai proyek sektor riil di Tanah Air. "Dilitigasi nanti, masih mungkin damai," kata kuasa hukum Tommy, Elza Syarief, seperti dikutip *Republika*, 13 November 2007. Perkara Goro, jelasnya, tak ada hubungan dengan rekening Tommy di BNP Paribas. Elza juga menegaskan tak akan membayar ganti rugi. Sebaliknya, pihak Tommy menggugat balik Bulog (rekonvensi).

Tommy dianggap berutang kepada negara

foto: kompas

Menyusul gagalnya mediasi tersebut, Senin (19/11), Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), menggelar sidang litigasi pertama kasus tersebut. Dalam pembacaan gugatan Bulog yang diwakili jaksa pengacara negara (JPN), Bulog menggugat para tergugat dengan nilai gugatan lebih dari Rp 500 miliar.

Seperti diberitakan di berbagai media massa, jumlah nilai gugatan tersebut terdiri atas gugatan materil dan in materil yang berjumlah Rp 344,2 miliar dan tuntutan bunga dari gugatan yang mencapai Rp 206,52 miliar. Tommy Soeharto, Ricardo Gelael, Beddu Amang, dan PT GBS yang menjadi tergugat, dituntut membayar gugatan tersebut secara tanggung renteng kepada penggugat.

Dasar dari perbuatan melawan hukum para tergugat, menurut tim JPN, adalah perjanjian antara Bulog dan tergugat tanggal 11 Agustus 1995, berupa penandatanganan nota kesepahaman (MoU) *ruilslag* tanah dan bangunan. Tanah dan bangunan milik Bulog di Jakarta Utara, sesuai MoU di-ruilslag dengan tanah milik PT GBS di Jalan Ahmad Yani.

JPN menilai, perjanjian ruilslag bertentangan dengan Keputusan Menteri Keuangan No 350/KMK.03/1994, dengan alasan perjanjian dilaksanakan tanpa proses tender. Selain tidak melalui proses tender, perjanjian *ruilslag* tersebut tidak sesuai dengan tujuan dan alasan *ruilslag* sesuai Keputusan Menteri Keuangan No 350/KMK.03/1994 tersebut.

Sisi Lain Mediasi

Seperti dikupas *Hukumonline* (14/11/2007), salah seorang kuasa hukum Tommy, Kapitra Ampera mengatakan, kegagalan mediasi itu akibat tuntutan JPN yang tak logis. Terutama, mengenai penarikan uang sebesar 36 juta euro tersebut. "Padahal, tabungan Tommy di BNP Paribas tersebut tak ada hubungannya dengan gugatan (Goro,-red)," ujarnya dalam siaran pers di Jakarta, hari ini (13/11). Proporsal JPN itu dinilainya telah keluar dari substansi perkara.

Sementara itu, Direktur Perdata pada Jamdatun Yoseph Suardi Sabda menolak argumentasi Kapitra. Menurut Yoseph mediasi tak melulu hanya membicarakan substansi perkara. Ia mengakui memang pihak Tommy tak dapat menerima permintaan pemerintah (JPN). "Terutama mengenai permintaan pembayaran dan pemindahan uang di Guernsey dikembalikan dalam keadaan beku," ungkapnya.

JPN menganggap dengan adanya kerugian negara, maka Tommy memiliki utang kepada negara. Sehingga, negara punya hak untuk menagihnya dimana seluruh harta milik Tommy menjadi jaminan pelunasannya.

Karenanya, Yoseph menilai, jangan kan harta Tommy yang di Guernsey, seluruh harta Tommy pun bisa menjadi bahan dalam negosiasi di proses mediasi.

Anehnya, pernyataan Kapitra bertentangan dengan pernyataan kuasa hukum Tommy yang lain. Elza Syarief sempat berkomentar pihaknya tak alergi dengan penarikan uang dari Guernsey tersebut.

Menurutnya, kedua belah pihak sepakat untuk menarik uang tersebut ke Indonesia. Tetapi permasalahannya adalah mengenai penggunaan uang tersebut. JPN mengusulkan agar uang ditarik ke Indonesia dan dibekukan, alias tak bisa dicairkan Tommy. Sedangkan Tommy meminta agar dana itu tetap bisa dicairkan. Alasannya, uang tersebut untuk membangun sektor riil agar bisa membantu masyarakat. ■ RH

Pidana korupsi bagi hakim lebih berat

RUU Tipikor

Menghapus Citra Mafia Gelap

Para hakim yang melakukan tindak pidana korupsi diancam pidana lebih berat dibanding pejabat publik lainnya.

Pelaku korupsi silakan sedikit bernapas lega jika draf RUU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) disahkan. Mereka bakal basa menikmati hukuman pidana kurang dari setahun karena hukuman minimal dihapuskan. Demikian isi draf RUU Tipikor yang disusun tim perumus pada 12 September 2007 yang kemudian disebarluaskan ke berbagai media massa, Kamis (15/11).

Tentu saja, draf ini juga banyak mendapat tanggapan yang tidak semuanya positif. Seperti dilaporkan *Sinar Harapan* (16/11/2007), salah satu hakim ad hoc Pengadilan Tipikor I Made Hendra menolak jika hukuman minimal dihapuskan. Menurutnya, penghapusan justru bertendensi timbulkan ketidakpastian hukum. "Jika tidak ada, sama seperti dulu, sebagai celah hakim untuk menentukan hukuman yang ringan," katanya.

Jika ini diterapkan, menurut Made Hendra, akan menjadikan hakim satu-satunya pihak yang berkuasa menentukan hukuman. Sejatinya, selain hakim, yang menentukan ringan atau beratnya hukuman minimal itu adalah pembuat UU. Pasalnya, kalangan legislatiflah sebagai wakil rakyat yang mengetahui rasa keadilan di masyarakat itu seperti apa. Sedangkan hakim, hanya menjalankan UU.

Menurut pakar hukum pidana pencucian uang, Yenti Ganarsih, draf ini dinilai agak menyimpang dari amanat United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) yang telah diratifikasi Indonesia. Menurutnya Konsep tak ada hukuman minimal bagi pelaku korupsi menyimpang dari prinsip UNCAC sebagai tindak pidana dengan akibat serius. Apalagi, di RUU ini juga diatur soal sanksi bagi pemberi laporan palsu. Sementara Hakim-hakim di Indonesia masih dipertanyakan integritas moralnya untuk memutus suatu perkara dengan adil.

Atas penghilangan hukuman minimum ini, Direktur Perancangan Peraturan Perundang-undangan Suhariyono berargumen, pidana yang terlalu tinggi melanggar HAM, sedangkan hukum pidana tidak dikenal hukuman minimum khusus. Suhariyono menjelaskan, ada kekhawatiran penerapan minimal hukuman akan mempengaruhi keputusan hakim.

Sementara itu, salah satu anggota tim perumus Indriyanto Seno Adji menerangkan, draf RUU ini tetap mengatur pidana minimum khusus. Begitu pula diatur nilai denda maksimal yang sebelumnya tidak diatur.

Padahal, UU No 31 Tahun 1999 tentang Tipikor, hukuman minimal selama satu tahun dan paling lama lebih dari 10 tahun. Sementara itu, draf RUU Tipikor ini hanya dicantumkan hukuman paling lama di bawah 10 tahun.

Begitu pula dalam penentuan uang pengganti. Tim perumus RUU Tipikor, yang dipimpin Andi Hamzah itu menetapkan uang pengganti tak lebih dari Rp 500 juta. Pada UU Tipikor lama ditetapkan kisaran paling banyak senilai satu miliar rupiah.

Hukuman Hakim

Sementara itu, pemberitaan *Koran Tempo* (19/11/2007), menyoroti RUU Tindak Pidana Korupsi ini dari sisi hukuman yang lebih berat untuk hakim dibandingkan pejabat lain.

Dalam Pasal 2 Ayat 2 RUU Tipikor disebutkan, "Pejabat publik yang meminta atau menerima keuntungan yang tidak semestinya untuk terpengaruh dalam pelaksanaan tugas resminya dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh dan/atau denda Rp 350 juta."

Adapun dalam Pasal 2 Ayat 3 disebutkan, "Jika pejabat yudikatif yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 2, ancaman pidana penjaranya ditambah dengan sepertiga." Sehingga ancaman pidana penjara bagi pejabat yudikatif yang melakukan korupsi adalah 9 tahun 4 bulan.

Pejabat yudikatif yang dimaksud dalam RUU ini adalah hakim dan penitera pada semua tingkat pengadilan. Padahal Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memasukkan unsur pejabat yudikatif dalam pegawai negeri atau penyelenggara negara.

Direktur Perancangan Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Suhariyono mengatakan tujuan penjatuhan sanksi yang lebih berat kepada pejabat yudikatif adalah menghilangkan citra soal mafia peradilan.

Dia menjelaskan RUU ini dibuat untuk menyesuaikan dengan ratifikasi Konvensi Anti-Korupsi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 2003. Saat ini, untuk menjerat koruptor, aparat menggunakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. ■ **RH**

Solusi Melahirkan Tanpa Rasa

Stres dan trauma bayi yang dilahirkan dengan waterbirth lebih kecil.

Benarkah *waterbirth* dan *hypnobirthing* bisa mengurangi rasa sakit dan aman dilakukan saat bersalin?

Artis penyanyi terkenal Oppie Andaresta menjalani persalinan dalam air awal Juli lalu. Dia melahirkan anak pertamanya di sebuah klinik bersalin di daerah Ubud, Bali. Menurut pengakuannya, rasa sakit melahirkan tidak terlalu dirasakannya. Sang bayi pun lahir dengan selamat dan dalam keadaan sehat.

Melahirkan dalam air pada prinsipnya sama dengan persalinan normal seperti persalinan biasa di atas tempat tidur. Bedanya hanya media yang digunakan. Kolam plastik berisi air hangat digunakan untuk berendam sang ibu. Cara ini telah lama dipraktekkan di negara-negara Eropa, Amerika dan beberapa negara Asia. Di Indonesia, cara ini diperkenalkan sejak tahun 2006 di sebuah rumah bersalin di Jakarta. Sebelumnya, operasi caesar adalah alternatif bagi ibu yang takut rasa sakit bersalin secara normal. Walaupun tanpa indikasi medis yang kuat, operasi caesar dijalani agar terhindar dari rasa sakit. Bahkan beberapa tahun yang lalu, cara ini sempat menjadi tren tersendiri di kalangan para ibu khususnya para artis.

Dr. Tamtam Otamar Samsudin, SpOG, dokter yang pertama kali menolong persalinan dalam air, menjelaskan bahwa berkurangnya rasa sakit dan rasa nyamanlah yang membuat banyak ibu meminati jenis persalinan yang tergolong baru ini. Rata-rata pasien yang menjalaninya adalah ibu-ibu muda berumur 20-30 tahun. Biasanya melahirkan anak pertama atau kedua. Alasan memilih cara ini pada umumnya karena ibu takut mengalami rasa sakit yang hebat saat bersalin.

Terjadinya rasa sakit yang hebat disebabkan oleh ketakutan yang memicu tegangnya otot polos di dalam tubuh, pembuluh darah menyempit dan membuat pasokan oksigen menjadi berkurang. Mulut rahim menjadi kaku dan impuls rasa sakit di rahim bertambah. Berkurangnya rasa sakit terjadi karena adanya relaksasi otot-otot tubuh saat ibu berendam di dalam air hangat. Bibir vagina menjadi lebih elastis dan rileks sehingga robekan/pengguntingan bibir vagina dapat dihindari. Saat rileks, tubuh memproduksi hormon endorphin yang berguna untuk menghambat rasa sakit. Sakit bersalin pun berkurang 40-70 persen.

Lebih lanjut dokter yang telah berhasil membantu 68 persalinan dalam air ini, menjelaskan teknik waterbirth secara rinci. Ibu masuk ke dalam kolam plastik berisi air hangat dengan suhu 36-37 derajat Celcius. Saat ibu masuk, mulut rahim harus sudah pembukaan enam. Air kolam haruslah higienis untuk mencegah penularan kuman lewat media air. Air akan diisikan sampai sebatas dada si ibu.

Sifat air yang memiliki daya apung, secara tidak langsung mengurangi berat badan ibu sehingga ibu dapat bergerak bebas. Air juga bersifat menenangkan dan membuat ibu merasa nyaman. Hal ini penting karena bila ibu secara fisik rileks, mentalnya juga akan rileks dan dapat berkonsentrasi untuk mengejan. Suhu air yang hangat akan meningkatkan kontraksi rahim dan memperlancar aliran darah pada tubuh ibu.

Kelebihan lainnya, persalinan dalam air berjalan lebih cepat dibandingkan cara konvensional di atas tempat tidur. Sebagai perbandingan, bila persalinan biasa mulai dari pembukaan lima sampai pembukaan lengkap (yaitu pembukaan sepuluh) rata-rata terjadi delapan jam. Sedangkan bila si ibu berendam dalam air, tahap di atas dapat berlangsung sekitar setengah sampai dua jam.

Selain itu, bayi yang dilahirkan lewat proses persalinan dalam air memiliki tingkat stres dan trauma yang lebih kecil. Ini dimungkinkan karena saat ibu berendam dalam air hangat, otot panggul lebih rileks sehingga jalan lahir menjadi lebih lebar. Kepala bayi pun dapat keluar lebih mudah. Trauma atau cedera kepala yang minimal memungkinkan bayi memiliki IQ yang lebih tinggi dibanding bayi yang lahir dengan cara biasa. Di samping itu, suhu air kolam yang hampir sama dengan suhu air ketuban dalam rahim membuat bayi tidak mengalami stres. Di Amerika, bayi dikeluarkan dari air pada sepuluh detik pertama setelah lahir dan ditidurkan

Syarat *Waterbirth*:

1. Tidak memiliki penyakit infeksi seperti hepatitis, herpes, HIV/AIDS sebab dikhawatirkan kuman mengontaminasi air dalam kolam.
2. Tidak memiliki penyakit darah tinggi selama kehamilan/preeklampsia.
3. Tidak mengalami perdarahan atau riwayat perdarahan pada persalinan sebelumnya.
4. Tidak memiliki kelainan jantung dan kencing manis yang perlu penanganan khusus.
5. Tidak mengandung janin kembar.
6. Letak bayi tidak sungsang atau melintang.
7. Tidak ada lilitan tali pusat yang membahayakan bayi.

a Sakit

dalam gendongan ibu. Pada saat itu bayi masih bernafas dengan plasenta.

Perlu diperhatikan, risiko air kolam tertelan oleh bayi cukup besar. Apabila terjadi *temperature shock* saat bayi meluncur di dalam kolam, bayi akan terangsang bernafas dan dapat menelan air. Bila proses persalinan lama, hati-hati terhadap bahaya hipotermia (suhu tubuh terlalu rendah) pada ibu. Oleh karena itu, perlu tim yang terdiri dari dokter spesialis kebidanan dan kandungan, dokter spesialis anak, bidan, yang mampu bekerja sama demi keselamatan ibu dan bayi.

Pada dasarnya persalinan dalam air aman dan cukup nyaman. Tetapi tidak semua ibu dapat menjalani cara ini. Ibu yang memiliki penyakit darah tinggi pada kehamilan/preeklampsia, menderita herpes atau HIV/AIDS, mengandung janin kembar, dan kehamilan sungsang tidak diperbolehkan menjalani cara persalinan jenis ini. Pengalaman di lapangan menunjukkan ada beberapa ibu yang gagal menjalaninya akibat tidak majunya pembukaan mulut rahim. Bila terjadi hal tersebut, operasi caesar adalah jalan terakhir.

Dengan berbagai manfaat dari teknik melahirkan yang tergolong baru di Indonesia ini, banyak ibu yang berminat menjalaninya. Bila Anda tertarik, Anda harus mempersiapkan dana persalinan lebih banyak dibandingkan dengan persalinan normal biasa. Di sebuah rumah sakit di Jakarta Selatan menawarkan persalinan *waterbirth* dengan harga sekitar delapan juta rupiah. ■ **DGR**

foto: willowbirth.com

Di Amerika, bayi dikeluarkan dari air pada 10 detik pertama setelah lahir.

Pendulum: Para peserta melakukan praktek menggerakkan pendulum dengan kekuatan pikiran, dipandu oleh ibu Lanny Kuswandi, diiringi sayup-sayup musik relaksasi dan semilir wangi aromaterapi sandalwood yang aman bagi ibu hamil dalam acara Talkshow sekaligus peluncuran buku "Melahirkan Tanpa Rasa Sakit dengan Metode Hypnobirthing" awal September lalu.

Terapi Hipnotis

Melahirkan dengan cara terapi hipnotis (Hypnobirthing) juga mendapat tempat di masyarakat. Melahirkan dengan teknik ini disebut-sebut banyak memberi manfaat bagi calon ibu, antara lain rasa nyaman, berkurangnya rasa sakit (bahkan ada yang tidak merasakan sakit sama sekali) hingga rasa bahagia.

Hypnobirthing merupakan sebuah paradigma baru dalam pengajaran melahirkan secara alami. Teknik ini mudah dipelajari, melibatkan relaksasi yang mendalam, pola pernapasan lambat dan petunjuk cara melepaskan endorfin dari dalam tubuh (relaksan alami tubuh) yang memungkinkan calon ibu menikmati proses kelahiran yang aman, lembut, cepat dan tanpa proses pembedahan.

Hypnobirthing dicetuskan berdasarkan buku Childbirth Without Fear yang ditulis oleh pakar ginekologi Dr. Grantly Dick-Read pada 1944. Terapi Hypnobirthing selanjutnya dikembangkan oleh Marie Mongan, pendiri Hypnobirthing Institute.

Terapi ini mengajarkan para ibu untuk memahami dan melepaskan Fear-Tension-Pain Syndrome yang seringkali menjadi penyebab kesakitan dan ketidaknyamanan selama proses kelahiran. Saat kita merasa takut, tubuh mengalihkan darah dan oksigen dari organ pertahanan non esensial menuju kelompok otot besar di wilayah kaki dan tangan. Akibatnya, area wajah 'ditinggalkan', makanya ada ungkapan "pucat karena ketakutan". Dalam situasi yang menakutkan, tubuh mempertimbangkan bahwa uterus atau rahim dipandang sebagai organ 'tidak penting'. Menurut Dr. Dick-Read, rahim pada perempuan yang ketakutan secara kasat mata memang tampak putih.

Teknik Hypnobirthing membuat ibu secara cepat belajar mempercayai insting melahirkan pada tubuhnya, bahwa tubuhnya diciptakan untuk bekerja dalam irama yang selaras saat mengeluarkan bayi ke dunia. "Ada perbedaan besar antara Hypnobirthing dan kelas pendidikan melahirkan lainnya, dan ini bukanlah hanya potongan hipnotis. Hypnobirthing lebih menekankan melahirkan dengan cara positif, lembut, aman dan bagaimana mencapainya dengan mudah," ujar Mongan. Pada 1958, the American Medical Association menyetujui terapi dengan menggunakan hipnotis ini.

Sedangkan istilah Hypnobirthing pertama kali dikenal di Indonesia pada tahun 2003. Lanny Kuswandi orang pertama yang memperkenalkan teknik ini mengatakan inti dari Hypnobirthing adalah menetralisir rekaman negatif alam bawah sadar ibu hamil tentang persepsi melahirkan itu menyakitkan.

Lanny menganjurkan ibu-ibu yang memiliki kecenderungan rasa takut dan cemas yang berlebihan dapat mengikuti kelas Hypnobirthing sebelum persalinan. Para suami dapat mendukung istri dengan bersama-sama mengikutinya. Terapis akan mengajarkan bagaimana agar ibu tenang dalam menghadapi persalinan. Bagi ibu yang tidak dapat mengikuti kelas dapat mempelajarinya lewat VCD atau membaca buku tentang *Hypnobirthing*.

Mantan bidan di RS St.Carolus ini menjelaskan bahwa Hypnobirthing adalah sarana alamiah untuk membangkitkan energi dalam diri sang ibu. Ibu yang melahirkan, sadar penuh dan diusahakan dalam keadaan tenang. Kesadaran ibu tidak dikontrol oleh instruksi-instruksi eksternal. Saat tenang, tubuh akan mengeluarkan endorphin, hormon penghambat rasa sakit. Rasa sakit bersalin dapat berkurang sampai 50 persen. Lanny sendiri telah mempraktekkan *Hypnobirthing* pada persalinan keduanya. Menurutnya, rasa sakitnya berkurang banyak dan perutnya hanya terasa kencang sebentar.

Hypnobirthing dapat pula diterapkan bersamaan dengan *waterbirth*. Tujuannya untuk lebih mengurangi rasa sakit yang dirasakan saat bersalin. Dengan perasaan nyaman dan rasa sakit yang minimal, diharapkan ibu dapat berkonsentrasi mengejan demi kelancaran proses persalinannya. Sejauh ini teknik Hypnobirthing tidak memiliki efek samping. ■ DGR

Android
Ponsel Masa Depan

Android akan menjadi pukulan bagi sejumlah pengembang *software* ponsel seperti Microsoft, Research in Motion, Palm, Symbian bahkan iPhone yang mengembangkan *software proprietary* (berlisensi).

Setahun yang lalu beredar rumor bahwa perusahaan mesin pencari di internet, Google Inc, akan terjun ke bisnis telepon bergerak atau *mobile phone* yang diberi nama Gphone. Kabarnya, perusahaan yang didirikan Larry Page dan Sergey Brin tahun 1998 ini mengembangkan *smartphone* yang tidak memerlukan lagi pulsa, cukup membawa teknologi VoIP (*voice over internet protocol*) ke dalam ponsel. Menghubungi ponsel orang tidak lagi menggunakan nomor, tetapi cukup dengan *account* surat elektronik GMail di ponsel. Suatu langkah yang bakal membuat operator telekomunikasi gulung tikar. Berbagai spekulasi kemudian merebak membuat orang semakin bertanya-tanya.

Di antara berbagai spekulasi itu ada yang menyatakan bahwa apa yang disebut GPhone itu bukanlah *hardware* dengan bentuk fisik layaknya ponsel seperti iPhone milik Apple, tetapi lebih merupakan sistem operasi (*operating system*) telepon *open source* (sistem terbuka). Spekulasi inilah yang rupanya menjadi kenyataan.

Sistem operasi telepon *open source* yang diperkenalkan awal November itu diberi nama Android. Google bersama 33 perusahaan yang bergerak di bisnis perangkat lunak, perangkat keras, internet, dan telekomunikasi membentuk konsorsium dengan Open Handset Alliance (OHA) untuk mengembangkan sistem operasi, antarmuka, dan aplikasi yang didesain untuk mempercepat adopsi internet ke dalam ponsel. Android dibangun dengan kode pemrograman yang terbuka sehingga pengguna dapat melakukan inovasi dengan menciptakan fitur-fitur yang dapat dimanfaatkan bersama, seperti halnya Linux pada piranti lunak komputer.

Nama Android sebenarnya tidak terlalu asing sebab pada awal tahun 2005, Google diam-diam telah mengakuisisi sebuah perusahaan *software mobile* milik Andy Rubin, yang kebetulan bernama Android. Andy Rubin kemudian diserahi tugas untuk mengembangkan Android di Google. Android yang rencananya akan dirilis pada kuartal kedua tahun 2008 ini juga menggandeng perusahaan semikonduktor seperti Intel dan NVIDIA. Pabrik *handset* dipercayakan pada empat perusahaan, yakni LG, HTC, Motorola, dan Samsung Electronics. Sedangkan operatornya diserahkan antara lain pada T-Mobile (Amerika), China Mobile, NTT DoCoMo (Jepang), dan Telefonica (Spanyol) dan Telecom (Italia).

Fitur maupun spesifikasi apa saja yang dimiliki "bayi" yang disinyalir bakal menciptakan revolusi di bidang telepon bergerak ini sudah bisa diintip di internet via situs video populer *YouTube*. Dalam tayangan video demo singkat itu ditampilkan kemampuan Android yang cukup mengesankan. Kemampuan Android bahkan hampir menyamai kemampuan dan fasilitas komputer *desktop* seperti *chatting*, *browsing internet* yang lebih keren, Google map dengan teknologi GPS, memainkan game 3D, fitur jaringan sosial, *e-mail*, *video sharing*, hingga menunjukkan alamat kontak lengkap dengan peta lokasinya. Layar sentuhnya pun sudah menyamai (bahkan melebihi) layar iPhone. Kita bisa memainkan jari dan respon yang didapat di layar sama dengan gerakan jari kita itu.

Demi meningkatkan kemampuan sistem operasi Android, sebuah tantangan menarik disodorkan oleh Google. Mereka yang mampu mengembangkan *software* terbaik bisa mendapat hadiah senilai US$ 10 juta atau senilai Rp 92 miliar (1 USD = Rp 9190). Dalam tantangan yang ditawarkan Google ini, akan disaring 50 pemenang dari semua peserta yang masuk mulai tanggal 2 Januari hingga 3 Maret 2008. Di putaran pertama, masing-masing pemenang akan memperoleh US$ 25.000 dan berkesempatan untuk menyabet hadiah senilai US$ 100.000 dan hadiah lain senilai US$ 275.000. Di putaran kedua, kontestan akan memperebutkan hadiah senilai US$ 5 juta. Namun, Google tidak menjelaskan secara terperinci bagaimana proses penjuriannya nanti. Beberapa bidang yang direkomendasikan Google untuk lomba *Android Developer Challenge* termasuk *social networking* alias jejaring sosial, foto atau *media sharing*, aplikasi produktivitas seperti *e-mail* dan *Instant Messaging*, *gaming*, serta berita dan informasi.

Keputusan Google melirik

bisnis yang selama ini dikuasai Nokia atau Samsung tidak lain karena pengguna ponsel saat ini mendekati angka tiga miliar di seluruh dunia. Google ingin menancapkan pengaruhnya sekaligus menggali iklan yang maksimal atas ponsel yang kita bawa ke mana-mana. Berdasarkan perhitungan Informa Plc, sebuah perusahaan riset yang berbasis di London, Inggris, belanja iklan pada telepon bergerak melonjak tajam menjadi 11,4 miliar dollar AS di seluruh dunia pada 2011 dari "hanya" 2,17 miliar dollar AS saat ini. Google yang bermarkas di Mountain View, California, Amerika Serikat, diperkirakan bakal meraih 99 persen iklan telepon bergerak yang berarti lebih dari 10 miliar dollar AS per tahun, di mana sebagian besarnya diperoleh dari hasil menjual *link* teks saja.

Google melihat ponsel akan dijadikan alat utama untuk terkoneksi ke internet dibandingkan PC. Kalau sebuah ponsel sudah memiliki kemampuan setara dengan PC dalam fitur maupun kemampuan pemrosesannya, untuk apa membawa laptop atau palmtop? Sebab sudah berkembang tren dimana orang bisa mem-*posting* sesuatu ke situs pribadinya cukup lewat ponsel di bandara atau bahkan di toilet. Menerima dan mengirim surat elektronik malah sudah lebih umum lagi. Bahkan membaca berita terkini pun bisa sambil tiduran. Peluang inilah yang dilirik Google. ■ **MLP**

Kabar Baik untuk Penggila Buku

Anda bisa mengunduh buku apa saja, buku yang sedang beredar atau pernah beredar dalam sebuah perangkat kurang dari satu menit.

Visi inilah yang disampaikan Jeff Bezos, bos sekaligus Chief Executive Officer Amazon.com saat memperkenalkan Kindle, sebuah *gadget* pembaca buku digital (*e-book reader*) yang juga bisa digunakan untuk mengakses situs web.

Kindle berbeda dengan *e-book reader* lainnya yang sudah ada di pasaran karena mempunyai kemampuan akses internet lewat jaringan EVDO (*Evolution Data Only*) milik operator telekomunikasi seluler Sprint sehingga pengguna bisa mengunduh langsung buku digital ke Kindle tanpa perantara komputer.

Dalam wawancaranya dengan TechCrunch (20/11), Jeff Bezos mengatakan perangkat yang bisa menyimpan 200 buku sekaligus dalam memori internalnya ini ditujukan bagi penggila buku dan juga orang yang gemar melakukan perjalanan. "Menggunakan ini akan jauh lebih baik daripada membaca koran di pantai dan halaman-halamannya beterbangan ke mana-mana," ujar Bezos.

Amazon menghabiskan tiga tahun untuk merancang bangun peranti seharga US$ 399 (Rp 3,68 juta) tersebut. Kelebihan Kindle dibanding *reader* lainnya adalah menggunakan layar hitam putih dengan teknologi *e-Ink*, dikembangkan oleh perusahaan yang berbasis di Cambridge, Massachusetts, Amerika Serikat. Teknologi itu memungkinkan Kindle untuk dibaca di luar ruangan di bawah terik matahari. Di sisi lain, sama seperti buku, untuk membaca Kindle dibutuhkan penerangan karena layarnya tidak memancarkan cahaya (*backlight*). Di sisi lain, peranti ini menjadi butuh sedikit tenaga dan menghasilkan panas yang sedikit karena tidak ada *backlight* pada layar. Boleh dibilang, Kindle menjelma bagaikan iPod namun untuk buku digital. Sedangkan situs Amazon akan menjadi layaknya situs iTunes sebagai distributor kontennya.

Meski memiliki berbagai kelebihan, Kindle juga mempunyai kekurangan. Desainnya dinilai kurang elegan (buruk) meskipun ergonomis. Harga *content*-nya juga terbilang tinggi. Layar hitam-putih memang baik untuk buku, tapi kurang menarik untuk konten web. Juga tak tersedia browser web sejati untuk pengalaman menjelajah Internet yang lebih nyaman.

Jika dibandingkan dengan produk Sony Reader yang diluncurkan tahun lalu, dimensi Kindle lebih besar dan lebih tebal. Kindle seukuran dengan sebuah buku *paperback*. Bobot Kindle sekitar 292 gram. Harga Sony Reader pun lebih murah, yakni US$ 300 (Rp 2,76 juta). Tapi Sony Reader tak memiliki koneksi Internet dan memori internalnya hanya 192 megabita.

Untuk satu file PDF yang dikirimkan ke Kindle, dikenai biaya US$ 10 sen, sementara untuk melihat file PDF, Sony tak mengenakan biaya.

Kalau ingin membeli buku, Amazon belum mencapai kesepakatan harga dengan kalangan penerbit. Namun, menurut beberapa eksekutif, harga penerbitan versi elektronik sebuah buku sampul tebal yang harga jualnya US$ 27 adalah US$ 20. Harga eceran *e-book* untuk buku seharga US$ 20 adalah US$ 10. Kalau Amazon berani menjual satu *e-book* seharga US$ 9,99, mereka tak akan mendapatkan laba.

Selain untuk membaca buku, Kindle bisa digunakan untuk berlangganan koran, majalah dan blog. Untuk berlangganan The New York Times, misalnya, dikenai biaya bulanan US$ 13,99 atau US$ 9,99 per bulan untuk The Wall Street Journal. Ada sekitar 300 blog yang tersedia di layanan Kindle, termasuk blog Slashdot, The Onon, Boing-Boing, dan Techcrunch. Satu blog dikenai biaya bulanan sekitar US$ 1. Pengguna pun bisa berkomentar pada blog, menuliskan catatan tentang buku yang dibacanya serta mengirimkan e-mail melalui alat ini. ■ **MLP**

Para pemimpin negara Asean pada KTT ASEAN Ke-13 di Singapura.

foto: repro sinar harapan

Piagam ASEAN Bersatu

KTT ASEAN mencapai puncak keberhasilan dengan penandatanganan Piagam ASEAN. Tetapi soal Myanmar, ASEAN terbukti bersikap lemah.

Konperensi tingkat tinggi (KTT) para pemimpin perhimpunan negara-negara Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN, yang berlangsung di Singapura 19-22 November 2007, berhasil menelurkan sejumlah keputusan penting. Salah-satunya yakni penandatangan Piagam ASEAN atau ASEAN Charter. Piagam ini akan menentukan masa depan ASEAN dalam percaturan global.

Penandatangan Piagam ASEAN dilakukan oleh 10 kepala negara ASEAN, yaitu Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Filipina Gloria Macapagal Arroyo, Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah, PM Malaysia Abdullah Ahmad Badawi, PM Thailand Surayud Chulanont, PM Kamboja Hun Sen, PM Laos Bouasone Bouphavanh, PM Vietnam Nguyen Tan Dung, PM Singapura Lee Hsien Loong dan PM Myanmar, Thein Sein.

Salah satu point terpenting Piagam ASEAN adalah soal demokrasi dan komitmen HAM. ASEAN sepakat untuk mengatur dan membentuk Badan HAM ASEAN.

Piagam ASEAN mempertegas tujuan utama ASEAN dalam memperkuat demokrasi, mewujudkan pemerintahan yang bersih, penegakan hukum dan melindungi HAM, serta membentuk badan penyelesaian sengketa ASEAN.

Piagam ASEAN yang ditandatangani berisikan pula peraturan organisasi, yang tetap mempertahankan prinsip konsensus dan konsultasi dalam keputusan, dan tidak mencampuri urusan dalam negeri anggota.

Sekjen ASEAN, Ong Keng Yong, mengaku puas dengan ditandatanginya Piagam ASEAN. Setidaknya, demikian Ong, Piagam ini akan mengikat ASEAN secara hukum. Diakuinya Piagam masih harus diratifikasi oleh masing-masing anggota ASEAN dalam jangka waktu satu tahun ke depan. Memang, sejauh ini belum ada pembicaraan mendasar mengenai sanksi bagi negara yang tidak mengikuti himbuan atas isi piagam itu.

Keputusan lainnya adalah Penandatanganan KTT Area Pertumbuhan, meliputi Indonesia-Malaysia-Pilipina-Asia Timur (BIMP-EAGA). Kemudian Penandatanganan KTT Segitiga Pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Thailand (IMT-GT), Penandatanganan KTT ASEAN+3 (Jepang, China, Korea Selatan), Penandatanganan ASEAN+China, ASEAN +Jepang, ASEAN+Korea Selatan, ASEAN+India, dan Deklarasi ASEAN mengenai sesi ke-13 Konferensi Perubahan Iklim *(ASEAN Declaration on the 13th Session of the Conference on Climate Change/ UNFCCC)*, dan *the 3rd Conference of Parties Serving as the Meeting of the Parties (CMP) to the Kyoto Protocol.*

Sidang KTT ASEAN kali ini juga menghasilkan penandatanganan cetak biru komunitas ekonomi Asean, atau *ASEAN Economic Community (AEC)*. Intinya, bertujuan menjadikan ASEAN sebagai satu kesatuan pilar perekonomian dimana investasi, aliran perdagangan, mobilitas pencari kerja akan relatif mudah dan bebas pada arena kawasan ASEAN. AEC juga berisi integrasi ekonomi,

Fokus ASEAN Economic Community:

- Segala hambatan yang terjadi pada sektor transportasi udara, kesehatan, turisme harus bisa diatasi hingga tahun 2010.
- Kepemilikan saham asing yang ada di semua negara ASEAN harus ditingkatkan hingga maksimal 70 persen pada tahun 2015.
- Hambatan bidang logistik harus dihapuskan secara total pada tahun 2013.
- Beberapa bidang jasa lainnya harus dihapus mulai tahun 2015.
- Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, Philipina dan Thailand diberi batasan waktu melakukan satu entisitas perekonomian tahun 2015.
- Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam harus membangun transportasi, telekomunikasi, mempersiapkan pekerja terampil dan perbaikan sistem hukum hingga batas waktu 2018.

dengan menyerukan adanya sebuah pasar tunggal yang didasarkan pada stabilitas, kemakmuran, dan kompetisi ekonomi yang terintegrasi.

Pembentukan pasar tunggal ekonomi ASEAN disepakati dipercepat dari target semula tahun 2020, menjadi tahun 2015. Sebagai langkah awal, akan dilakukan *single window* atau satu pintu ASEAN pada tahun 2008.

Myanmar Bukan Urusan

Walau berhasil menelurkan berbagai keputusan penting, sejumlah kalangan merasa kecewa ASEAN tidak menjadikan persoalan Myanmar sebagai isu pembicaraan penting. Timbul kesan ASEAN cenderung "melindungi" Myanmar.

Utusan khusus PBB, Ibrahim Gambari, juga batal melakukan pertemuan resmi dengan 10 pemimpin negara ASEAN mengenai perkembangan Myanmar.

Sebelumnya, indikasi persoalan Myanmar tidak akan masuk dalam agenda penting pembahasan KTT telah terlihat tatkala Perdana Menteri (PM) Singapura Lee Hsien Loong menyampaikan hasil diskusi usai jamuan makan malam para pemimpin anggota ASEAN, Senin (19/11). Lee selaku tuan rumah sekaligus Chairman ASEAN, pada kesempatan itu mengutarakan keberatan PM Myanmar, Thein Sein, apabila persoalan Myanmar dibawa sebagai issu sentral ke dalam arena KTT ASEAN.

Lee juga menyatakan pembatalan agenda utusan PBB Ibrahim Gambari, yang sedianya akan menyampaikan secara resmi hasil lawatan ke Myanmar beberapa bulan sebelumnya.

Untuk hal yang satu ini Lee memberi alasan, Gambari sebagai utusan khusus tidak mempunyai wewenang dan otoritas untuk melaporkan hasil kerjanya kepada ASEAN, atau pada KTT Asia Timur. Gambari lebih mempunyai kewajiban untuk melaporkan apa yang telah dilakukannya pada Dewan Keamanan PBB.

Para pemimpin ASEAN akhirnya sepaham dengan keputusan Lee, dengan lebih mendukung dan menghormati pilihan Myanmar untuk menempuh jalannya sendiri yaitu berhubungan langsung dengan PBB dan komunitas internasional.

Pembatalan itulah yang menuai berbagai kecaman sekaligus kekecewaan. Khin Ohmar, mantan aktivis Myanmar yang pernah melakukan demonstrasi di Myanmar tahun 1998 menilai, ASEAN telah mengalami kemunduran dan mengambil langkah buruk dan ini merupakan aib besar bagi ASEAN.

Hal senada diungkapkan Sean Turnell, ahli Myanmar dari Macquarie University, Australia, yang menyatakan kecewa dan menilai apa yang dilakukan ASEAN merupakan sebuah keputusan yang tidak mendasar.

Kecamanan serupa disampaikan Hiro Katsumata, spesialis atau pakar ASEAN dari S Rajaratnam School of Internasional Studies, Singapura. Dia menyatakan reputasi ASEAN telah dipertaruhkan hanya untuk Myanmar. Myanmar seolah dipandang sebagai "tamu kehormatan", yang dengan mudahnya memblokir issu yang sudah akan memojokkannya.

Nada kecewa juga dilontarkan Perdana Menteri Selandia Baru, Helen Clark, yang merasakan kekecewaan mendalam terhadap sikap yang diambil ASEAN. Padahal, menurut Clark pertemuan ASEAN adalah sebuah kesempatan emas mendengar langsung dari orang penting Myanmar mengenai apa yang terjadi sebenarnya di negara yang dipimpin Junta Militer, Jenderal Than Thwe.

Sebagaimana diketahui, demonstrasi besar-besaran terjadi di Myanmar Oktober lalu, dipicu oleh kenaikkan harga minyak tanah yang 500 persen. Demonstrasi melibatkan ribuan biksu dan 100 ribu warga sipil, menelan korban jiwa 13 orang tewas dan ribuan lainnya ditangkap. Bahkan, seorang wartawan Jepang Kenji Nagai tewas akibat ditembus peluru Junta Militer. Demikian pula nasib pejuang pro demokrasi Aung San Suu Kyi yang hingga kini belum dibebaskan. ■ ZAH

Cinta Ratu Pandangan Pertama

Pemimpin Kerajaan Inggris Ratu Elizabeth II, dan Pangeran Philip suaminya, merayakan pernikahan berlian. Ungkapan lama cinta pada pandangan pertama tak akan mudah terlupakan, sangat tepat bila ditujukan kepada pasangan Ratu Ellizabeth II dan Pangeran Philip, suaminya. Keduanya melewati usia pernikahan selama 60 tahun, atau memasuki pernikahan berlian, sesuatu yang terjadi untuk pertamakalinya dalam sejarah monarki Kerajaan Inggris.

Ratu dan Pangeran dipersatukan oleh cinta pada pandangan pertama. Sebab, sesungguhnya, keduanya mempunyai sifat dan watak yang bertolak belakang. Ratu cenderung tipikal serius, pemalu dan tertutup. Sedangkan Pangeran orang yang terbuka, humoris, dan memiliki relasi sosial yang luas.

Tetapi perbedaan itulah yang justru merekatkan tali pernikahan mereka, membuat biduk perjalanan rumahtangga bertahan hingga saat ini.

Awal pertemuan Sang Ratu yang memiliki nama lengkap Elizabeth Alexandra Mary, dengan Pangeran Philip dimulai tahun 1939. Saat itu Ratu berusia 13 tahun, sementara Pangeran yang merupakan saudara sepupu jauh dari Yunani, berusia 18 tahun. Sesudah delapan tahun berhubungan, pada tanggal 20 November 1947, saat sisa-sisa suasana perang dunia II masih melanda Inggris, keduanya menikah di Westminster Abbey. Pasangan ini kemudian tinggal di Malta dimana Pangeran, yang merupakan Perwira Angkatan Laut Kerajaan Inggris berpangkat Letnan, ditempatkan.

Di sana mereka hidup bahagia sampai akhirnya semua berubah setelah pada tanggal 2 Februari 1952, ayah sang Ratu yaitu Raja George VI wafat. Keduanya kembali ke Istana. Memasuki usia 25 tahun. Ratu dinobatkan menjadi Ratu Inggris. Pangeran Philip pun harus menanggalkan karier militer untuk mengikuti Ratu.

Walaupun tinggal dalam satu istana tetapi keduanya seperti tinggal di lingkungan terpisah. Ketika Ratu, yang saat ini memasuki usia 81 tahun, berjalan, Pangeran harus berjalan beberapa langkah di belakang.

Begitu pula saat mendampingi Ratu pada pertemuan resmi, atau acara-acara seremonial lainnya, Pangeran yang saat ini berusia 86 tahun hanya bisa duduk diam di samping Ratu.

Urusan mendidik anak pun diberikan sepenuhnya kepada Pangeran Philip. Dia mendidik keras keempat anak mereka, Putri Anne, Pangeran Charles, Pangeran Andrew dan Pangeran Edward.

Sekalipun Ratu berada pada posisi yang lebih dominan, Pangeran Philip tak merasakan gusar. Tetapi malah sebaliknya Pangeran menanggapi dengan bijak. Baginya, apa yang telah dilakoni atas dasar komitmen bersama. Sebab kata kunci terpenting kelanggengan sebuah rumah tangga, menurut Pangeran Philip adalah toleransi antar pasangan.

Hal senada diungkapkan Ratu yang banyak memuji Pangeran Philip. Bagi Ratu, Pangeran Philip bagai sosok yang selalu memberikan kekuatan dan penopang hidup. Menurut Ratu, Pangeran Philips selama ini lebih banyak mendengarkannya. Ratu mengakui atas nama keluarga bahkan Kerajaan Inggris berhutang budi kepada Pangeran Philips.

Ratu menyampaikan hal itu pada peringatan pernikahan berlian mereka pada 20 November 2007, di tempat mereka menikah dulu di Wesminster Abbey, Inggris. Ratu juga mengucapkan terima kasih atas dukungan semua orang kepadanya. ■ ZAH

Sejauh ini banyak kalangan mempercayai bahwa autisme disebabkan oleh proses patologis yang sudah dimulai dari dalam kandungan

Autisme dan TV

Menonton TV dipercaya dapat menyebabkan autisme, tetapi sepertinya ada penjelasan lain yang lebih baik.

Siapa yang tidak menyukai penjelasan sederhana terhadap masalah yang rumit? Apalagi kalau penjelasan sederhana itu ditujukan bagi masalah serumit autisme. Autisme adalah penyakit yang disebabkan oleh adanya kelainan pada otak, yang jumlah penderitanya meningkat secara tajam dan misterius selama 30 tahun terakhir.

Bruno Bettelheim, yang berprofesi sebagai seorang psikolog mengatakan penyebab autisme pada anak adalah karena si ibu tidak memberi perhatian kepada anaknya. Lalu ada juga yang mengatakan penyebab autisme adalah faktor genetik dalam diri seseorang yang rentan terhadap pengaruh faktor x dari lingkungan. Dan ada juga yang mengatakan autisme dapat disebabkan oleh peptisida, pemberian vaksin kepada anak-anak, dan thimerosal, yaitu bahan campuran merkuri yang digunakan untuk mengawetkan vaksin.

Tetapi penjelasan terbaru mengenai penyebab autisme adalah: Televisi! Hah, bagaimana bisa? Adalah Gregg Easterbrook yang menggemparkan dunia blog di internet dengan artikelnya yang berjudul: *TV Benar-Benar Dapat Menyebabkan Autisme*. Tulisan itu dibuatnya berdasarkan hasil penelitian yang belum dipublikasikan dari Universitas Cornell. Tetapi yang mengherankan adalah penelitian tersebut bukan berasal dari sesesorang yang berkuliah di fakultas kedokteran, melainkan seseorang dari fakultas manajemen yang bernama Michael Waldman.

Tidak adanya bukti medis yang mendukung pernyataannya itu tidak mengganggu Michael. Dia juga tidak terganggu dengan kenyataan bahwa dia tidak memiliki data yang dapat diandalkan mengenai perilaku anak-anak berusia 1 hingga 3 tahun, yaitu rentang usia dimana simpton autisme sering ditemui pada anak-anak.

Jadi apa data yang digunakan oleh Michael untuk membuktikan pernyataannya itu? Michael bersama ke dua orang temannya yang berprofesi sebagai seorang ekonom melakukan sesuatu yang tidak akan dilakukan para ilmuwan pada umumnya, yaitu pengukuran tidak langsung yang ekstrim. Mereka mencari data yang berisi informasi mengenai orang-orang yang mendaftar sebagai pengguna TV Kabel (alasannya adalah semakin banyak rumah-rumah yang memiliki TV Kabel maka semakin banyak anak yang menonton) dan mereka juga mencari tahu mengenai pola hujan (alasannya, karena ada penelitian yang membuktikan bahwa ada korelasi antara menonton TV saat cuaca hujan). Data-data itu mereka kumpulkan dari tiga negara bagian yaitu California, Pennsylvania, dan Washington.

Hasilnya adalah sebagai berikut: "Kira-kira 17% dari pertumbuhan autisme di California dan Pennsylvania selama tahun 1970 dan 1980 terjadi bersamaan dengan pertumbuhan pengguna TV Kabel," dan "hanya di bawah 40 persen dari penderita autis di ketiga daerah itu berasal dari akibat menonton TV selama hujan turun.

Kritik muncul dengan cepat menanggapi hasil penelitian itu dan mempertanyakan bagaimana para peneliti dapat membuat kesimpulan sebab akibat tanpa disertai pengukuran mengenai perilaku menonton yang sesungguhnya. Lagipula hasil penelitian itu bisa juga diinterpretasikan secara beda yaitu kurangnya aktivtias di luar rumahlah yang menjadi penyebab autisme. Sepertinya hasil penelitian itu masih membutuhkan banyak hal yang harus diteliti untuk membuktikan kebenarannya. "Lagipula," ujar Craig Newschaffer, seorang epidemiologis dari Universitas Drexel, "Mereka mengacuhkan bukti-bukti fisik yang masuk akal yang menunjukkan bahwa autisme disebabkan oleh proses patologis yang sudah dimulai dari dalam kandungan."

Sekelompok ahli mengatakan bahwa adanya variasi gen berhubungan dengan meningkatnya kemungkinan seseorang terkena autisme. Masalah gen sangat menarik untuk diperhatikan karena gen mengolah protein yang aktif di otak (bagian yang paling dipengaruhi oleh autisme) dan juga sistem kekebalan dan saluran pencernaan, keduanya dapat berfungsi buruk pada orang yang terkena autisme.

Seperti halnya kanker, mungkin ada banyak hal yang bisa menjelaskan autisme, melibatkan kombinasi gen dan pengaruh yang membahayakan. Tetapi apakah benar autisme dapat disebabkan karena menonton TV? Sepertinya autisme dimulai jauh sebelum seseorang duduk berlama-lama di depan TV. ■ **TIME-DAP**

foto: kapanlagi.com

Titiek Puspa

Setengah Abad Pengabdian

Berbagai karya lahir dari goresan tangan Titiek Puspa selama melakoni dunia seni hingga usia 70 tahun. Dia memiliki multi talenta seni yang luar biasa.

Titiek Puspa, insan seni serbabisa memasuki usia yang ke-70. Dia seorang perempuan Indonesia yang punya karier musik terbentang dari era Presiden Soekarno hingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Penghargaan dari Musium Rekor Indonesia (MURI) yang diberikan pada konser "Karya Abadi Sang Legenda: 70 Tahun Titiek Puspa, merupakan acara pamungkas rangkaian peringatan hari ulang tahunnya. Penghargaan yang diberikan langsung Jaya Suprana itu sebagai bukti eksistensi dan pengabdiannya di dunia seni.

Dalam waktu dekat, Titiek juga akan meluncurkan album baru garapan Tohpati. Lagu itu didekasikan untuk para penggemar berusia 30-40 tahunan.

Semua karya yang lahir dari Titiek, bercerita sebuah realita kehidupan yang dia lihat secara nyata. Salah-satu contoh, lagu *Gang Kelinci* yang menggambarkan kehidupan sebuah gang yang sempit di Jakarta. Di tempat itu manusia hidup saling berimpitan. Lagu ini dipopulerkan Almarhumah Lilis Suryani. Atau lagu berjudul *Bing*, lagu ini diciptakan tahun 1973 dalam tempo hanya 30 menit saat Titiek berada dalam pesawat. Lagu yang dinyanyikan sendiri oleh Titiek ini berkisah mengenai persahabatannya dengan tokoh film komedi Almarhum Bing Slamet. Begitupun lagu *Pantang Mundur* yang syairnya berisi mengenai sikap patriotik atau kepahlawanan.

Pada masa kejayaan film Indonesia, sedikitnya enam judul film pernah ia bintangi, *Minah Gadis Dusun* (1965), *Di Balik Cahaya Gemerlapan* (1976), *Inem Pelayan Seksi* (1976), *Karminem* (1977), *Rojali dan Juleha* (1980), *Gadis* (1981), dan *Koboi Sutra Ungu* (1982).

Orang tuanya, pasangan mantri kesehatan Tugeno Puspowidjojo dan Siti Mariam, semula memberinya nama Soedarwati. Lalu diganti Kadarwati kemudian Soemarti. Setidaknya tiga kali Titiek ganti nama, ini karena ia sering sakit-sakitan. Sejak tahun 1953, publik mengenalnya dengan Titiek Puspa.

Anak keempat dari 12 bersaudara itu mempunyai tiga prinsip hidup; berani, tekun, dan jujur. Perjalanan kariernya di dunia seni tidaklah semulus jalan tol. Tantangan pertama justru berasal dari orangtuanya, terutama ayahnya yang tak menginginkan Titiek menjadi penyanyi. Tahun 1965, gara-gara sebuah kesalahpahaman, Titiek sempat diboikot dan namanya tenggelam tak pernah lagi muncul di media. Sekitar tahun 1980-1982 Titiek kehilangan kemampuan berbicara. Saat mengalami masa-masa sulit itu Titiek hanya bisa pasrah pada Allah. Dia memohon dan berdoa pada sang pencipta.

Rahasia Awet Muda

Bagi umumnya wanita, menjadi tua, tidak menarik dan kulit mulai keriput menjadi sesuatu yang amat menakutkan. Berbagai upaya akan dilakukan agar penampilan tetap segar dan sehat serta tetap energik, kendati usia tidak muda lagi.

Bagaimana dengan perempuan kelahiran Tanjung, Kalimantan Selatan, 1 November 1937 yang masih tampak awet muda ini.

Titiek mengaku sempat "sewot" ketika banyak orang yang bertanya dan menyangka dirinya melakukan operasi plastik. Guna membuktikan kebenaran, ia sampai meminta sipenanya melihat secara dekat dan memperhatikan seksama wajahnya. Titiek mengaku kalau dirinya punya keloid, artinya, kalau kulitnya tertoreh pisau, secara otomatis malah akan timbul dan tumbuh daging baru.

Bila seseorang ingin memiliki pipi yang tetap kencang dan tak cepat kendur serta perut tidak bergelambir, menurut istri almarhum Mus Mualim ini, haruslah mengatur pola tidur, yakni dengan cara tidur terlentang. Ibu dari Petti dan Ella ini pun mengaku kalau dirinya membiasakan diri tidur terlentang sejak usia 35 tahun.

Kemudian, Penerima penghargaan Pengabdian Panjang Dunia Musik atau BASF Award ke-10 tahun 1994 ini juga rajin berolahraga. Ada dua jenis olahraga yang kerap dijalaninya, yakni olahraga napas dan jalan-jalan santai. Soal makanan, dia mengganti masakan yang mengandung santan dengan susu tanpa lemak.

Dengan ketulusan hati dan lapang dada Titiek selalu mengucapkan *welcome* pada pendatang baru dunia seni dan musik Indonesia, terutama munculnya bintang-bintang muda.

Pada ulang tahunnya yang ke-70 yang jatuh pada Kamis (1/11), Titiek mengirim 200 surat yang salah satu isinya minta maaf dan ucapan terima kasih. Orang hidup itu, menurut Titiek, tempatnya lupa. Oleh sebab itu sebagai manusia haruslah selalu ingat dan berhati-hati dalam bertingkah. "Segala dinamika kehidupan yang telah saya lalui merupakan bonus dari Tuhan. Saya harus terus-menerus bersyukur kepada-Nya," katanya. Itu salah satu pesan yang membuat Titiek tetap "Muda" sampai saat ini. ■ ZAH

Ini KPK Asli atau Palsu?

Hampir semua proyek pemerintah di Kota Tarakan bermasalah. Anehnya, tak satu pun yang ditindaklanjuti secara hukum.

Harapan masyarakat di Kota Tarakan agar kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) bisa diusut sampai tuntas, agaknya hanya sebuah mimpi. Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari Jakarta yang turun ke Tarakan, Kalimantan Timur beberapa waktu lalu, tak bisa menjerat seorang pun sebagai tersangka. Padahal disinyalir, tidak satu pun proyek pemerintah di sana terbebas dari masalah KKN.

Banyak pihak khawatir penanganan kasus-kasus korupsi di pulau yang dijuluki *New Singapore* itu hilang tanpa bekas. Sebab, beberapa kasus yang sempat ditangani Kejaksaan Negeri Tarakan dan tim KPK tak satu orang pun yang berhasil diseret ke pengadilan. "Aku curiga, mengapa KPK jadi mandul atau apakah mereka sudah dapat bagian?," kata H Fadlan Hamid, anggota DPRD Tarakan kepada *Berita Indonesia*.

Anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) itu meminta aparat hukum, baik kepolisian maupun Kejaksaan merespon dan menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ke jalur hukum. Mereka bisa mengacu kepada hasil pemeriksaan yang telah dilakukan BPK sebagai bahan awal pengusutan. "Kepolisian pro-aktiflah menyikapi masalah ini," katanya.

Sejumlah hasil pemeriksaan atas belanja daerah pada Pemerintah Kota Tarakan tahun anggaran 2006 yang dilakukan BPK yang *photo copy*-nya beredar di kalangan masyarakat Tarakan, mengindikasikan betapa mengguritanya kasus korupsi di kota itu.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Tarakan, Ir Djamaluddin, Rabu pekan lalu yang ditanyai soal tiga paket pekerjaan pembangunan senilai Rp 61.882.171.965,51.- yang kondisinya rusak, dengan santai menjawab "tidak ada yang harus dipermasalahkan". Ketiga proyek itu adalah pembangunan Gedung Universitas Borneo (UB) tahap dua, dengan nilai kontrak Rp 46,805 milyar lebih, penataan kembali eks kebakaran Pasar Beringin, dengan nilai kontrak Rp 6,670 milyar lebih, serta pembangunan gedung Akademi Perawat (Akper) dengan nilai kontrak Rp 5,712 milyar lebih.

foto: berindo ist

Gedung Universitas Borneo: Di bawah naungan swasta.

Menurut Djamaluddin, gedung Akper yang berdasarkan pemeriksaan BPK terjadi penurunan struktur sedalam 30 Cm, retak-retak horizontal, dan diagonal pada dinding dan lantai serta kemiringan rata-rata 3 Cm sudah diperbaiki. "Semua sudah diperbaiki kontraktornya koq. Gak ada masalah lagi," katanya yakin.

Tapi dari hasil pemantauan di gedung Akper yang dibangun di komplek Rumah Sakit Umum (RSU) Tarakan ini,

Koruptor di Bulungan

Pelaku korupsi di Kabupaten Bulungan satu per-satu dipenjarakan. Masyarakat sangat diharapkan memberi masukan.

Dugaan warga masyarakat bahwa Kalimantan Timur Wilayah Utara merupakan surga bagi para koruptor tidak seluruhnya benar. Jika di Kabupaten Nunukan, Malinau, dan Kota Tarakan, para 'tikus-tikus' itu masih merajalela, di Kabupaten Bulungan satu per-satu tersangka koruptor mulai merasakan pengap dan dinginnya ruang tahanan.

Drs Dar, Camat Tanjung Palas Timur, dan Drs H Ar, Kasi PMD Kecamatan Tanjung Palas Utara, tersangka kasus tindak pidana korupsi Subsidi Ongkos Angkut (SOA) beras keluarga miskin (Raskin) harus mendekam di ruang tahanan. Keinginannya untuk bisa menjalani tahanan rumah tidak dikabulkan Imam Santoso, SH Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, yang mengadili perkara tersebut.

Nasib yang sama juga menimpa Kepala Dinas Perdagangan Perindustirian dan Koperasi (Disperindagkop) Kabupaten Bulungan, Drs M.I. Lelaki ini diduga melakukan tindak pidana korupsi pada proyek pengadaan mesin penggiling padi ketika menjabat Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan, tahun 2006 lalu.

Dari hasil penyelidikan diketahui, pengadaan mesin giling padi dan alat *white combine* yang dibeli melalui proyek tahun anggaran 2006 senilai Rp 1.437.000.000,- tidak sesuai dengan kontrak. Dalam kontrak disebutkan, mesin yang dibeli adalah merk *"Kutama"* berkapasitas giling tiga ton per jam. Tapi yang didatangkan mesin merk *"Daihu"* kapasitas giling satu setengah ton per jam yang kualitas dan harganya jauh lebih murah.

foto: berindo sl pohan

Lahan sawah dan irigasi di Selimau: Tidak pernah berfungsi.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tanjung Selor, Muslikhuddin, SH. MH yang di didampingi Kasi Pidana Khusus, Daniel P SH dan Jaksa yang menangani kasus itu, Ishak, SH mengatakan, M.I bersama Direktur CV Dangan Taka, R alias Ch ditahan

tidak terdapat perubahan. "Jika mau diperbaiki, gedung ini harus dibongkar total," tutur beberapa orang berseragam putih-putih kepada Asmuddin dari *Berita Indonesia*. Sebab keretakan dan kemiringan bangunan itu terjadi karena fondasinya turun.

Ketua DPD Generasi Muda Gerakan Karya Rakyat Indonesia (GM GAKARI) Kota Tarakan, Ikram Mahmud, S.Sos menyayangkan belum adanya keseriusan para penegak hukum dalam menyikapi kasus-kasus korupsi di Tarakan. Dia, memberi contoh hasil pemeriksaan BPK atas belanja daerah Pemkot Tarakan anggaran tahun 2006. "Jumlahnya mencapai belasan proyek dengan nilai kerugian negara ratusan milyar rupiah," katanya.

Namun yang membuat Ikram Machmud, yang juga Ketua Bidang Sospol, MPC Pemuda Pancasila Tarakan ini geram, selain temuan BPK, sebenarnya masih banyak kasus yang layak dipermasalahkan. Ia menunjuk pembangunan gedung Universitas Borneo. Universitas ini berada di bawah naungan Yayasan Penakindi atau dengan kata lain dikelola oleh swasta. Perlu dipertanyakan, karena semua biaya pembebasan lahan, pembangunan gedung, laboratorium dan sarana pendukung, yang nilainya ratusan milyar rupiah ditanggung Pemkot Tarakan.

Ikram yang juga duduk sebagai pengurus di Kamar Dagang dan Industri Daerah (Kadinda) Tarakan ini merasa curiga ketika Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bolak-balik datang ke Tarakan. "Ini KPK asli atau palsu ?," ujarnya dengan nada bertanya.

Kasie Pidsus Kejaksaan Negeri Tarakan, Jefri Mangkapedua, SH mengakui banyak kasus dugaan korupsi di Tarakan. Namun, karena terbatasnya jumlah Jaksa, penanganannya seperti jalan di tempat. Untuk tahun ini, Kejaksaan Negeri Tarakan baru dapat menangani kasus korupsi pengadaan tower di Radio Republik Indonesia (RRI) Tarakan. "Dua orang tersangka, direktur dan bendaharanya sudah ditahan. Tinggal menunggu sidangnya," kata Jefri.

Kini tinggal menunggu, apakah berbagai kasus korupsi dan hasil pemeriksaan atas belanja daerah di Kota Tarakan akan dibiarkan tanpa ada tindak lanjutnya?. Kalau masalah ini dibiarkan, maka Tarakan yang dijuluki sebagai Kota *New Singapore*, merupakan surga bagi koruptor. ■ **ASM, SLP, SP**

Polres Bulungan, Tanjung Selor sejak pertengahan November (12/11) lalu.

Keduanya terpaksa ditahan karena dikhawatirkan melarikan diri dan menghilangkan barang bukti. "Kedua tersangka diancam hukuman, minimal 4 tahun dan maksimum 20 tahun," papar Daniel.

Keberadaan kantor Kajari di Tanjung Selor baru sekitar dua tahun, namun berhasil menyeret oknum-oknum tersangka koruptor ke pengadilan berkat adanya laporan masyarakat. "Kami berharap masyarakat memberi masukan dalam menegakkan supremasi hukum. Kejaksaan tidak bisa berjalan sendiri, dan perlu dukungan masyarakat," kata Kajari Tanjung Selor, ketika menerima laporan masyarakat yang disampaikan Ketua DPRD Bulungan di Tanjung Selor, Oktober 2007 lalu.

Beberapa tokoh masyarakat Tanjung Selor, memuji kinerja Jaksa dalam menangani kasus-kasus korupsi yang disampaikan masyarakat untuk dijadikan awal penyelidikan. "Ini merupakan terobosan signifikan dalam membongkar kasus-kasus penyelewengan di Kabupaten Bulungan," kata seorang tokoh masyarakat yang enggan disebut namanya.

Dia meminta pihak kejaksaan memfokuskan diri dan mendalami masalah-masalah di Dinas Pertanian. Karena banyak kasus-kasus lain, misalnya kasus pembukaan lahan persawahan yang setiap titik luasnya 200 hektare. Masing-masing di Transmigrasi Selimau 1 dan 2, Teras Baru dan Teras Nawang, Desa Sekang, Sungai Bira (Antutan) Mara Satu, Long Pari, Sajau 1 dan 2, dan terakhir di Tanah Merah Kecamatan Tanah Lia. Juga pembuatan irigasi, dan pengadaan mesin pompa air di 10 titik. Menurutnya, semua proyek itu amburadul dan tidak pernah dinikmati masyarakat. ■ SLP, SP

Drs H Lily Hambali Hasan Msi

Drs Endang Koswara MSc

Binangkit usung Lily - Endang

Drs H Lily Hambali Hasan Msi dan Drs Endang Koswara MSc menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta. Incumbent ini diusung koalisi "Binangkit", ikon bersama PBB, PDIP, dan PKB ke Pilkada Purwakarta awal tahun 2008.

Drs H Lily Hambali Hasan yang kini masih menjabat sebagai Bupati Purwakarta dan Drs Endang Koswara MSc, ASDA II Bagian Pemerintahan mendapat dukungan penuh dari petinggi PDIP, PKB dan PBB ditingkat pusat dan daerah untuk maju ke Pilkada Purwakarta awal tahun depan.

Pasangan dinilai layak meneruskan suksesi Purwakarta lima tahun ke depan. Lily dan Endang, menurut Ketua DPC PKB Purwakrta H.Agus Marjuki SH, dikenal sebagai pekerja keras yang mengutamakan kepentingan pembangunan daerah. Keduanya mampu bekerja sama tanpa terjadi tarik ulur kekuasaan sebagaimana yang sering menjadi fenomena pascapilkada.

PDIP, PBB maupun PKB, menurut Wakil Ketua DPD PDIP Jabar Rahadi Zahari yang juga anggota DPRD Provinsi Jawa Barat , menilai duet Lily - Endang merupakan kandidat harapan Purwakarta. Tidak hanya bagi partai politik yang mengusungnya, tetapi juga merupakan akumulasi aspirasi masyarakat secara luas.

Pengalaman Lily - Endang dalam birokrasi merupakan aset Purwakarta yang tidak dimiliki kandidat lain yang merupakan syarat dasar pemerintahan yang efektif, ujar Jubir PDIP Ir.Gatot Sriyoso yang diamini Ketua DPC PBB Yudi Sirojudin.

Ketiga partai (PDIP, PKB dan PBB) melihat performa duet ini merupakan ikon yang tepat dan mampu mengakomodir kepentingan berbagai lapisan. Sosok kebapakan yang ditampilkan Lily dan tokoh muda yang melekat pada diri Endang K mengibaratkan pasangan ini abang dengan adiknya yang memberikan simbol keharmonisan yang mampu berinteraksi dan berimprovisasi satu dengan yang lain dalam mengisi tugas kelak jika memenangkan pilkada.

Ketua DPC KNPI Purwakarta M Holil mengingatkan para kandidat konsisten membangun pemuda. Karena hanya kandidat yang memperhatikan pemuda lah yang mampu mendongkrak kemakmuran masyarakat Purwakarta.

Organisasi kepemudaaan yang bergabung dalam KNPI sepakat akan memberikan suara bagi tokoh yang selalu tanggap dan memperhatikan kepemudaan secara luas.

Endang MR Abdulah SH MH dosen fakultas hukum komunikasi Universitas Purwakarta menilai pasangan Lily - Endang K memiliki keunggulan meraih suara. Lily yang kini menjabat bupati memiliki popularitas bagi pemilih perkotaan dan di birokrasi. Sedangkan sosok Endang merupakan representasi tokoh muda Purwakarta yang mendapat tempat yang begitu fanatik dari para pemilih tradisional yang mencakup 70% jumlah pemilih.

Endang K yang menjabat Asda II, Ketua Pengda Percasi, Ketua Pepadi (Persatuan Pedalangan Indonesia) dan Wakil Ketua Badan Musyawarah Putra Daerah Purwakarta (Bamus - PDP) memiliki keunggulan tersendiri. Sehingga pasangan ini diperkirakan akan mampu meraih suara di atas 51 % pemilih. ■ BND, SP

Drs. Rachmat Sulaeman

Demokratisasi Menuntut K

"Dalam berbagai ajang Pilkada, acapkali kita disuguhkan tontonan yang mengusik rasa kebanggaan sebagai bangsa yang beradab dan beretika. Sulit dimengerti, kenapa wajah demokatisasi kita seolah berwatak anarkhisme," tuding Drs. Rachmat Sulaeman, tokoh organisasi kepemudaan Jawa Barat ini mengamati jalannya konstruksi bangunan demokrasi bangsa ini.

Aksi Anarkis Demonstrasi Buruh Di Halaman Gedung Sate Bandung Tahun (Akil

Apa yang diprihatinkan Rahmat agaknya tak berlebihan. Akhir-akhir ini terlalu sering di depan mata kita dipertontonkan drama kecamuk perseteruan dari sebuah dangkalnya kedewasaan berpolitik. Mungkin beda pendapat, soal biasa dalam politik. Tapi kalau sudah dibalut aksi anarkisme, tentu sudah kebablasan namanya.

Gelegak darah emosi mendidih naik hingga keubun-ubun dan kebrutalan serta merta hadir membumbui amuk ambisi yang tunduk pada kekerdilan berpikir. Lantas akankah watak demokrasi berwujud anarkhis tumbuh subur?. Hal tersebut merisaukan politisi muda Jawa Barat ini yang berobsesi agar momentum Pilkada Jawa Barat berperan sebagai etalase perwujudan demokrasi santun.

Ketua Majelis Pemuda Indonesia (MPI) Jawa Barat ini menilai praktik demokratisasi sudah berbelok arah. Tercabut dari akar budaya dan nilai-nilai keadaban bangsa Indonesia yang sesungguhnya. Sekarang tendensi wajah demokrasi kita sudah mengarah ke model negara federal.

Tengok saja, ujarnya, model pemilihan anggota senat, sudah tak ada bedanya lagi dengan model pemilihan anggota legisltif dan kepemimpinan daerah maupun nasional. Karenanya, model demokratisasi yang dianut telah menghilangkan ruh ke-Pancasila-annya melalui mekanisme perwakilan yang selama ini kita praktekan.

Mantan Ketua DPD KNPI Jabar ini berpendapat otonomi daerah mirip sistem negara federal. Bahkan ada yang mempersepsikan eksistensi keanggotaan DPD di parlemen derajatnya laksana senator mewakili daerah yang diwakilinya.

Parahnya, fenomena demokratisasi sudah dikendalikan oleh kemauan dan selera kesemena-menaan persepsi masing-masing. "Satu sisi kita mengagung-agungkan demokratisasi, tapi disisi lain demokratisasi yang dijalankan dikendalikan oleh pola pikir pragmatisme," ujar Rahmat.

Banyak contoh praktek demokrasi bangsa ini yang berujung ketegangan. Ajang pilkada di berbagai daerah kerap menebar aroma sengketa menjurus menjadi tukang jagal etika berpolitik, memperburuk citra watak demokrasi. Ekspresi ketidak puasan atas hasil akhir dalam berbagai kasus, merongrong stabilitas pemerintahan.

Potensi konflik setiap saat bisa saja terjadi. Kondisi *chaos* dapat disebabkan oleh minimnya legitimasi rakyat pemilih. Sekadar contoh, dalam suatu pilkada di daerah, dari total pemilih, hanya 53 % saja yang menggunakan hak suaranya. Berarti ada 47% berstatus golput alias tidak menggunakan hak pilihnya.

Lantas dari pengguna hak pilih 53 % tadi, pasangan yang dinyatakan sebagai pemenang hanya meraih suara 15%, hanya seperempat lebih hak suara pemilih yang berjumlah 53%. Ironisnya, jika jumlah suara golput 43% dan jumlah suara yang kalah digabung, itu artinya hampir 85 % tidak setuju dengan paket pimpinan yang terpilih. Maka dengan dalih minimnya legitimasi rakyat, bisa saja output demokratisasi terancam laksana bom waktu.

Berkaca dari peristiwa-peristiwa anarkhis Pilkada, pria kelahiran Purwakarta 21 Agustus 1965 ini tak ayal ikut cemas akan Pilkada Jabar yang tinggal hitungan bulan. Sebagai provinsi berpenduduk terbesar di negeri ini, hajatan demokrasi ditengarai akan menyita perhatian publik. Masyarakat Jabar akan menjadi objek parameter demokratisasi dalam perwujudan pembangunan politik, pembangunan karakter ekonomi dan sosial budaya.

Menurut Rachmat, dari sekitar 40 juta penduduk provinsi ini, maka ¼ hak suara pemilih rakyat Indonesia dimiliki Jabar. Itu artinya tarik-menarik kepentingan sangat kuat. Sebab Jawa Barat merupakan 'lumbung' suara bagi ajang politik lokal maupun nasional.

Sulitkah melahirkan prosesi demokratisasi menjadi *happy ending*?

Rahmat tetap optimis, Jawa Barat tidak akan menjadi tumbal berikutnya. Walau tak mudah, tapi wujud praktik demokrasi santun bukanlah mimpi. Asalkan masyarakat Jawa Barat peka memanfaatkannya dan tanggap disertai tanggung

epatuhan

kibat Demokrasi Kebablasan)

jawab tinggi atas penggunaan hak suaranya untuk memilih pemimpin yang benar-benar merepresentasikan kepentingan mereka lima tahun ke depan.

Rahmat berharap rivalitas penggalangan aspirasi rakyat dilakukan dengan cara-cara yang sehat. Dengan tujuan untuk mencari solusi kepemimpinan yang lahir dari sebuah legitimasi dan demokratisasi yang santun. Bukan demokratisasi yang dilumuri noda pergolakan yang bermuara pada anarkhis.

Rahmat dengan tegas menggaris bawahi, *jadikanlah ajang pilkada momentum pemuliaan rakyat sekaligus pendidikan politik dan pendewasaan politik*. Praktik demokrasi menghendaki kepatuhan pada tahapan-tahapan dan mekanisme yang sudah disepakati dan bukan anarkhis. "Tak arif bila setiap keinginan lewat cara memaksakan perubahan aturan yang sudah disepakati bersama. Mau dikemanakan bangsa kita ini? Apalagi bila pemerintah sudah tidak dipercayai lagi," cetus Rachmat.

Menurutnya, kalangan elit harus mampu menjadi pelopor dan lokomotif bagi masyarakat agar punya mental kuat dan siap menerima kekalahan dan memberi selamat kepada saudaranya yang menang.

Kalangan elit harus mampu berperan menjadi tauladan. Hal ini mestinya juga berlaku sejak proses pencalonan oleh partai. Bukan sebaliknya, memunculkan wacana calon independen. Menurut Rahmat, ini pemahaman demokrasi kebablasan. Lalu mengkooptasi massa agar ambisinya terwujud. Ini bukan konsep perubahan. Tapi justru imbas dari ambisi politisasi modern. Diperkeruh lagi oleh ketidakarifan partai yang disinyalir justru berpraktek bak 'agen' yang mengomersilkannya kepada segelintir elit yang memang bersedia bertransaksi dalam mengejar ambisinya.

"Mestinya hegemoni partai jadi renungan. Solusinya tetap pada koridor-koridor aturan yang sudah disepakati. Baik dalam akuntabilitas partai, dalam rekruitmen kadernya yang terbaik, tanpa embel-embel," sindirnya.

On The Track

Rahmat dikenal sebagai sosok yang bersahaja oleh koleganya di berbagai OKP. Suksesnya menapaki karier di panggung politik tak lepas dari kepiawaiannya mengelola berbagai organisasi yang ditekuninya. Kini, sosok intelektual muda partai Golkar Jabar ini makin memperkaya partai berlambang pohon beringin dalam melestarikan kesinambungan kaderisasi dan estafet kepemimpinan ke depan.

Menyoal figur kepemimpinan Jabar lima tahun ke depan, secara tersirat Rahmat memberi pandangan pribadinya bahwa sosok pimpinan Jabar lima tahun ke depan punya kriteria yang tetap dapat melanjutkan program pembangunan Jabar yang sudah dibangun dan dijalankan sebelumnya. Itu artinya, sosoknya adalah figur yang paham suasana Jabar, seperti "*Silih Asah, Silih Asuh dan Silih Wawangi*". Sekarang ada kecenderungan melupakan *Silih Wawangi*-nya," tandas anggota Komisi E DPRD Jabar ini.

Wakil ketua FKPPI dan Sekretaris MPW PP Jabar ini meyakini, figur Gubernur nantinya adalah sosok yang mumpuni dan representasi legitimasi rakyat. Karena selama ini dipimpin oleh sosok yang paham terhadap kebutuhan masyarakat Jabar. Kerangka visi Jawa Barat periode 2003-2008 yang menetapkan Visi : "Akselerasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Guna Mendukung Pencapaian Visi Jawa Barat 2010", harus berlanjut. "Akan lebih afdol kiranya bila dipercayakan kepada sosok yang lebih menguasai programnya," kilah Wakil Ketua Pemuda Panca Marga Jabar ini.

Rachmat melihat konsep pembangunan Jabar sudah terarah. Dari sisi manajemen, pemerintahan selama ini sudah bagus dan tinggal implementasinya hingga ke aparat bawah. Penetapan target pencapaian IPM sebesar 80 pada tahun 2010 adalah salah satu indikator makro keberhasilan pencapaian Visi Jawa Barat dan telah menunjukkan komitmen yang kuat dari pemerintah provinsi.

Sedikitnya 5 program strategis pencapain IPM 80 dan kesolehan sosial harus dilanjutkan. Peningkatan daya beli, kesehatan dan pendidikan masyarakat target programnya sudah *on the right track*. Tinggal bagaimana kerjasama untuk saling memperbaiki kelemahan dengan tulus, proporsional serta memberi kesempatan peran yang makin luas kepada seluruh elemen masyarakat daerah. "Tema ini harus dilanjutkan, tentunya oleh sosok yang faham dengan program ini. Kalau tidak, maka Jabar makin kehilangan ciri khasnya," kilah Rahmat.

Sebagai komponen pemuda tanah pasundan, Rahmat menghimbau, biarlah warna baju dan atribut berbeda-beda, tetapi soal kepemimpinan yang penting adalah manfaat bagi seluruh rakyat. Bila keseluruhan itu tidak menyentuh kepentingan rakyat, Rachmat menyatakan siap menstimulir pemuda untuk berada di garis depan guna mengkritisi pemerintah. Tapi sebaliknya, pemuda siap pula di garis depan mendukung pemerintah kalau programnya memang menyentuh kepentingan masyarakat. ■ **PC, SP**

BIODATA

Nama:
Drs. Rachmat Sulaeman
T/Tgl Lahir:
Purwakarta, 21 Agustus 1965
Alamat:
Komp. Griya Caraka C 68 Bandung
Pendidikan Terakhir:
Sarjana Ilmu Administrasi
Pekerjaan:
Anggota FPG DPRD Jawa Barat
Nama Istri:
Mia Rosmiati
Anak:
Ilham Pratama Putra
Riwayat Organisasi:
Kabid. SDM DPP KNPI – Ketua MPI Jawa Barat – Sekretaris MPW PP Jabar – Ketua Umum DPD KNPI Jawa Barat – Wakil Ketua FKPPI Jawa Barat – Wakil Ketua Patriot Panca Marga Jawa Barat – Ketua Mapancas Jabar

HUT Ke-62 Pasukan Elit TNI-AL

foto: repro media indonesia

KSAL Laksdya TNI Sumardjono menginspeksi pasukan Marinir.

Pasukan Elit Korps Marinir TNI- AL telah tumbuh menjadi salah satu kekuatan strategis yang handal. Korps Baret Ungu ini siap menghadapi pihak-pihak yang ingin merongrong kedaulatan, keutuhan dan kewibawaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Itu merupakan harga mati yang sangat berat sekaligus mulia dan tak bisa ditawar-tawar lagi.

Sekelumit pesan itu disampaikan Komandan Korps Marinir (Dankormar) Mayjen TNI (Mar) Nono Sampono, S.Pi, M.Si dalam amanatnya pada HUT ke-62 Korps Marinir TNI-AL (15/11). Puncak peringatan hari jadi itu dipusatkan di Kesatrian Sutedi Senaputra, Karang Pilang, Surabaya, Jawa Timur.

Bertindak sebagai Inspektur Upacara KSAL Laksamana Madya TNI Sumardjono. Hadir pula Panglima TNI Marsekal TNI Djoko Suyanto, mantan KSAL Laksamana TNI Slamet Soebijanto, Laksamana TNI (Purn) Kent Sondakh, Laksamana TNI (Pur) Indroko, para mantan Dankormar dan pejabat teras TNI AL. Tamu kehormatan khusus, Komandan Wing Udara Marinir Asia Pasifik Mayjen Robet Schmidle yang bermarkas di Okinawa juga berkesempatan hadir dalam acara tersebut.

Berbagai atraksi yang ditampilkan membuat hadirin terkesima. Saat *Master of Ceremony* (MC) menyebut nama Komandan Upacara memasuki lapangan upacara, secara tiba-tiba, muncul Kolonel Marinir Kasirun Situmorang, dengan terjun payung. Situmorang yang sehari-hari menjabat sebagai Asintel Divisi I Marinir mendarat mulus, tepat di titik sasaran tempat upacara.

Dia ternyata tidak mendarat sendirian, tapi didampingi 62 personil pasukan terjun payung yang empat diantaranya adalah anggota Korps Wanita Angkatan Laut (KOWAL). Keempat anggota KOWAL itu membawa buket bunga yang diberikan langsung kepada Ibu KSAL, Ny. Sri Rahayu Sumardjono.

Atraksi Kolone Senapan sniper prajurit Marinir juga tak kalah hebat saat melakukan simulasi tembak dengan membuat huruf berbunyi "Baktiku Untukmu Indonesia". ■ **RON, SP**

Tiga Pejabat Strategis Dilantik

Gerbong Sertijab terus bergulir. Pada hari dan tanggal yang sama (19/11), TNI Angkatan Darat mengalami pergantian tiga sekaligus pucuk komandan baru di tempat yang berbeda. Mereka yang menerima jabatan baru itu adalah Kepala Staf Umum (Kasum) TNI diduduki oleh Letjen TNI Erwin Sujono, yang sebelumnya menjabat sebagai Pangkostrad. Asisten Operasi (Asops) dijabat Mayjen TNI Zamroni yang sebelumnya Pangdam XVII/TKR dan Letjen TNI Cornel Simbolon menjadi Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad). Sebelumnya dia menjabat Dankodiklatad di Bandung.

Pergantian Kasum TNI dan Asops ini atas surat perintah Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto bernomor Sprin 2129/XI/2007 tanggal 16 November 2007, di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Sedangkan sertijab Wakasad dilakukan di Mabes TNI AD oleh Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Djoko Santoso.

Panglima TNI menyebutkan, sertijab Kasum memiliki makna penting, yang sangat strategis dalam koridor pembangunan TNI selaku kekuatan pertahanan.. Selain memiliki tanggung jawab terhadap perumusan kebijakan dalam pembangunan dan penggunaan TNI. ■ RON, SP

G. Toisutta Pangkostrad Baru

Begitu tongkat komando diterima, secara resmi jabatan Panglima Komando Strategi Angkatan Darat (Pangkostrad) beralih ke Mayjen TNI George Toisutta.

Penyerahan tongkat komando dari Pangkostrad lama, Letnan Jenderal TNI Erwin Sudjono itu berlangsung di Lapangan Upacara Markas Divisi Inf-I/ Kostrad, Cilodong, Jawa Barat (13/11). Erwin sendiri dipromosikan memegang jabatan sebagai Kepala Staf Umum (Kasum) TNI menggantikan Letjen TNI Endang Suwarya.

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Djoko Santoso menyatakan, terpilihnya Mayjen TNI George Toisutta sebagai Pangkostrad bukan sesuatu yang diputuskan secara mendadak apalagi terburu-buru. Tapi melalui tahapan seleksi yang cukup panjang.

Pergantian pucuk pimpinan ini adalah upaya mewujudkan hasil yang lebih baik dalam pembinaan dan untuk mendapatkan penyegaran prajurit.

Lebih lanjut, KSAD memaparkan mengenai kinerja suatu organisasi, termasuk organisasi Angkatan Darat yang memang sengaja dirancang untuk senantiasa dinamis, segar, energik, dan berkelanjutan.

Djoko juga mengingatkan kembali fungsi dan tugas kesatuan Kostrad sebagai Kotama Pembinaan Angkatan Darat. Sekaligus sebagai Kotama Profesional TNI yang memiliki tugas pokok membina kesiapan operasional segenap satuan dalam jajaran komandonya untuk senantiasa siap melaksanakan tugas operasional pada tingkat strategis.

Untuk mampu melaksanakan tugas pokok Kostrad dengan paripurna, maka setiap prajurit dan satuan Kostrad harus memiliki mobilitas yang tinggi, mampu bereaksi cepat sebagai satuan penangkal yang handal dan siap digerakkan ke seluruh wilayah Nusantara. Serta tanggap terhadap segala bentuk dan jenis ancaman yang mungkin timbul. ■ RON, SP

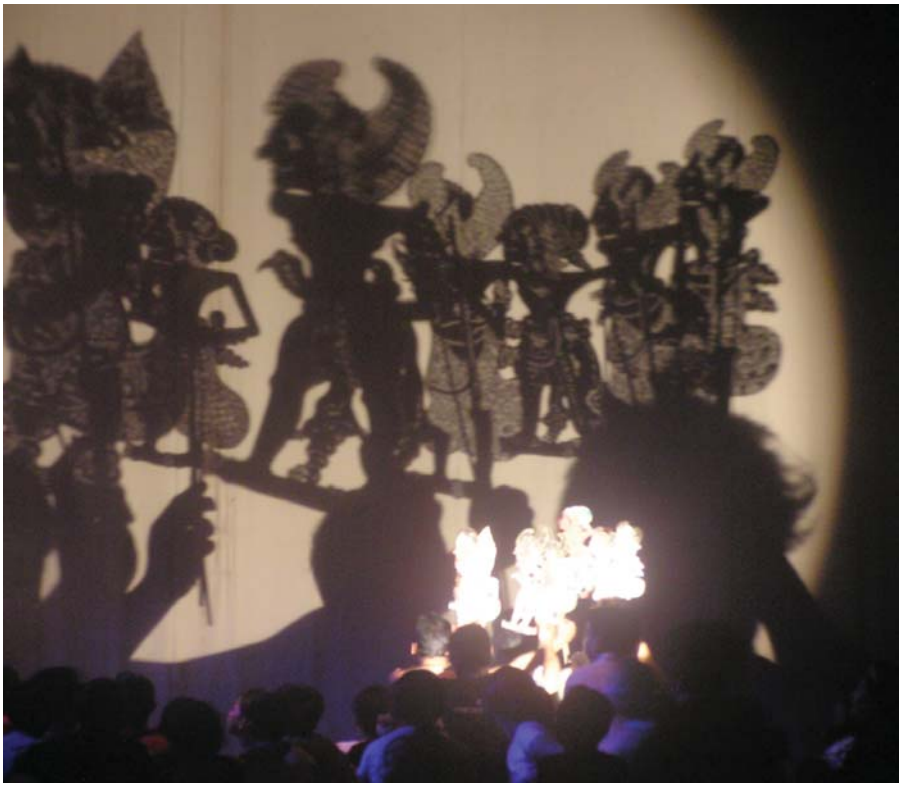

Sarimin dan Wayang Listrik

Dua Seniman Indonesia, Butet Kartaredjasa dan I Made Sidia menampilkan karya terbaik yang Indah dan menyentuh dalam Art Summit 2007.

Teater Wayang Listrik pimpinan seniman I Made Sidia asal Pulau Dewata Bali tampil sebagai pembuka festival di Graha Bhakti Budaya Taman Ismail Marzuki pada awal November 2007. Dengan garapan apik Made menampilkan empat dalang sekaligus dengan menggunakan dua bahasa, Inggris dan Indonesia. Gambar-gambar proyektor menggunakan elemen pertunjukan modern yang berbeda dengan menampilkan visual dan digital yang indah dan menarik.

Made menampilkan simbolisasi tema "Perjalanan Tualen." Dia mengawali dengan adegan perasaan khawatir atas kondisi lingkungan khususnya hutan yang semakin rusak akibat ulah manusia. Secara tiba-tiba keceriaan para penguni hutan seperti harimau, buaya, jerapah dan sebagainya yang asyik bermain sirna. Mereka menjadi takut ketika mesin-mesin dan manusia menebangi dan menjarah hutan tanpa kenal ampun. Hal ini mengekspresikan kegelisahannya melihat tabiat manusia di masa kini ternyata belum beranjak dari primata.

Kemudian, Tualen melanjutkan perjalanannya ke kota. Disinilah akhirnya petualangan Tualen yang dalam pewayangan Bali dikenal sebagai tokoh punakawan dimulai. Tualen mendampingi putra mahkota kerajaaan Ayodya bernama Rama untuk mencari istrinya Sinta yang diculik Raja Alengka, Rahwana. Cerita yang berdasarkan pada epik Ramayana ini banyak mengandung pelajaran mengenai keserakahan dan kesombongan.

Wayang ini ditampilkan secara modern berbalut harmonisasi gamelan, *keyboard*, gitar, dan drum, tidak lazim seperti penampilan wayang tradisional pada umumnya.

Sementara, Monolog Sarimin ala Butet Kartaredjasa menampilkan lakon dan sekaligus pelajaran yang sangat berarti mengenai ketidakberdayaan *wong cilik*, dengan sebuah rangkaian pentas *Art Summit* tanggal 14-18 November 2007 di Graha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki.

Sarimin, pria tua berusia 54 tahun, berprofesi sebagai tukang topeng monyet keliling. Suatu ketika dia menemukan kartu tanda penduduk (KTP). Dia tidak tahu apa yang tertera dalam KTP itu karena dia buta huruf, akhirnya ia memutuskan untuk menyerahkannya pada Polisi.

Apa hendak dikata. Sarimin yang berniat baik menyerahkan KTP, ternyata malah dituduh mencuri dan hendak melakukan pemerasan. Sebab KTP tersebut ternyata milik seorang hakim agung. Sang polisi dengan lantangnya berkata, "Kamu bisa dikenai Pasal 322 dan Pasal 368, mengenai pencurian dan pemerasan."

Dengan sekuat tenaga Sarimin menolak mati-matian tuduhan tersebut. Tapi semuanya sia-sia belaka. Dia tetap dijerumuskan dalam penjara. Sarimin hanya bisa pasrah tanpa bisa berbuat apa-apa. Binsar, seorang pengacara yang membelanya malah menyarankannya untuk mengaku bersalah.

Butet Kartaredjasa menampilkan monolog Sarimin secara cermat, cerdas dan pas. Dia secara berganti-ganti menjadi Sarimin yang tidakberdaya, polisi yang arogan dan pengacara Binsar yang mencari pembenaran untuk dirinya sendiri.

Pagelaran selama hampir dua jam itu membuat penonton menikmati banyolan dan celetukan-celetukan khas Raja Monolog Butet. Musik garapan Djaduk Ferianto yang dikemas secara apik dan indah turut serta menghidupkan suasana pementasan yang berlangsung 14-18 November 2007 itu. Skenarionya khusus ditulis Agus Noor, yang lahir dari hasil sebuah diskusi panjang bersama praktisi hukum, Pradjoto SH.

Pertunjukan yang dipersiapkan selama dua bulan ini terhitung sukses. Bahkan pementasannya diperpanjang. Sedianya pementasannya hanya berlangsung tanggal 13-14 November. Namun akhirnya berlanjut sampai 18 November. Sarimin juga manggung di Yogyakarta pada 26-27 November di Purna Budaya, Bulaksumur.

Festival seni kontemporer Art Summit Indonesia 2007 (ASI) ini menampilkan berbagai karya seniman dari berbagai negara, tak kurang 29 pertunjukan seni kontemporer baik bidang tari, teater, maupun musik. Diikuti oleh 11 negara baik dari Asia dan Eropa. ASI berlangsung sepanjang 1-30 November dengan menampilkan pertunjukan di tiga tempat berbeda, Gedung Kesenian Jakarta, Taman Ismail Marzuki, dan Goethe Institut. ■ **ZAH**

200 Juta untuk Bisa Nomor Empat

Sejak tahun 1977, Indonesia beberapa kali berturut-turut menjadi juara umum SEA Games. Tapi, pada SEA Games XXIII 2005, langsung melorot ke peringkat lima. Pada SEA Games XXIV 2007, kontingen merah putih di targetkan meraih paling tidak peringkat empat. Untuk itu, para atlet diransang dengan memberikan bonus Rp200 juta untuk setiap medali emas. Dengan ransangan seperti itu serta pembinaan rutin, pada SEA Games 2011, Indonesia diharapkan sudah bisa meraih kembali juara umum.

foto: repro media indonesia

Kontingen Merah Putih siap berangkat mengharumkan nama bangsa.

Pesta olahraga se-Asia Tenggara, SEA Games XXIV akan berlangsung 6-15 Desember 2007 di Negeri Gajah Putih, Thailand. Kontingen Indonesia yang berkekuatan 542 atlet akan mengikuti 333 nomor/event di 38 cabang olahraga dari 43 cabang yang dipertandingkan. Mengingat prestasi Indonesia pada SEA Games XXIII tahun 2005 di Phillipina hanya menduduki peringkat kelima dari 11 negara peserta, kali ini pemerintah tidak ingin muluk-muluk membuat target berlebihan. Pemerintah hanya menargetkan peringkat keempat, naik satu peringkat dari sebelumnya. Itu pun, untuk setiap medali emas dijanjikan akan diberikan bonus Rp200 juta. Istimewanya lagi, untuk cabang olahraga beregu, bonus Rp200 juta dimaksud bukan untuk semua, tapi masing-masing anggota tim mendapatkan Rp200 juta.

Bisa dihitung, jika masing-masing atlet mendapatkan bonus Rp200 juta, maka tidak kurang dari Rp108 miliar harus disediakan untuk bonus saja. Padahal, seperti kata Menegpora, jika seorang atlet mendapatkan lebih dari satu medali emas, sang atlet tetap diberikan bonus sesuai dengan jumlah medali yang diperolehnya. Jadi jika seorang atlet mendapatkan tiga emas, berarti dia mendapatkan Rp600 juta.

Pemberian bonus ini jelas bukan karena Indonesia mendadak kaya, tapi sebagai wujud upaya pemerintah memulai kembali memajukan perolahragaan nasional dengan menanamkan rasa bangga dalam diri para atlet menjadi seorang atlet. "Sekarang, untuk meraih emas SEA Games 2007 pemerintah akan memberikan Rp200 juta. Itu karena pemerintah tidak mau seorang atlet yang berprestasi hanya mendapatkan sambutan, dielu-elukan tetapi hidupnya sengsara," ujar Menegpora Adhyaksa Dault saat meresmikan kontingen SEA Games Indonesia di Senayan, Jakarta, Rabu (21/11). "Ini adalah bentuk perhatian untuk merangsang kebangkitan rasa bangga sebagai seorang atlet. Sebab itu, saya meminta agar para atlet yang dikirim ke SEA Games nanti sadar bahwa mereka dikirim tidak untuk gagal. Atlet yang dikirim harus mendapatkan medali," tegasnya.

Namun sebaliknya, cabang-cabang olahraga yang gagal mendapatkan medali, akan dievaluasi. Karena itu, setiap pengurus cabang olahraga diminta memberikan perhatian yang serius terhadap kebijakan tersebut.

Dengan program ini, pemerintah mengharapkan regenerasi atlet ke depan bisa terjamin. "Dulu orang takut jadi atlet karena tidak punya masa depan. Makanya, kita krisis atlet. Akan tetapi, sekarang sudah bisa jadi profesi. Berprofesi jadi atlet punya masa depan," kata Menegpora. Dengan pembinaan atlet demikian, pada SEA Games 2011, Adhyaksa mengharapkan Indonesia kembali juara umum. ■ MS

APBD untuk Klub Sepak Bola

Setelah sempat khawatir tidak mendapat kucuran dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)lagi, kini klub-klub sepakbola daerah bisa sedikit merasa lega. Sebab, walaupun tidak sebebas dan sebesar sebelumnya, mereka masih berkesampatan menikmatinya.

Setahun terakhir ini, organisasi sosial semacam organisasi veteran, kepemudaan, dan keolahragaan, mengeluhkan terpangkasnya bantuan sosial sejak berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.13/2006 tentang Pedoman Dasar Pengelolaan Keuangan Daerah. Namun, dalam Permendagri No.59/2007, yang merupakan revisi Permendagri No13, pengucuran bantuan sosial yang selama ini menjadi acuan pendanaan klub sepakbola daerah oleh APBD secara tersirat mendapat kelonggaran. Tapi untuk cabang sepak bola, dana itu tidak boleh langsung mengucur ke klub, tetapi harus melalui KON di daerah-daerah.

Menanggapi Permendagri No.59 Tahun 2007 ini, Ketua Komite Olahraga Nasional (KON) Rita Subowo kepada harian *Kompas* mengaku telah memerintahkan komite-komite olahraga nasional di daerah-daerah agar lebih selektif menetapkan cabang olahraga unggulan yang akan didanai APBD. Hal tersebut perintahkan Rita, mengingat setiap daerah memiliki cabang olahraga unggulan yang berbeda-beda. Dan, khusus cabang sepak bola, Rita menyatakan bisa mendapat bagian dana APBD tetapi tidak sebesar sebelumnya yang terkuras untuk jorjoran membeli pemain asing.

Tidak bisa disangkal, klub sepak bola memang merupakan bagian strategi promosi daerah. Sebab melalui sepak bola, nama daerah bisa dengan sendirinya terangkat seiring pemberitaan klub sepakbola daerahnya. Namun, seperti dikatakan oleh berbagai pihak, pendanaan klub sepak bola oleh APBD memang hendaknya jangan mengalahkan kebutuhan publik primer, seperti pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pembangunan lainnya. Lagi pula, dengan dana APBD seleluasa seperti selama ini pun, pofesionalisme klub sepak bola daerah tidak juga meningkat. Selama ini, sebagian besar dana itu dihabiskan untuk membeli dan membayar pemain asing padahal kualitasnya biasa-biasa saja. Bahkan, banyak yang lebih buruk daripada pemain Indonesia sendiri.

Pengamat persepakbolaan nasional lainnya juga berpendapat, kalau memang daerahnya mampu, tidak masalah apabila dana APBD dipergunakan untuk klub sepakbola. Hanya saja, dana itu jangan untuk biaya operasional klub yang akan menguap dalam satu musim. Tapi, sebaiknya digunakan untuk membangun infrastruktur sepakbola itu sendiri. ■ MS

TokohINDONESIA

MAJALAH BERBASIS WEBSITE

www.tokohindonesia.com

THE EXCELLENT BIOGRAPHY